

**OPTIMIS
JATIM BANGKIT**



Dinas Perindustrian
dan Perdagangan
Provinsi Jawa Timur

RENCANA STRATEGIS PERUBAHAN KE-II 2019 - 2024



**DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
PROVINSI JAWA TIMUR
TAHUN 2022**

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Rencana Strategis (Renstra) Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Timur Perubahan Tahun 2019-2024 merupakan dokumen perencanaan lima tahunan yang memuat tujuan, sasaran, program dan kegiatan pembangunan di bidang perindustrian dan perdagangan pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Timur selama tahun 2019 sampai dengan 2024 yang disusun dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Jawa Timur Tahun 2019-2024, latar belakang perubahan meliputi adanya kebijakan nasional terkait PMDN 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah dan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang hasil verifikasi, validasi dan inventarisasi pemutahiran klasifikasi, kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah

1.2. Landasan Hukum

Landasan hukum penyusunan Rencana Strategis Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Timur Tahun 2019-2024 adalah sebagai berikut:

- a. Undang Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
- b. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2019 Nomor 42);
- c. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur, Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447).
- d. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2020 Nomor 1 Seri C, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 102);

- e. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian;
- f. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan;
- g. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
- h. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 102 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 68 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Timur;
- i. Peraturan Gubernur Nomor 60 Tahun 2018 tentang Nomenklatur, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Timur;
- j. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 7 Tahun 2019 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Jawa Timur Tahun 2019-2024 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2021 Nomor 2 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 105);

1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud dari penyusunan perubahan rencana strategis Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Timur Tahun 2019-2024 adalah sebagai dokumen perencanaan yang memuat rencana program dan kegiatan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Timur selama kurun waktu tahun 2019 hingga 2024. Adapun tujuannya adalah:

- a. Menyelaraskan tujuan, sasaran, program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Timur Tahun 2019-2024 dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2019-2024;
- b. Memberikan dasar bagi penyusunan Rencana Kerja Tahunan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Timur pada Tahun 2019-2024;

1.4. Sistematika Penulisan

Dokumen Rencana Strategis Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Timur Tahun 2019-2024 disusun dengan sistematika sebagai berikut:

Bab I : Pendahuluan mencakup: Latar Belakang, Landasan Hukum, Maksud dan Tujuan, Sistematika Penulisan.

Bab II : Gambaran Pelayanan PD mencakup: Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi PD, Sumber Daya PD, Kinerja Pelayanan PD, Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan PD.

Bab III : Permasalahan dan Isu-isu Strategis PD mencakup: Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan PD, Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih, Telaahan Renstra K/L dan Renstra Provinsi/Kabupaten/Kota, Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis, Penentuan Isu-isu Strategis.

Bab IV : Tujuan dan Sasaran, mencakup: Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah PD.

Bab V : Strategi dan Arah Kebijakan.

Bab VI : Rencana Program dan Kegiatan serta Pendanaan.

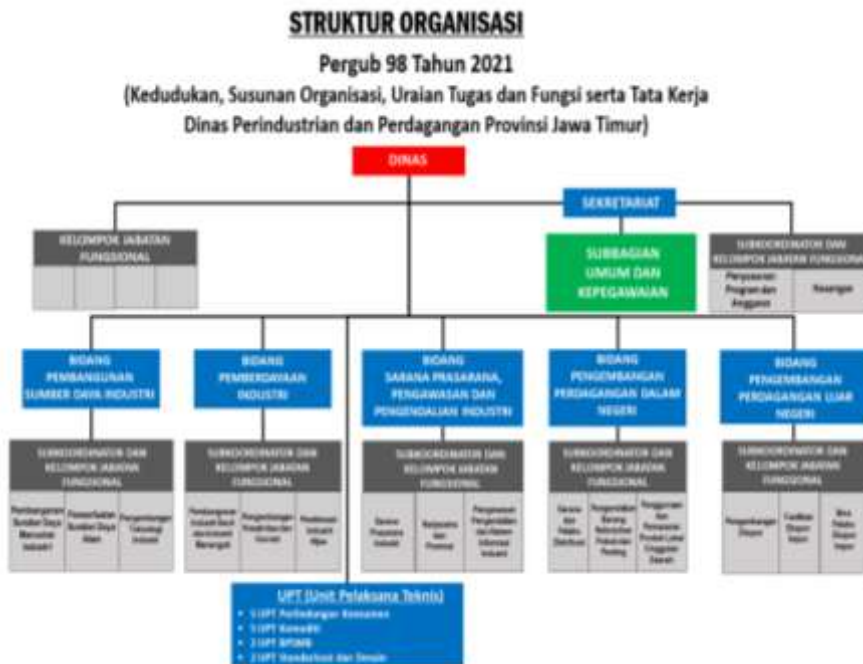
Bab VII : Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan

Bab VIII: Penutup

BAB II
GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

2.1. Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah

Disebutkan dalam PERDA Provinsi Jawa Timur No. 11 tahun 2016, pada Bab IV, pasal 4 bahwa "Dinas Perindustrian dan Perdagangan menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perindustrian dan bidang perdagangan terdiri atas 1 (satu) sekretariat dan 5 (lima) bidang". Sesuai Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 98 tahun 2021, Keputusan Gubernur No. 188-38-KPTS-013-2022, Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 102 tahun 2018, Struktur Organisasi Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Timur terdiri dari 1 unit eselon II, 20 unit eselon III yang terdiri dari 1 Sekretariat, 5 Bidang, 14 Unit Pelaksana Teknis (UPT), dan kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana gambar 1.1.



Gambar 2.1. Struktur Organisasi

Tugas pokok dan fungsi Dinas Perindustrian dan Perdagangan Sesuai Peraturan Gubernur Jawa Timur No. 98 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Timur sebagai berikut :

Tugas :

Sesuai PERGUB Provinsi Jawa Timur No. 98 tahun 2021 tanggal 30 Desember 2021, dalam Bab III Uraian Tugas dan Fungsi, Pasal 4, bagian ayat (1) disebutkan bahwa **"Dinas Perindustrian dan Perdagangan, mempunyai tugas membantu Gubernur melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah provinsi di bidang perindustrian dan bidang perdagangan serta tugas pembantuan"**.

Fungsi :

Selanjutnya dalam ayat (2) disebutkan, dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Dinas Perindustrian dan Perdagangan menyelenggarakan fungsi :

- Perumusan kebijakan di bidang perindustrian dan bidang perdagangan;
- Pelaksanaan kebijakan di bidang perindustrian dan bidang perdagangan;
- Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang perindustrian dan bidang perdagangan;
- Pelaksanaan administrasi Dinas di bidang perindustrian dan bidang perdagangan; dan
- Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Gubernur sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Tugas pokok masing-masing unit kerja sesuai Peraturan Gubernur Jawa Timur No. 98 Tahun 2021 serta Peraturan Gubernur Jawa Timur No. 60 Tahun 2018, adalah sebagai berikut :

- 1) **Sekretariat**, dengan tugas "Merencanakan, melaksanakan, mengkoordinasikan dan mengendalikan kegiatan administrasi umum,

kepegawaian, perlengkapan, penyusunan program, keuangan, hubungan masyarakat dan protokol”.

- 2) **Bidang Pembangunan Sumber daya Industri** dengan tugas “Melaksanakan penyiapan perumusan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan kebijakan daerah di bidang pembangunan sumber daya industri”.
- 3) **Bidang Pemberdayaan Industri**, dengan tugas “Melaksanakan penyiapan perumusan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan kebijakan daerah di bidang pemberdayaan industri”.
- 4) **Bidang Sarana Prasarana, Pengawasan dan Pengendalian Industri**, dengan tugas “Melaksanakan penyiapan perumusan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan kebijakan daerah di bidang sarana prasarana, pengawasan dan pengendalian industri”.
- 5) **Bidang Pengembangan Perdagangan Dalam Negeri**, dengan tugas “Melaksanakan penyiapan koordinasi, fasilitasi perumusan dan pelaksanaan kebijakan, bimbingan teknis, evaluasi serta pelaporan pelaksanaan di bidang sarana dan pelaku distribusi, pengendalian barang kebutuhan pokok dan barang penting serta pemberdayaan konsumen, tertib niaga dan Penggunaan dan Pemasaran Produk Dalam Negeri (P3DN)”.
- 6) **Bidang Pengembangan Perdagangan Luar Negeri**, dengan tugas “Melaksanakan penyiapan koordinasi, fasilitasi perumusan dan pelaksanaan kebijakan, bimbingan teknis, evaluasi serta pelaporan pelaksanaan di bidang pengembangan ekspor, fasilitasi ekspor impor dan bina pelaku ekspor impor”
- 7) **UPT Pengujian Sertifikasi Mutu Barang-Lembaga Tembakau Surabaya**, dengan tugas “Melaksanakan sebagian tugas Dinas dalam pengujian, inspeksi teknis, kalibrasi, sertifikasi mutu, sertifikasi produk, pembinaan dan pengawasan mutu barang, ketatausahaan dan pelayanan masyarakat”.
- 8) **UPT Pengujian Sertifikasi Mutu Barang-Lembaga Tembakau Jember**, dengan tugas “Melaksanakan sebagian tugas Dinas dalam pengujian, inspeksi teknis, kalibrasi, sertifikasi mutu, sertifikasi produk, pembinaan dan pengawasan mutu barang, ketatausahaan dan pelayanan masyarakat”.

- 9) **UPT Industri Logam dan Perekayasaan Sidoarjo**, dengan tugas "melaksanakan sebagian tugas Dinas dalam pelayanan teknis, pembinaan, alih teknologi, perekayasaan, pengembangan desain, menyediakan sarana usaha industri, ketatausahaan dan pelayanan masyarakat.
- 10) **UPT Industri Kulit dan Produk Kulit Magetan**, dengan tugas "melaksanakan sebagian tugas Dinas dalam alih teknologi, pengembangan desain, penyediaan sarana usaha industri, ketatausahaan dan pelayanan masyarakat".
- 11) **UPT Industri Kayu dan Produk Kayu Pasuruan**, dengan tugas "melaksanakan sebagian tugas Dinas dalam alih teknologi, pengembangan desain, penyediaan sarana usaha industri, ketatausahaan dan pelayanan masyarakat".
- 12) **UPT Industri Makanan, Minuman dan Kemasan Surabaya**, dengan tugas "melaksanakan sebagian tugas Dinas dalam pelayanan teknis, pembinaan, alih teknologi, pengembangan desain, penyediaan sarana usaha industri, ketatausahaan dan pelayanan masyarakat".
- 13) **UPT Aneka Industri dan Kerajinan Surabaya**, dengan tugas "melaksanakan sebagian tugas Dinas dalam pelayanan teknis, pembinaan, alih teknologi, pengembangan desain, penyediaan sarana usaha industri, ketatausahaan dan pelayanan masyarakat".
- 14) **UPT Pengembangan Mutu Produk Industri dan Teknologi Kreatif Surabaya**, dengan tugas "melaksanakan sebagian tugas Dinas dalam fasilitasi, pengembangan mutu produk industri, Hak kekayaan intelektual (HKI), desain produk industri, teknologi kreatif dan ketatausahaan".
- 15) **UPT Pengembangan Mutu Produk Industri dan Teknologi Kreatif Malang**, dengan tugas "melaksanakan sebagian tugas Dinas dalam fasilitasi, pengembangan mutu produk industri, Hak kekayaan intelektual (HKI), desain produk industri, teknologi kreatif dan ketatausahaan".
- 16) **UPT Perlindungan Konsumen Surabaya**, dengan tugas "melaksanakan sebagian tugas Dinas dalam pengawasan barang beredar dan jasa, pemberdayaan konsumen dan pelaku usaha di wilayah kerja UPT Perlindungan Konsumen Surabaya".

- 17) UPT Perlindungan Konsumen Malang**, dengan tugas “melaksanakan sebagian tugas Dinas dalam pengawasan barang beredar dan jasa, pemberdayaan konsumen dan pelaku usaha di wilayah kerja UPT Perlindungan Konsumen Malang”.
- 18) UPT Perlindungan Konsumen Jember**, dengan tugas “melaksanakan sebagian tugas Dinas dalam pengawasan barang beredar dan jasa, pemberdayaan konsumen dan pelaku usaha di wilayah kerja UPT Perlindungan Konsumen Jember”.
- 19) UPT Perlindungan Konsumen Kediri**, dengan tugas “melaksanakan sebagian tugas Dinas dalam pengawasan barang beredar dan jasa, pemberdayaan konsumen dan pelaku usaha di wilayah kerja UPT Perlindungan Konsumen Kediri”.
- 20) UPT Perlindungan Konsumen Bojonegoro**, dengan tugas “melaksanakan sebagian tugas Dinas dalam pengawasan barang beredar dan jasa, pemberdayaan konsumen dan pelaku usaha di wilayah kerja UPT Perlindungan Konsumen Bojonegoro”.

2.2. Sumber Daya Perangkat Daerah

Dari sisi aset, jumlah aset tetap Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Timur samapai dengan akhir tahun 2022 tercatat sebesar Rp. 475.358.227.487 dengan perincian sebagaimana Tabel 2.1 berikut:

Tabel 2.1.
Rincian Aset Tetap Disperindag Prov Jatim

No	Jenis Aset Tetap	Nilai (Rp.)
1	Tanah	77.610.944.579
2	Peralatan dan Mesin	242.016.278.902
3	Gedung dan Bangunan	143.643.111.117
4	Jalan, Irigasi dan Jaringan	11.405.741.809
5	Aset Tetap lainnya	181.071.930
6	Konstruksi Dalam Pengerjaan	501.079.150
	Jumlah	475.358.227.487

Sedangkan dari sisi sumber daya kepegawaian, jumlah pegawai Dinas Perindustrian dan Perdagangan sampai dengan akhir tahun 2022 tercatat sebanyak 257 orang, secara rinci dapat dilihat pada Tabel 2.2.

Tabel 2.2. Jumlah Pegawai Berdasarkan Unit Kerja Tahun 2022

NO.	UNIT KERJA	GOLONGAN				Total
		I	II	III	IV	
1	SEKRETARIAT	-	15	20	4	39
2	BIDANG PEMBANGUNAN SUMBER DAYA INDUSTRI	-	-	7	2	9
3	BIDANG PEMBERDAYAAN INDUSTRI	-	1	8	1	10
4	BIDANG PENGEMBANGAN PERDAGANGAN DALAM NEGERI	-	-	7	2	9
5	BIDANG PENGEMBANGAN PERDAGANGAN LUAR NEGERI	-	-	4	3	7
6	BIDANG SARANA PRASARANA PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN INDUSTRI	-	1	9	2	12
7	UPT PK SURABAYA	-	2	2	2	6
8	UPT PK MALANG	1	-	5	2	8
9	UPT PK KEDIRI	-	4	4	1	9
10	UPT PK JEMBER	-	-	7	1	8
11	UPT PK BOJONEGORO	-	2	3	2	7
12	UPTI LOGAM SIDOARJO	1	20	8	3	32
13	UPTI KULIT MAGETAN	1	9	7	1	18
14	UPTI KAYU PASURUAN	2	8	4	2	16
15	UPTI MAMIN SIDOARJO	-	6	2	3	11
16	UPTI ANEKA IND. & KERJ. SBY	-	5	7	-	12
17	UPT PSMB - LT SURABAYA	-	3	10	2	15
18	UPT PSMB - LT JEMBER	2	-	8	2	12
19	UPT PMPI & TK SURABAYA	-	1	6	3	10
20	UPT PMPI & TK MALANG	-	3	4	-	7
	JUMLAH TOTAL	7	80	132	38	257

2.3. Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Tingkat capaian kinerja pelayanan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Timur Tahun 2014-2019 berdasarkan hasil pengukurannya disajikan dalam tabel T-C 23 sebagai berikut :

**Tabel T-C.23. Pencapaian Kinerja pelayanan Perangkat daerah
Disperindag Prov. Jawa Timur**

NO	INDIKATOR KINERJA	TUJUAN	SASARAN	SPM	IKK/PMD 18/2020/RAKOERT EK	TARGET RENSTRA PERANGKAT DAERAH						REALISASI CAPAIAN				RASIO CAPAIAN		KET
						2019	2020	2021	2022	2023	2024	2019	2020	2021	2022	2019	2020	
1	2	3	4	5	6	7						8				9		10
1	Persentase Pertumbuhan PDRB Kategori Industri Pengolahan (%)	v				7,63	-0,48	3,18	5,02	5,93	7,46	6,85	-2,06	3,36	6,28	89,8	-	
2	Nilai PDRB industri pengolahan (Triliun Rp)		V			650,22	675	700	725	750	775	711,3	705,79	753,99	835,7	109,4	104,6	
3	Persentase Pertumbuhan PDRB Kategori Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi (%)	v				6,34	-5,72	0,14	3,08	4,69	7,18	6,1	-5,74	7,83	6,87	96,21	-	

Rencana Strategis Perubahan ke-II 2019-2024

NO	INDIKATOR KINERJA	TUJUAN	SASARAN	SPM	IKK/PMD 18/2020/RAK OERT EK	TARGET RENSTRA PERANGKAT DAERAH						REALISASI CAPAIAN				RASIO CAPAIAN		KET
						2019	2020	2021	2022	2023	2024	2019	2020	2021	2022	2019	2020	
1	2	3	4	5	6	7						8				9		10
4	Nilai PDRB Perdagangan (Rp. Triliun)		V			-	-	311,48	331,26	352,72	376,02	-	-	452,71	509,9	-	-	
5	Persentase pertumbuhan net ekspor non migas (%)		V			2	1	-	-	-	-	127,11	-26,4	-	-	6355,5	-	
6	Persentase pertumbuhan net ekspor antar daerah (%)		V			5	2	-	-	-	-	-4,47	235,95	-	-	-89,4	-	
7	Persentase peningkatan barang yang diawasi dan sertifikasi barang		v			2	1	1	1	1	1	3,1	-53,86	5,30	107,7	155	-	

Rencana Strategis Perubahan Ke-II 2019-2024

NO	INDIKATOR KINERJA	TUJUAN	SASARAN	SPM	IKK/PMD 18/2020/RAK OERT EK	TARGET RENSTRA PERANGKAT DAERAH						REALISASI CAPAIAN				RASIO CAPAIAN		KET
						2019	2020	2021	2022	2023	2024	2019	2020	2021	2022	2019	2020	
1	2	3	4	5	6	7						8				9		10
	beredar (%)																	
8	Nilai sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah		V			86	86,2	86,4	86,6	86,8	87	90	90,24	90,50	90,7	104,65	104,69	
7	Inflasi Pangan Bergejolak				v		2,4	2,4	2,4	2,4	2,4		2,14	3,56	6,54		89,17	
8	Pertumbuhan nilai ekspor non migas				v		1	1	1	1	1		-5,65	16,59	6,85			
9	Persentase penanganan pengaduan konsumen				v		100	100	100	100	100	100	100	100	100		100	

Rencana Strategis Perubahan ke-II 2019-2024

NO	INDIKATOR KINERJA	TUJUAN	SASARAN	SPM	IKK/PMD 18/2020/RAK OERT EK	TARGET RENSTRA PERANGKAT DAERAH					REALISASI CAPAIAN				RASIO CAPAIAN		KET	
						2019	2020	2021	2022	2023	2024	2019	2020	2021	2022	2019		2020
1	2	3	4	5	6	7					8				9		10	
10	Persentase barang beredar yang diawasi yang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan				v		90	90	90	90	90		95,36	95,42	96,13		106,0	
11	Persentase komoditi potensial yang sesuai dengan ketentuan berlaku				v		25	26	27	28	29		26,63	13,04	100		106,5	
12	Tertib Usaha				v		100	100	100	100	100		100	100	100		100	
13	Persentase kinerja realisasi pupuk				v		95	95	95	95	95		97,7	90,21	97,9		106,5	

Rencana Strategis Perubahan Ke-II 2019-2024

NO	INDIKATOR KINERJA	TUJUAN	SASARAN	SPM	IKK/PMD 18/2020/RAK OERT EK	TARGET RENSTRA PERANGKAT DAERAH					REALISASI CAPAIAN				RASIO CAPAIAN		KET	
						2019	2020	2021	2022	2023	2024	2019	2020	2021	2022	2019		2020
1	2	3	4	5	6	7					8				9		10	
14	Persentase stabilitas dan jumlah ketersediaan harga barang kebutuhan pokok				v		10	10	10	10	10		12,31	8,88	8,49			
15	Persentase Pertumbuhan PDB Sektor Industri Pengolahan Nonmigas				v	7,63	-0,48	3,18	5,02	5,93	7,46	6,85	-2,06	3,36	6,28	89,8		
16	Persentase Kontribusi Sektor Industri Pengolahan Nonmigas				v		30	31	32	33	34		30,69	30,72	30,93		102,3	

Rencana Strategis Perubahan ke-II 2019-2024

NO	INDIKATOR KINERJA	TUJUAN	SASARAN	SPM	IKK/PMD 18/2020/RAK OERT EK	TARGET RENSTRA PERANGKAT DAERAH					REALISASI CAPAIAN				RASIO CAPAIAN		KET
						2019	2020	2021	2022	2023	2024	2019	2020	2021	2022	2019	
1	2	3	4	5	6	7					8				9		10
	Terhadap PDB																
17	Nilai Ekspor Produk Industri Pengolahan Nonmigas (USD Miliar)				V		19	20	21	22	23		18,27	21,30	24,75		96,2
18	Jumlah Tenaga Kerja Sektor Industri Pengolahan Nonmigas (juta orang)				V		3,2	3,2	3,2	3,2	3,2		3,2	3,37 juta	3,28 juta		100,0

Rencana Strategis Perubahan Ke-II 2019-2024

NO	INDIKATOR KINERJA	TUJUAN	SASARAN	SPM	IKK/PMD 18/2020/RAK OERT EK	TARGET RENSTRA PERANGKAT DAERAH					REALISASI CAPAIAN				RASIO CAPAIAN		KET	
						2019	2020	2021	2022	2023	2024	2019	2020	2021	2022	2019		2020
1	2	3	4	5	6	7					8				9		10	
19	Nilai Investasi Sektor Industri Pengolahan Non Migas (Rp. Triliun)				V		69,5	69,6	69,6	69,7	69,7		69,39	23,68 triliun	52,76 triliun		99,8	

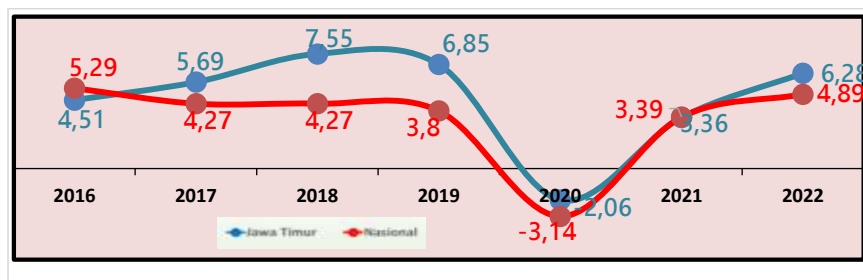


Berdasarkan hasil capaian pelayanan PD sebagaimana tabel diatas, dapat dijelaskan hal-hal sebagai berikut :

2.3.1. Kinerja Industri Jawa Timur

Sektor industri pengolahan merupakan sektor strategis, karena di samping diharapkan mampu menyerap tenaga kerja sangat besar juga memiliki keterkaitan ke depan (*forward linkaged*) dan keterkaitan kebelakang (*backward linkage*) yang relatif banyak. Hasil penghitungan tahun 2022 total nilai PDRB sektor industri pengolahan atas dasar harga berlaku sebesar Rp 835,71 triliun, atau setara dengan 30,60 persen dari total nilai PDRB Jawa Timur. Pertumbuhan sektor ini berkontraksi sebesar 6,28 persen di tahun 2022, sedangkan di nasional berkontraksi sebesar 4,89 persen. Pertumbuhan Kategori Industri Pengolahan mengalami peningkatan seiring dengan beberapa kebijakan terkait pemulihan ekonomi nasional khususnya di sektor industri

Gambar 2.2 Grafik Pertumbuhan Sektor Industri Pengolahan (%)



Sumber : BPS, 2022 (diolah)

Tekait dengan capaian diatas, maka berikut diuraikan gambaran kondisi industri di Jawa Timur baik unit usaha, tenaga kerja, investasi dan nilai produksi.

Jumlah industri di Jawa Timur dalam empat tahun terakhir mengalami pertumbuhan rata-rata sebesar 0,68 persen. Untuk perkembangan Tenaga Kerja dari tahun 2021 sebanyak 3.250.823 orang meningkat sebesar 1,01 persen atau 32.833 orang menjadi 3.283.656 orang di tahun 2022.

Pada perkembangan nilai Produksi untuk total keseluruhan semua skala industri, menunjukkan kinerja yang menggembirakan, yaitu dari tahun 2021 sebesar Rp 220.576 Milyar meningkat sebesar 0,96 persen atau Rp 2.117 Milyar menjadi Rp

222.693 Milyar di tahun 2022. Sedangkan perkembangan nilai investasi untuk total keseluruhan semua skala industri, menunjukkan kinerja yang mengembirakan, yaitu dari tahun 2021 sebesar Rp 69.796 Milyar meningkat sebesar 0,78 persen atau Rp 544 Milyar menjadi 70.340 Milyar di tahun 2022. Selengkapnya terkait jumlah industri dan pertumbuhannya tertera seperti dalam tabel 2.3 berikut:

Tabel 2.3 : Industri di Jawa Timur Tahun 2018-2022

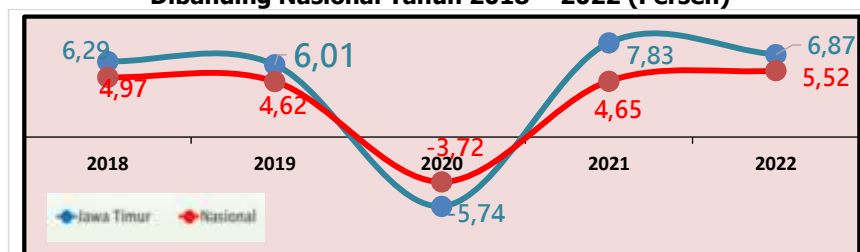
No.	URAIAN	SATUAN	2018	2019	2020	2021	2022
1	Industri Kecil						
a.	- Unit Usaha	Unit	793.280	794.606	795.797	805.558	814.434
b.	- Tenaga Kerja	Org	1.835.827	1.843.038	1.851.516	1.879.662	1.890.072
c.	- Nilai Produksi	Milyar Rp	75.181	75.572	75.715	76.502	76.829
d.	- Nilai Investasi	Milyar Rp	28.457	28.562	28.730	28.896	29.121
2	Industri Menengah						
a.	- Unit Usaha	Unit	22.323	23.094	23.128	23.193	23.670
b.	- Tenaga Kerja	Org	969.696	976.272	980.763	985.078	1.001.187
c.	- Nilai Produksi	Milyar Rp	56.711	57.006	57.280	57.497	58.791
d.	- Nilai Investasi	Milyar Rp	19.358	19.524	19.639	19.752	19.906
3	Industri Besar						
a.	- Unit Usaha	Unit	1.201	1.228	1.231	1.233	1.259
b.	- Tenaga Kerja	Org	381.123	382.632	384.392	386.083	392.397
c.	- Nilai Produksi	Milyar Rp	85.393	85.837	86.249	86.577	87.073
d.	- Nilai Investasi	Milyar Rp	20.757	20.904	21.027	21.148	21.313
4	TOTAL						
a.	- Unit Usaha	Unit	816.804	818.928	820.156	829.984	839.363
b.	- Tenaga Kerja	Org	3.186.646	3.201.942	3.216.671	3.250.823	3.283.656
c.	- Nilai Produksi	Milyar Rp	217.285	218.415	219.244	220.576	222.692
d.	- Nilai Investasi	Milyar Rp	68.572	68.990	69.396	69.796	70.340

Sumber: Dinas Perindag Provinsi Jatim

2.3.2. Kinerja Perdagangan Jawa Timur

Nilai PDRB ADHB sektor perdagangan besar dan eceran; reparasi mobil dan sepeda motor menunjukkan pada tahun 2022 menunjukkan angka Rp. 509,94 trilyun. Berdasarkan data BPS tahun dasar 2010, secara kumulatif nilai PDRB ADHB sektor perdagangan di Jawa Timur pada tahun 2022 memberikan kontribusi sebesar 20,26% terhadap PDB ADHB sektor perdagangan Nasional yang mencapai nilai sebesar Rp. 2.516,6 trilyun pada tahun yang sama seperti diilustrasikan dalam grafik 2.6.

Grafik 2.1 : Laju Pertumbuhan Sub Sektor Perdagangan Jawa Timur Dibanding Nasional Tahun 2018 - 2022 (Persen)



Sumber: BPS Jatim

Neraca Perdagangan Jawa Timur selama tahun 2021 masih mengalami defisit sebesar USD 4,70 miliar. Hal ini disebabkan karena defisit pada sektor migas dan sektor nonmigas masing-masing sebesar USD 4,61 miliar dan USD 93,37 juta. Sedangkan Neraca Perdagangan Jawa Timur pada tahun 2022 juga mengalami defisit sebesar USD 9,17 miliar. Hal ini disebabkan karena defisit pada sektor migas sebesar USD 7,16 miliar dan sektor nonmigas sebesar USD 2,00 miliar. Kondisi ini membuat kedua sektor tersebut perlu peningkatan kinerja agar neraca perdagangan Jawa Timur secara kumulatif berubah menjadi surplus di periode berikutnya. Selain itu perlu diupayakan untuk menekan atau mengurangi defisit dari sektor migas.

Kegiatan impor sangat penting artinya bagi industri di Jawa Timur, karena impor di Jawa Timur masih didominasi oleh Impor Bahan Baku/Penolong untuk produksi industri Jatim. Namun nilai impor tersebut harus diimbangi dengan peningkatan nilai ekspor Jatim agar neraca perdagangan Jatim senantiasa mengalami surplus perdagangan sehingga industri dalam negeri juga mampu bangkit mengembangkan pasar produknya menuju pasar global sehingga produk Jatim memiliki daya saing lebih.

Uraian	2021	2022	y-o-y
Ekspor	22.772,90	23.924,92	5,06
Migas	1.479,36	1.172,80	-20,72
Non Migas	21.293,54	22.752,12	6,85
Impor	27.479,47	33.091,13	20,42
Migas	6.092,56	8.337,10	36,84
Non Migas	21.386,91	24.754,03	15,74

Sumber : BPS Provinsi Jawa Timur

Tabel T-C.24. Anggaran dan Pendanaan Perangkat daerah Disperindag Prov. Jawa Timur

NO	URAIAN PROGRAM	ANGGARAN TAHUN					REALISASI TAHUN							RASIO REALISASI ANGGARAN TAHUN					RATA-RATA PERTUMBUHAN			
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2019	2020	2021	2022	2023	2024	ANGGARAN	REALISASI	
1	2	3					4							5					6			
1	Pelayanan Administrasi Perkantoran	5.647.621.000						5.382.020.841							95,30							
2	Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	7.246.204.400						6.845.990.227							94,48							
3	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Perangkat Daerah	915.966.000						832.972.996							90,94							
4	Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Dokumen Penyelenggaraan Pemerintahan	1.744.704.162						1.626.444.615							93,22							

Rencana Strategis Perubahan Ke-II 2019-2024

NO	URAIAN PROGRAM	ANGGARN TAHUN					REALISASI TAHUN						RASIO REALISASI ANGGARAN TAHUN					RATA-RATA PERTUMBUHAN		
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2019	2020	2021	2022	2023	2024	ANGGARAN
1	2	3					4						5					6		
5	Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan	5.469.904.000					5.276.635.848						96,47							
6	Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri	9.798.607.938					9.347.204.039						95,39							
7	Peningkatan Ekspor dan Pengendalian Impor	4.217.478.000					4.068.878.187						96,48							
8	Pengujian dan Sertifikasi Mutu Barang	10.383.453.750					9.719.621.749						93,61							
9	Peningkatan Kapasitas Teknologi Industri	17.885.422.750					17.181.730.549						96,07							
10	Peningkatan Standarisasi Industri	5.341.417.500					5.138.238.606						96,20							

Rencana Strategis Perubahan Ke-II 2019-2024

NO	URAIAN PROGRAM	ANGGARN TAHUN					REALISASI TAHUN						RASIO REALISASI ANGGARAN TAHUN					RATA-RATA PERTUMBUHAN			
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2019	2020	2021	2022	2023	2024	ANGGARAN	REALISASI
1	2	3					4						5					6			
11	Pengembangan Industri Agro	4.549.800.000						4.256.733.307							93,56						
12	pengembangan industri non agro	2.724.442.000						2.623.252.353							96,29						
13	Penataan Struktur Industri dan Pengembangan Perdagangan	2.725.781.500						2.600.300.796							95,40						
14	Peningkatan Ekspor dan Pengendalian Impor		1.843.532.750						1.835.269.411						99,55						
15	Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri		12.096.630.000						11.460.924.072						94,74						
16	Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan (wilayah kerja		983.245.000						979.336.702						99,60						

Rencana Strategis Perubahan Ke-II 2019-2024

NO	URAIAN PROGRAM	ANGGARAN TAHUN					REALISASI TAHUN						RASIO REALISASI ANGGARAN TAHUN					RATA-RATA PERTUMBUHAN			
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2019	2020	2021	2022	2023	2024	ANGGARAN	REALISASI
1	2	3					4						5					6			
	UPT Perlindungan Konsumen Surabaya)																				
17	Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan (wilayah kerja UPT Perlindungan Konsumen Malang)		795.033.945					789.208.996							99,27						
18	Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan (wilayah kerja UPT Perlindungan Konsumen Jember)		451.628.500					440.173.621							97,46						

Rencana Strategis Perubahan Ke-II 2019-2024

NO	URAIAN PROGRAM	ANGGARN TAHUN					REALISASI TAHUN						RASIO REALISASI ANGGARAN TAHUN					RATA-RATA PERTUMBUHAN			
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2019	2020	2021	2022	2023	2024	ANGGARAN	REALISASI
1	2	3					4						5					6			
19	Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan (wilayah kerja UPT Perlindungan Konsumen Bojonegoro)		763.272.000					759.820.688													
20	Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan (wilayah kerja UPT Perlindungan Konsumen Kediri)		749.272.000					729.692.117													
21	Pengujian dan Sertifikasi Mutu Barang UPT PSMB-LT		1.595.446.750					1.569.283.842													

Rencana Strategis Perubahan Ke-II 2019-2024

NO	URAIAN PROGRAM	ANGGARAN TAHUN					REALISASI TAHUN						RASIO REALISASI ANGGARAN TAHUN					RATA-RATA PERTUMBUHAN		
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2019	2020	2021	2022	2023	2024	ANGGARAN
1	2	3					4						5					6		
	Surabaya																			
22	Pengujian dan Sertifikasi Mutu Barang UPT PSMB-LT Jember		1.619.378.750					1.589.667.944						98,17						
23	Pelayanan Kesekretariatan		10.979.052.362					10.614.105.436						96,68						
24	Pengembangan Industri Agro		897.303.861					886.526.303						98,80						
25	Pengembangan Industri Non Agro		223.500.500					220.864.275						98,82						
26	Pengembangan Industri dan Perdagangan		634.661.750					631.883.220						99,56						
27	Peningkatan Pelayanan Teknis Industri Kayu dan Produk Kayu		1.345.675.750					1.339.715.567						99,56						
28	Peningkatan Pelayanan		2.035.591.750					2.015.230.370						99,00						

Rencana Strategis Perubahan Ke-II 2019-2024

NO	URAIAN PROGRAM	ANGGARAN TAHUN					REALISASI TAHUN						RASIO REALISASI ANGGARAN TAHUN					RATA-RATA PERTUMBUHAN			
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2019	2020	2021	2022	2023	2024	ANGGARAN	REALISASI
1	2	3					4						5					6			
	n Teknis pada UPTI Kulit dan Produk Kulit																				
29	Peningkatan Pelayanan Teknis pada UPTI Logam dan Perekrasan		2.438.523.000					2.393.284.467							98,14						
30	Peningkatan Pelayanan Teknis pada UPTI Makanan dan Kemasan		2.026.950.750					1.989.507.345							98,15						
31	Pembinaan Pelayanan Teknis pada UPTI Aneka Industri dan Kerajinan		2.492.929.624					2.473.443.433							99,22						
32	Pembinaan Standari		1.058.351.250					1.052.730.780							99,47						

Rencana Strategis Perubahan Ke-II 2019-2024

NO	URAIAN PROGRAM	ANGGARN TAHUN					REALISASI TAHUN						RASIO REALISASI ANGGARAN TAHUN					RATA-RATA PERTUMBUHAN			
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2019	2020	2021	2022	2023	2024	ANGGARAN	REALISASI
1	2	3					4						5					6			
	sasi dan Desain Produk Industri pada UPT PMPI dan TK Surabaya																				
33	Pembinaan Standarisasi dan Desain Produk Industri pada UPT PMPI dan TK Malang		786.819.250					777.111.802							98,77						
34	Perizinan Dan Pendaftaran Perusahaan			643.181.000	675.340.000	710.000.000	745.500.000													693.505.250	
35	Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan			388.108.000	407.520.000	428.000.000	449.400.000													418.257.000	
36	Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok			1.878.019.500	197.200.000	20.800.000	21.840.000													529.464.875	

Rencana Strategis Perubahan Ke-II 2019-2024

NO	URAIAN PROGRAM	ANGGARN TAHUN					REALISASI TAHUN						RASIO REALISASI ANGGARAN TAHUN					RATA-RATA PERTUMBUHAN			
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2019	2020	2021	2022	2023	2024	ANGGARAN	REALISASI
1	2	3					4						5					6			
	Dan Barang Penting																				
37	Pengembangan Ekspor			300.000.000	315.000.000	330.000.000	346.500.000														322.875.000
38	Standardisasi Dan Perlindungan Konsumen			8.217.302.000	8.629.000.000	9.060.000.000	9.513.000.000														8.854.825.500
39	Penggunaan Dan Pemasaran Produk Dalam Negeri			12.590.691.500	13.220.000.000	13.890.000.000	14.584.500.000														13.571.297.875
40	Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi			107.742.649.500	113.129.000.000	118.800.000.000	124.740.000.000														116.102.912.375
41	Perencanaan Dan Pembangunan Industri			20.331.637.500	21.350.000.000	22.420.000.000	23.541.000.000														21.910.659.375
42	Pengendalian Izin Usaha Industri			50.000.000	60.000.000	63.000.000	67.000.000														60.000.000
43	Pengelolaan Sistem Informas			100.000.000	110.000.000	120.000.000	125.000.000														113.750.000

Rencana Strategis Perubahan Ke-II 2019-2024

NO	URAIAN PROGRAM	ANGGARN TAHUN					REALISASI TAHUN					RASIO REALISASI ANGGARAN TAHUN					RATA-RATA PERTUMBUHAN				
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2019	2020	2021	2022	2023	2024	ANGGARAN	REALISASI
1	2	3					4					5					6				
	i Industri Nasional																				

BAB III
PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS

3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah

Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Timur adalah unsur pelaksana urusan pemerintahan di bidang Perindustrian dan bidang Perdagangan dimana dalam melaksanakan tugasnya bertanggungjawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah

Tugas dan Fungsi Dinas Perindustrian dan Perdagangan adalah membantu Gubernur melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah provinsi di bidang Perindustrian dan Perdagangan melalui perumusan kebijakan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan serta pengadministrasian di bidang Perindustrian dan Perdagangan.

3.1.1. Pemetaan Permasalahan

Pemetaan permasalahan di bidang Perindustrian dan Perdagangan digambarkan sebagaimana tabel 3.1 berikut :

Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
<i>Bidang Perindustrian</i>		
Belum optimalnya pertumbuhan sektor industri pengolahan	Rendahnya produktivitas Industri	Tingginya ketergantungan pada bahan baku impor
		Belum optimalnya struktur industri (hulu-antara-hilir)
	Belum optimalnya Penerapan sistem informasi dan perumusan kebijakan pengembangan industri dan perdagangan	Belum optimalnya sistem informasi dan data industri dan perdaganga
	Belum optimalnya penerapan standarisasi, desain produk, dan teknologi industri	Produk IKM belum memenuhi standarisasi
Masih rendahnya kualitas, desain dan kemasan produk IKM		
		Lemahnya penerapan teknologi industri pada IKM

Rencana Strategis Perubahan Ke-II 2019-2024

Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
		Sistem informasi pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah belum tersedia
Bidang Perdagangan		
Belum optimalnya pertumbuhan sektor perdagangan	Belum optimalnya neraca perdagangan non-migas luar negeri	Belum optimalnya kinerja peningkatan ekspor non-migas
		Belum optimalnya pengendalian impor
		Belum optimalnya peran dan pemanfaatan hasil kerjasama perdagangan internasional
	Kurang optimalnya pengembangan perdagangan dalam negeri	Tingginya biaya distribusi dan logistik
		Kurangnya promosi dan kerjasama perdagangan antar Swasta dengan Swasta (P to P) maupun Swasta dengan Pemerintah (P to G) serta Pemerintah dengan Pemerintah (G to G)
		Fluktuasi harga barang pokok dan penting
		Tingginya biaya Logistik (antar pulau), dikarenakan keterbatasan konektivitas angkutan laut di wilayah Indonesia
	Belum optimalnya perlindungan konsumen dan tertib niaga	Maraknya produk yang beredar tidak sesuai dengan standar
		Kurangnya pengetahuan masyarakat terkait barang beredar dan tertib niaga
	Belum optimalnya standardisasi mutu barang	Keterbatasan layanan penilaian kesesuaian (mutu barang dan jasa) dan kalibrasi
Belum optimalnya pengembangan mutu tembakau		

3.2. Telaahan Visi, Misi, Janji Potilik dan Program Icon Gubernur

a. Visi Misi dan Program Gubernur terpilih

Sebagaimana diketahui visi Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Timur terpilih periode 2019-2024 adalah: **"Kerja Bersama Untuk Jawa Timur Sejahtera dan Bermartabat dengan Semangat Gotong Royong, Religius, dan Berkeadilan Sosial dengan tata kelola pemerintahan yang Partisipatoris dan Inklusif.**

Visi diatas selanjutnya dijabarkan ke dalam 4 (empat) misi berikut:

1. **Misi 1:** Mewujudkan Keseimbangan Pembangunan Ekonomi, Baik antar Kelompok, antar Sektor Maupun antar Wilayah;
2. **Misi 2:** Terciptanya kesejahteraan yang berkeadilan sosial, dengan memperhatikan kelompok masyarakat yang rentan;
3. **Misi 3:** Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Inovatif, Terbuka, Partisipatoris Memperkuat Demokrasi Kewargaan untuk Menghadirkan Ruang Sosial yang menghargai prinsip Kebhinekaan;
4. **Misi 4:** Melaksanakan Pembangunan Berdasarkan Semangat Gotong Royong, Berwawasan Lingkungan untuk Menjamin Keselarasan Ruang Ekologi, Ruang Sosial, Ruang Ekonomi dan Ruang Budaya;

Sejalan dengan visi misi Gubernur dan Wakil Gubernur diatas, Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Timur mengemban tugas untuk tercapainya misi 1, yakni **"Mewujudkan Keseimbangan Pembangunan Ekonomi, Baik antar Kelompok, antar Sektor Maupun antar Wilayah"**. Tujuan dari misi pertama ini adalah *"Meningkatnya Pertumbuhan dan Pemerataan Ekonomi yang didukung Konektivitas Antar Wilayah"*, dengan indikator *"Pertumbuhan ekonomi dan Indeks Gini"*, yang selanjutnya diturunkan ke dalam 2 (dua) sasaran, yaitu : 1. Meningkatkan Nilai Tambah Produksi, dengan indikator target Persentase Pertumbuhan PDRB Kategori Industri Pengolahan (%)" dan 2. Meningkatkan Nilai Tambah Penyelenggaraan Perdagangan, dengan indikator target Persentase Pertumbuhan PDRB Kategori Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi (%)"

Apabila diuraikan dalam konteks pengembangan perindustrian dan perdagangan, sasaran dan indikator target dari tujuan misi pertama ini dapat dijelaskan dalam beberapa pokok pikiran berikut:

a. Pembangunan industri dan perdagangan yang inklusif.

Pembangunan yang inklusif adalah pembangunan yang tidak hanya bertumpu pada aspek pertumbuhan ekonomi saja, tetapi juga menitikberatkan pada aspek pemerataan dan efektifitas hasil pembangunan terhadap penciptaan lapangan kerja. Aspek pemerataan dan penciptaan lapangan kerja ini diwujudkan dalam prioritas pengembangan industri kecil dan menengah (IKM) dan pengembangan industri berbasis agro. Pengembangan IKM harus menjadi prioritas karena menyerap banyak tenaga kerja dan lebih dari 90 persen industri di Jawa Timur merupakan IKM. Pengembangan industri berbasis agro dimaksudkan agar industrialisasi memberikan dampak positif bagi sektor pertanian.

b. Pembangunan industri dan perdagangan yang mandiri

Pada bidang industri, kemandirian ekonomi diwujudkan dengan mengurangi ketergantungan industri terhadap bahan baku impor. Pada bidang perdagangan, kemandirian tersebut diupayakan melalui penguatan perdagangan dalam negeri melalui peningkatan kerjasama perdagangan dengan provinsi-provinsi lain melalui pembukaan Kantor Perwakilan Dagang (KPD). Sampai tahun 2020, telah dibuka 26 KPD di berbagai provinsi mitra.

c. Pembangunan industri dan perdagangan yang berdaya saing tinggi

Daya saing sektor industri dan perdagangan Jawa Timur harus terus ditingkatkan mengingat sistem ekonomi dunia yang semakin terintegrasi, baik pada tingkat regional maupun internasional. Dengan sistem yang terintegrasi, lalu lintas barang, jasa, dan tenaga kerja antarwilayah semakin tidak dapat dibatasi oleh hambatan-hambatan non-teknis. Keunggulan kompetitif dan komparatif dengan demikian menjadi kunci keberhasilan Jawa Timur dalam integrasi ekonomi global.

d. Janji Politik dan Program Icon Gubernur

Gubernur dan Wakil Gubernur terpilih memiliki janji politik yang akrab disebut dengan Nawa bhakti Satya, yakni 9 (sembilan) pengabdian tulus dan penuh keikhlasan bersama-sama masyarakat untuk membangun Jawa Timur yang sejahtera dan penuh kemuliaan lima tahun ke depan, yaitu : 1.Jatim Sejahtera, 2.Jatim Kerja, 3.Jatim Cerdas & Sehat, 4.Jatim Akses, 5.Jatim Berkah, 6.Jatim Agro, 7.Jatim Berdaya, 8.Jatim Amanah, serta 9.Jatim Harmoni.

Dalam konteks pembangunan sektor industri dan perdagangan Jawa Timur, maka tugas dan fungsi Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Timur terkait erat dengan Bhakti 1: Jatim Sejahtera, yakni mengentaskan kemiskiaann menuju keadilan dan kesejahteraan sosial, Bhakti 2: Jatim Kerja, yaitu memperluas lapangan pekerjaan dan membangun keunggulan ekonomi, Bhakti 6: Jatim Agro, yaitu memajukan sektor pertanian, peternakan, perikanan, kehutanan, perkebunan berbasis kerakyatan, serta Bhakti 7: Jatim Berdaya, yakni ekonomi kerakyatan dengan basis UMKM, Koperasi, MUMDesa dan mendorong Pemberdayaan Pemerintah Desa. Keterkaitan Nawa Bhakti Satya dan Program Icon Gubernur yang menjadi tugas Dinas Perindustrian dan Perdagangan Prov. Jawa Timur diuraikan dalam tabel 3.1 berikut :

Tabel 3.1
Integrasi Nawa Bhakti Satya dan Program Icon di Dinas Perindustrian dan Perdagangan Prov. Jawa Timur

NAWABHAKTI	PROGRAM ICON
Bhakti – 2 : Jatim Kerja. "Memperluas Lapangan Pekerjaan dan Membangun keunggulan Ekonomi"	Millennial Job Center
	Program Vocational
Bhakti – 6 : Jatim Agro. "Memajukan Sektor Pertanian, Peternakan, Perikanan, Kehutanan, perkebunan berbasis Kerakyatan."	Pengembangan Pusat Agropolitan
	Communal Branding
Bhakti – 7 Jatim Berdaya. "Ekonomi Kerakyatan dengan basis UMKM, Koperasi, MUMDesa dan Mendorong Pemberdayaan Pemerintahan Desa."	One Village One Product One Corporate
	One Pesantren One Product
	Perdagangan Antar Pulau

3.3. Telaahan Renstra Kementerian Terkait

Penyusunan Rencana Strategis Organisasi Perangkat Daerah (RENSTRA OPD) selain harus menyesuaikan dengan arah kebijakan daerah dalam RPJMD, juga harus menyesuaikan dengan arah kebijakan nasional yang dituangkan oleh kementerian/lembaga dalam Rencana Strategis Kementerian/Lembaga. Dalam hal ini Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Timur harus menyesuaikan dengan Rencana Strategis Kementerian Perindustrian Republik Indonesia dan Kementerian Perdagangan Republik Indinesia guna melihat arah kebijakan nasional yang diambil dalam bidang urusan perindustrian dan bidang urusan perdagangan.

3.3.1. Renstra Kementerian Perdagangan RI 2020-2024

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, Kementerian Perdagangan wajib mengacu pada visi dari Presiden dan Wakil Presiden. Oleh karena itu, Kementerian Perdagangan menetapkan visi 2020-2024 sebagai berikut : **“Kementerian Perdagangan yang Andal, Profesional, Inovatif, dan Berintegritas untuk Mewujudkan Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong.”** Kementerian Perdagangan memiliki peran yang cukup vital sebagai salah satu penggerak pertumbuhan dan daya saing ekonomi untuk kesejahteraan masyarakat yang tentunya secara langsung membantu Presiden dan Wakil Presiden mewujudkan Indonesia yang berdaulat dan mandiri dalam bidang ekonomi. Hal ini dapat diwujudkan melalui peningkatan kinerja ekspor non-migas, penguatan dan stabilitas perdagangan dalam negeri dan pelaksanaan tata kelola pemerintahan yang baik dan berkualitas.

Guna mendukung terwujudnya visi, Kementerian Perdagangan RI memiliki misi yang sama dengan Presiden dan Wakil Presiden. Misi Presiden dan wakil Presiden terkait langsung dengan tugas dan Fungsi Kementerian Perdagangan adalah sebagai berikut :

1. Peningkatan Kualitas Manusia Indonesia
2. Struktur Ekonomi yang Produktif, Mandiri dan Berdaya Saing
3. Pembangunan yang Merata dan Berkeadilan
4. Mencapai lingkungan hidup yang berkelanjutan
5. Kemajuan Budaya yang Mencerminkan Kepribadian Bangsa
6. Penegakan sistem hukum yang bebas korupsi, bermartabat, dan terpercaya
7. Perlindungan bagi Segenap Bangsa dan Memberikan Rasa Aman pada Seluruh Warga
8. Pengelolaan Pemerintah yang Bersih, Efektif, dan Terpercaya
9. Sinergi pemerintah daerah dalam kerangka Negara Kesatuan

Mengacu pada Misi Presiden dan Wakil Presiden di atas, maka dalam Renstra Kementerian Perdagangan 2020 – 2024, ditetapkan Misi sebagai berikut :

1. Meningkatkan Kinerja Perdagangan Luar Negeri;
2. Meningkatkan Kinerja Perdagangan Dalam Negeri; dan
3. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) di Sektor Perdagangan.

Dalam rangka mewujudkan Visi dan Misi yang tersebut diatas serta memperhatikan potensi, permasalahan dan tantangan yang akan dihadapi; maka Tujuan yang ingin dicapai Kementerian Perdagangan dalam kurun waktu 5 (lima) tahun ke depan, adalah sebagai berikut :

1. Peningkatan kinerja ekspor non-migas dan jasa; untuk menciptakan surplus neraca perdagangan yang ditopang oleh ekspor non-migas bernilai tambah dan jasa sehingga mendukung peningkatan nilai tambah ekonomi dalam memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas dan berkeadilan.

2. Peningkatan konsumsi nasional yang mendukung pertumbuhan ekonomi; melalui stabilisasi harga dan barang kebutuhan pokok, konsumen berdaya dan pelaku usaha bertanggung jawab, peningkatan pasar produk dalam negeri, dan optimalisasi peran Perdagangan Berjangka Komoditi, Sistem Resi Gudang, dan Pasar Lelang Komoditas sehingga mendukung peningkatan nilai tambah ekonomi dalam memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas dan berkeadilan.

3. Terwujudnya tata kelola pemerintahan di Kementerian Perdagangan yang baik dan berkualitas; melalui peningkatan kinerja Kementerian Perdagangan yang bersih, akuntabel dan professional, serta peningkatan kapabilitas Sumber Daya Manusia perdagangan.

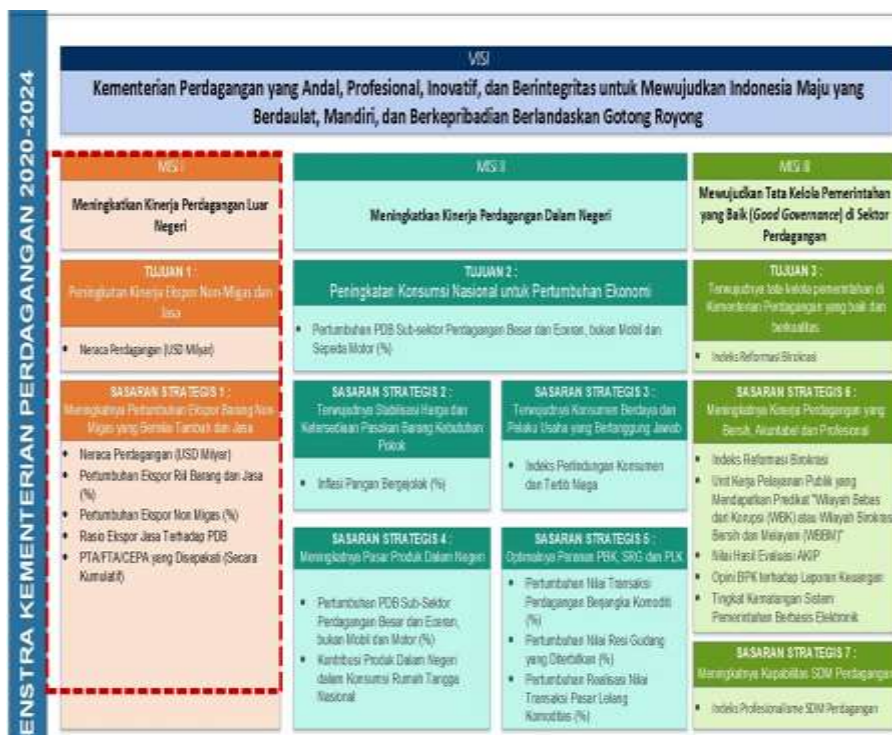
Sasaran strategis merupakan penjabaran dari tujuan yang telah dirumuskan dan merupakan kondisi yang akan dicapai oleh Kementerian Perdagangan selama periode pembangunan tahun 2020 - 2024 dan dapat diukur secara nyata melalui indikator kinerja. Sasaran strategis Kementerian Perdagangan adalah :

1. Meningkatnya Pertumbuhan Ekspor Barang Non-Migas yang Bernilai Tambah dan Jasa;

Rencana Strategis Perubahan Ke-II 2019-2024

2. Terwujudnya stabilisasi harga dan ketersediaan pasokan barang kebutuhan pokok;
3. Terwujudnya konsumen berdaya dan pelaku usaha yang bertanggung jawab;
4. Meningkatnya pasar produk dalam negeri;
5. Optimalnya peranan PBK, SRG dan PLK;
6. Meningkatnya kinerja perdagangan yang bersih, akuntabel dan professional;
7. Meningkatnya kapabilitas SDM Perdagangan.

Gambar 3.1 Kerangka Tujuan – Sasaran Strategis Kementerian Perdagangan 2020-2024



3.3.2. Renstra Kementerian Perindustrian RI 2020-2024

Salah satu prioritas nasional pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional yang terkait dengan pembangunan sektor industri nasional adalah

memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas dan meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing. Kementerian Perindustrian sebagai menteri yang membantu Presiden di bidang perindustrian, maka visi Kementerian Perindustrian Tahun 2020-2024 ditetapkan sama dengan visi misi Presiden yaitu **“Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berdasarkan Gotong Royong”**. Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong apabila dipandang dalam sudut pandang sektor industri yaitu mewujudkan industri tangguh dengan mengandalkan kemampuan dan kekuatan sendiri dalam mengelola sumber daya yang ada dengan peningkatan nilai tambah, penyerapan tenaga kerja melalui penambahan lapangan kerja baru serta meningkatnya investasi dan ekspor sektor industri sehingga dapat bersaing dengan negara maju lainnya. Pemanfaatan teknologi dimaksudkan dapat mengelola sumber daya yang ada dengan kekuatan SDM yang kompeten dan IPTEK yang inovatif melalui implementasi Making Indonesia 4.0 untuk mencapai kesejahteraan masyarakat yang adil dan merata.

Mengacu visi Presiden dan Wakil Presiden diatas berusaha untuk dicapai melalui 9 (sembilan) misi yang telah dimandatkan melalui Peraturan Presiden nomor 18 tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024, maka 9 (sembilan) Misi Presiden dan Wakil Presiden yang juga merupakan Misi Kementerian Perindustrian yaitu:

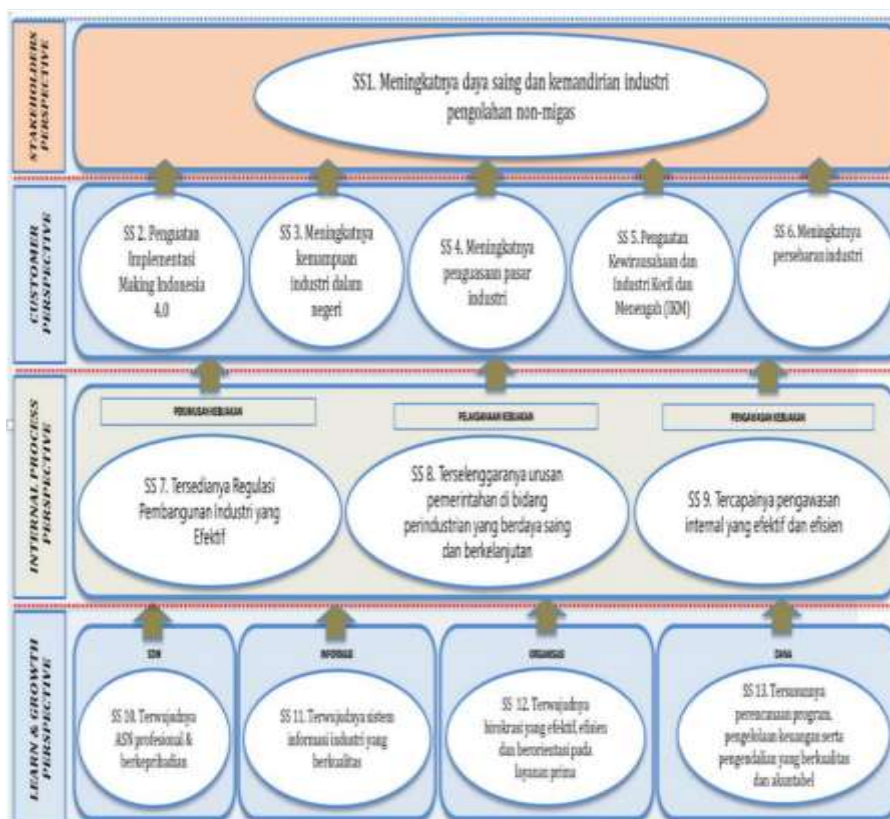
1. Peningkatan kualitas manusia indonesia;
2. Struktur ekonomi yang produktif, mandiri, dan berdaya saing;
3. Pembangunan yang merata dan berkeadilan;
4. Mencapai lingkungan hidup yang berkelanjutan;
5. Kemajuan budaya yang mencerminkan kepribadian bangsa;
6. Penegakan sistem hukum yang bebas korupsi, bermartabat, dan terpercaya;
7. Perlindungan bagi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh warga;
8. Pengelolaan pemerintahan yang bersih, efektif, dan terpercaya; dan
9. Sinergi pemerintah daerah dalam kerangka negara kesatuan.

Rencana Strategis Perubahan Ke-II 2019-2024

Untuk mewujudkan Visi dan melaksanakan Misi pembangunan industri, Kementerian Perindustrian menetapkan tujuan pembangunan industri 5 (lima) tahun ke depan yaitu **"Meningkatnya Peran Sektor Industri dalam Perekonomian Nasional"**.

Pada peta strategi Kementerian Perindustrian dapat digambarkan beberapa sasaran strategis yang ingin dicapai selama 5 tahun ke depan. Sasaran strategis tersebut dicapai melalui indikator kinerja program (indikator kinerja pada unit organisasi setingkat Eselon I) dan indikator kinerja kegiatan (indikator kinerja pada unit organisasi setingkat Eselon II, unit pelaksana teknis, dan unit pendidikan). Peta strategi Kementerian Perindustrian dapat di lihat pada gambar berikut :

Gambar 3.2 Peta Sasaran Strategis Kementerian Perindustrian Tahun 2020-2024



3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Timur dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

3.4.1. Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Timur

Commented [r1]: cek

Penataan Ruang Wilayah Provinsi bertujuan untuk mewujudkan ruang wilayah provinsi yang berdaya saing tinggi dan berkelanjutan melalui pengembangan sistem agropolitan dan sistem metropolitan.

Fungsi Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Timur sebagai pedoman :

- a. Penyusunan rencana pembangunan jangka panjang daerah;
- b. Penyusunan rencana pembangunan jangka menengah daerah;
- c. Pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah provinsi;
- d. Perwujudan keterpaduan, keterkaitan, dan keseimbangan perkembangan antarwilayah kabupaten/kota, serta keserasian antarsektor;
- e. Penetapan lokasi dan fungsi ruang untuk investasi;
- f. Penataan ruang kawasan strategis provinsi; dan
- g. Penataan ruang wilayah kabupaten/kota.

Sesuai dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 5 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Tahun 2011-2031 yang berkaitan dengan pembangunan industri menyebutkan Kawasan peruntukan industri direncanakan dengan luas sekurang-kurangnya 69.288,52 Ha meliputi : kawasan industri, kawasan peruntukan industri di luar kawasan industri dan sentra industri.

Agar pembangunan industri selaras dengan kelestarian lingkungan hidup, dalam Perda RTRW indikasi arahan zonasi peruntukan industri adalah sebagai berikut:

1. Pengembangan kawasan industri harus dilengkapi dengan jalur hijau (*greenbelt*) sebagai penyangga antar fungsi kawasan, dan sarana pengolahan limbah;
2. Pengembangan zona industri yang terletak pada sepanjang jalan arteri atau kolektor harus dilengkapi dengan *frontage road* untuk kelancaran aksesibilitas;
3. Kegiatan industri harus dilengkapi dengan instalasi pengolahan limbah;
4. Pengembangan zona industri harus dilengkapi dengan upaya pengelolaan lingkungan, sistem pengelolaan limbah dan upaya pemantauan lingkungan serta dilakukan studi AMDAL; dan

5. Pengembangan sentra industri menjadi bagian dari kawasan permukiman serta harus memperhatikan upaya pelestarian lingkungan hidup dan tidak boleh mengganggu kegiatan permukiman

Strategi pengembangan kawasan peruntukan industri dilakukan dengan mengembangkan industri berdasarkan potensi sumber daya, jaringan infrastruktur, dan pasar melalui:

- a. Pengembangan kawasan peruntukan industri yang memperhatikan keseimbangan antara pertumbuhan wilayah, pemerataan, dan keberlanjutan;
- b. Pengidentifikasian potensi pengembangan industri;
- c. Pengembangan industri melalui penyediaan ruang dan didukung pengembangan infrastruktur wilayah;
- d. Pengembangan industri berteknologi tinggi dan ramah lingkungan di kawasan perkotaan;
- e. Pengembangan industri kecil, menengah, dan rumah tangga;
- f. Pengembangan perindustrian berdasarkan prinsip keterkaitan antara kegiatan hulu-hilir, klaster, dan sentra; dan
- g. Pengembangan sarana dan prasarana pendukung industri.

3.4.2. Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Dalam Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) Provinsi Jawa Timur Tahun 2014-2019, Berdasarkan daftar panjang isu pembangunan berkelanjutan diatas, kemudian didapatkan daftar pendek isu pembangunan berkelanjutan. Daftar pendek isu pembangunan berkelanjutan merupakan hasil pengelompokan berdasarkan kesamaan makna. terdapat 4 (Empat) aspek isu pembangunan berkelanjutan, yaitu: (1) lingkungan; (2) ekonomi; (3) sosial; (4) hukum dan tata kelola.

Di antara keempat isu pembangunan berkelanjutan di atas, beberapa di antaranya terkait dengan sektor industri dan perdagangan, yaitu:

- 1) *Masih tingginya kebutuhan pengembangan wilayah dan infrastruktur sebagai pendukung pertumbuhan perekonomian wilayah dan mengurangi disparitas antar wilayah Belum optimalnya daya saing infrastruktur*

Kondisi Infrastruktur di Provinsi Jawa Timur pada saat ini patut diwaspadai, khususnya pada kondisi jaringan jalan yang mana jalan dengan kondisi baik ada pada 20% dari total panjang jalan yang ada, sedangkan untuk kondisi jembatan 94% sudah dalam kondisi baik, dan kondisi jaringan drainase 74% baik.

Perubahan kondisi infrastruktur secara umum memberikan dampak terhadap semua penduduk Provinsi Jawa Timur, karena infrastruktur merupakan barang publik murni dengan sifat *non-excludable* (tanpa ada larangan) dan *non-rivalry* (tanpa persaingan) dimana semua masyarakat memiliki hak yang sama dalam pemanfaatannya. Namun, secara khusus perubahan kondisi infrastruktur akan sangat berdampak kepada pihak-pihak yang bergerak pada sektor perekonomian seperti berikut:

- Investor penanam modal.
- Pelaku industri (besar, menengah, dan kecil).
- Pelaku industri pariwisata

2) Masih rendahnya daya saing UMKM, industri rumah tangga, dan industri kreatif lokal dalam inovasi produk, kualitas, serta pemasaran di tingkat nasional maupun internasional Penurunan kualitas dan kuantitas sumber daya alam

Program pembangunan sektor industri dan perdagangan di Jawa Timur berpotensi dalam mendukung peningkatan daya saing UMKM dengan memberikan fasilitasi serta pelatihan atau sosialisasi, namun juga pemberian akses permodalan melalui program-program pembiayaan seperti dana bergulir dan loan agreement, dan fasilitasi sampai IKM mendapatkan sertifikasi ISO, SNI, dan berbagai bentuk standar lainnya. Upaya-upaya pembinaan terhadap Industri Kecil Menengah (IKM) harus terus selalu dilakukan dan ditingkatkan.

Di samping fokus pada pembinaan IKM, strategi pengurangan kemiskinan dan pengangguran juga dilakukan dengan hilirisasi industri berbasis produk pertanian, yang di dalamnya juga termasuk produk perkebunan, peternakan, dan perikanan. Kemiskinan seringkali terkait dengan rendahnya nilai tambah produk ketiga sektor ini. Wilayah-wilayah pertanian secara ekonomi jauh tertinggal dengan wilayah-wilayah industri dan perdagangan karena rendahnya nilai tambah sektor pertanian. Oleh karena itu, Pemerintah Provinsi Jawa Timur mendorong hilirisasi industri berbasis produk pertanian melalui strategi pengembangan industri primer yang

mendekatkan antara off farm dan on farm terutama di kawasan agropolitan dan minapolitan. Strategi ini diimplementasikan ke dalam beberapa program pembinaan antara lain peningkatan teknologi IKM agro melalui pelatihan, fasilitasi penerapan manajemen produksi dan standardisasi mutu produk, fasilitasi permodalan melalui Bank UMKM, Bank Jatim, dan Jamkrida, diversifikasi produk pertanian, peningkatan desain dan kemasan produk pangan, serta penguatan kelembagaan. Selain itu, aspek niaga dan pemasaran hasil pertanian juga menjadi perhatian pemerintah. Promosi produk agro industri juga difasilitasi melalui promosi pada berbagai even pameran.

3) *Penurunan tingkat kemandirian ekonomi masyarakat sebagai dampak pandemi COVID 19, termasuk peningkatan angka kemiskinan dan pengangguran*

Kegiatan pembangunan industri dan perdagangan selama lima tahun ke depan diharapkan mampu meningkatkan tingkat kemandirian ekonomi masyarakat, mengurangi pengangguran, dan menurunkan tingkat kemiskinan.

Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah dan program-program lain di bidang perindustrian merupakan program prioritas yang perlu mendapat perhatian khusus terkait isu pembangunan berkelanjutan. Beberapa rekomendasi pelaksanaan program tersebut disajikan pada Tabel 3.4 berikut:

Tabel 3.4.
Pengaruh Program Prioritas dan Rekomendasi Mitigasi/Adaptasi

Pengaruh Program	Rumusan Mitigasi/Adaptasi dan/atau Alternatif		Rekomendasi
	Mitigasi/Adaptasi	Alternatif	
<ul style="list-style-type: none"> • Pengembangan program industri tanpa analisa ruang yang tepat dan efektif akan semakin memacu laju alih fungsi lahan. • Meningkatkan penyusutan luas lahan pertanian dan hutan/alih fungsi lahan • Meningkatkan konsumsi energi 	<ul style="list-style-type: none"> • Mengembangkan teknologi industri yang ramah lingkungan • Mengembangkan sistem pengelolaan lingkungan secara mandiri untuk meminimalisir dampak limbah • Mengembangkan kawasan industri yang ramah lingkungan 	<ul style="list-style-type: none"> • Pengembangan Industri kecil menengah berbasis sumberdaya alam lokal • Mengembangkan industri pada kawasan non hutan/pertanian • Pengembangan industri dengan konsep industri bersih 	<ul style="list-style-type: none"> • Pengembangan industri kecil dan menengah berbasis sumberdaya alam seperti model pengembangan agribisnis. • Pengembangan sentra industri dengan memperhatikan ekosistem lingkungan • Pemberian rekomendasi kepada Pemerintah Kabupaten terkait penetapan lahan pertanian berkelanjutan

Pengaruh Program	Rumusan Mitigasi/Adaptasi dan/atau Alternatif		Rekomendasi
	Mitigasi/Adaptasi	Alternatif	
<ul style="list-style-type: none"> • Meningkatkan konsumsi air baku • Mengganggu keseimbangan ekosistem • Merusak habitat satwa • Meningkatkan pencemaran lingkungan akibat limbah industri • Mengurangi jumlah tenaga kerja potensial di bidang pertanian • Peningkatan produksi GRK 	<ul style="list-style-type: none"> • Perlu ditambahkan regulasi <i>law enforcement</i> regulasi • Penerapan konsep <i>polluters pay</i> bagi pengusaha industri • Perlu penetapan insentif dan disinsentif bagi pelaku industri 		<p>dan kawasan lindung (rehabilitasi dan konservasi hutan) dengan perundang-undangan yang mengikat</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pengembangan teknologi industri yang ramah lingkungan • Pengembangan sistem pengelolaan lingkungan secara mandiri untuk meminimalisir dampak limbah • Pengembangan kawasan industri yang ramah lingkungan • Pengembangan industri pada kawasan non hutan/pertanian • Pengembangan industri dengan konsep industri bersih • Penerapan konsep <i>polluters pay</i> bagi pengusaha industri serta penetapan insentif dan disinsentif bagi pelaku industri

3.5. Penentuan Isu-Isu Strategis

Penentuan isu-isu strategis Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Timur Tahun 2019-2024, didasarkan pada faktor-faktor pelayanan yang mempengaruhi permasalahan ditinjau dari:

- Gambaran pelayanan Perangkat Daerah;
- Telaah sasaran jangka menengah pada Renstra Kementerian Perindustrian, Renstra Kementerian Perdagangan;
- Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis.

Rencana Strategis Perubahan Ke-II 2019-2024

Dengan demikian, isu strategis Renstra Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Timur Tahun 2019-2024, adalah :

1. Peningkatan daya saing industri melalui penguatan struktur industri (hulu-antara-hilir), optimalisasi peneparan teknologi industri, standarisasi industri, peningkatan kualitas dan desain produk industri, penguatan sistem informasi dan data industri, serta percepatan substitusi impor untuk mengurangi ketergantungan terhadap bahan baku impor;
2. Peningkatan neraca perdagangan non-migas luar negeri, melalui optimalisasi pemanfaatan peran kerjasama perdagangan internasional, pengendalian impor, serta peningkatan kinerja ekspor non-migas;
3. Peningkatan pengembangan perdagangan dalam negeri, melalui peningkatan promosi dan kerjasama perdagangan swasta dan swasta, swasta dengan pemerintah, maupun pemerintah dengan pemerintah, pengendalian fluktuasi atau gejolak harga-harga barang kebutuhan pokok, serta men
4. Pengoptimalan perlindungan konsumen melalui peningkatan pengawasan barang beredar serta peningkatan edukasi bagi masyarakat berkaitan dengan barang beredar dan tertib niaga;
5. Optimalisasi standarisasi mutu barang, melalui peningkatan layanan penilaian kesesuaian (mutu barang dan jasa) dan kalibrasi serta peningkatan pengembangan mutu tembakau.

BAB IV

TUJUAN DAN SASARAN

4.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah

Misi ke-1 Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Timur periode 2019-2024 adalah "Mewujudkan Keseimbangan Pembangunan Ekonomi, Baik antar Kelompok, antar Sektor Maupun antar Wilayah". Misi pertama ini memuat tujuan "*Meningkatnya Pertumbuhan dan Pemerataan Ekonomi yang didukung Konektivitas Antar Wilayah*", yang diukur dengan indikator "Pertumbuhan ekonomi dan Indeks Gini". Sasaran dari indikator tujuan ini adalah :

1. Meningkatnya Nilai Tambah Produksi, dengan indikator target "Persentase Pertumbuhan PDRB Kategori Industri Pengolahan (%)"
2. Meningkatnya Nilai Tambah Penyelenggaraan Perdagangan, dengan indikator target "Persentase Pertumbuhan PDRB Kategori Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi (%)"

Sejalan dengan misi, tujuan dan sasaran RPJMD 2019-2024 diatas, maka cita-cita yang menjadi tujuan dan sasaran Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Jawa Timur lima tahun ke depan (2019-2024) adalah sebagaimana diuraikan dalam Tabel 4.1 berikut :



TABEL 4.1 TUJUAN DAN SASARAN JANGKA MENENGAH PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN	SATUAN	KINERJA TUJUAN/SASARAN									
					2019		2020		2021		2022		TARGET	
					TARGET	REALISASI	TARGET	REALISASI	TARGET	REALISASI	TARGET	REALISASI	2023	2024
1	Meningkatnya Nilai Tambah Produksi		Persentase Pertumbuhan PDRB Kategori Industri Pengolahan	%	7,63	6,85	-0,48	-2,06						
		Meningkatnya PDRB sektor industri pengolahan	Nilai PDRB industri pengolahan	(Triliun Rp)	650,22	711,3	497,83	705,79						
2	Meningkatnya Nilai Tambah Penyelenggaraan Perdagangan		Persentase Pertumbuhan PDRB Kategori Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi	%	6,34	6,1	-5,72	-5,74						
		Meningkatnya net-ekspor perdagangan luar negeri	Persentase pertumbuhan net ekspor non migas	%	2	127,11	2	-26,4						
		Meningkatnya net-ekspor perdagangan dalam negeri	Persentase pertumbuhan net ekspor antar daerah	%	5	-4,47	6	235,95						
		Meningkatnya perlindungan konsumen dan pengamanan perdagangan	Persentase peningkatan barang yang diawasi dan sertifikasi barang beredar	%	2	3,1	1	-53,86						
		Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah	Nilai sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah		86	90	86,2	90,24						

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN	SATUAN	KINERJA TUJUAN/SASARAN									
					2019		2020		2021		2022		TARGET	
					TARGET	REALISASI	TARGET	REALISASI	TARGET	REALISASI	TARGET	REALISASI	2023	2024
1	Meningkatnya Nilai Tambah Produksi		Persentase Pertumbuhan PDRB Kategori Industri Pengolahan	%					3,18	3,36	5,02	6,28	5,93	7,46
		Meningkatnya PDRB sektor industri pengolahan	Nilai PDRB industri pengolahan	(Triliun Rp)					700	753,99	725	836,7	750	775
2	Meningkatnya Nilai Tambah Penyelenggaraan Perdagangan		Persentase Pertumbuhan PDRB Kategori Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi	%					0,14	7,83	3,08	6,87	4,69	7,18
		Meningkatnya PDRB sektor Perdagangan	Nilai PDRB Perdagangan	(Triliun Rp)					0,14	452,71	3,08	509,9	352,7	376,02
		Meningkatnya perlindungan konsumen dan pengamanan perdagangan	Persentase peningkatan barang yang diawasi dan sertifikasi barang beredar	%					1	5,3	1	107,7	1	1
		Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah	Nilai sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah						86,4	90,50	86,6	90,70	86,8	87

BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Berdasarkan permasalahan serta isu strategis yang dihadapi Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Timur yang kemungkinan akan menentukan kinerja pelayanan perangkat daerah dalam penyelenggaraan urusan Perindustrian dan Perdagangan, serta dengan mempedomani prioritas nasional Kementerian Perindustrian dan Kementerian Perdagangan, maka dirumuskan Strategi dan Arah Kebijakan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Timur lima tahun (2019-2024) ke depan sebagai berikut :

Tabel 5.1
Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan

Visi: <i>Terwujudnya Masyarakat Jawa Timur yang Adil, Sejahtera, Unggul, dan Berakhlak dengan Tata Kelola Pemerintahan yang Partisipatoris Inklusif melalui Kerja Bersama dan Semangat Gotong Royong</i>			
Misi 1: Mewujudkan Keseimbangan Pembangunan Ekonomi, Baik antar Kelompok, antar Sektor Maupun antar Wilayah			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
1. Meningkatkan Nilai Tambah Produksi	1.1. Meningkatnya PDRB sektor industri pengolahan	1. Peningkatan Pembangunan Sumber Daya Industri	1. Meningkatkan produktivitas industri agro Jawa Timur
		2. Peningkatan Pemberdayaan Industri	2. Meningkatkan produktivitas industri non-agro Jawa Timur
		3. Peningkatan Sarana Prasarana, Pengawasan dan Pengendalian Industri	3. Optimalisasi struktur industri dan perdagangan

Visi: <i>Terwujudnya Masyarakat Jawa Timur yang Adil, Sejahtera, Unggul, dan Berakhlak dengan Tata Kelola Pemerintahan yang Partisipatoris Inklusif melalui Kerja Bersama dan Semangat Gotong Royong</i>			
Misi 1: Mewujudkan Keseimbangan Pembangunan Ekonomi, Baik antar Kelompok, antar Sektor Maupun antar Wilayah			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
		4. Peningkatan teknologi industri dan standarisasi	4. Meningkatkan teknologi industri dan standarisasi di Jawa timur
2. Meningkatnya Nilai Tambah Penyelenggaraan Perdagangan	2.1. Meningkatnya PDRB sektor perdagangan	1. Peningkatan Ekspor dan Pengendalian Impor	1. Meningkatkan Ekspor dan Pengendalian Impor
		2. Peningkatan efisiensi perdagangan dalam negeri	2. Meningkatkan efisiensi perdagangan dalam negeri
		3. Peningkatan pengawasan barang beredar, jasa dan tertib niaga	3. Meningkatkan pengawasan barang beredar, jasa dan tertib niaga
	2.2. Meningkatnya Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan	1. Peningkatan pelayanan dibidang penilaian kesesuaian (mutu barang dan jasa) dan kalibrasi	1. Meningkatkan layanan penilaian kesesuaian (mutu barang dan jasa) dan kalibrasi Jawa Timur

BAB. VI

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Tabel 6.1 Program dan kegiatan tahun 2019

TUJUAN	SASARAN	KODE					PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN/SASARAN/PROGRAM/KEGIATAN	SATUAN	2019				UNIT KERJA PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	LOKASI
										KINERJA		ANGGARAN			
										TARGET	REALISASI	TARGET	REALISASI		
	Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah						Nilai sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah		86		90				
		2	07	0100	01		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Indeks kepuasan masyarakat/aparatur terhadap pelayanan adm perkantoran dan kenyamanan kantor	100	5.647.621.000	95	5.380.690.341	Sekretariat		
		2	07	0100	01	019	Pelaksanaan Administrasi Perkantoran	Persentase pegawai yang puas terhadap pelayanan perkantoran	95	5.647.621.000	98	5.380.690.341	Sekretariat		
		2	07	0100	02		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Prosentase sarana dan prasarana aparatur yang layak fungsi	100	7.246.204.400	100	6.809.921.083	Sekretariat		
		2	07	0100	02	012	Penyediaan Peralatan dan Kelengkapan Sarana dan Prasarana	Jumlah peralatan dan perlengkapan sarana yang tersedia (paket)	20	4.113.478.000	20	3.936.055.835	Sekretariat		
		2	07	0100	02	031	Pemeliharaan Peralatan dan Kelengkapan Sarana dan Prasarana	Jumlah peralatan dan perlengkapan sarana yang terpelihara (paket)	20	3.132.726.400	20	2.873.865.248	Sekretariat		
		2	07	0100	07		Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Perangkat Daerah	Prosentase kelembagaan yang tepat fungsi	100	915.966.000	100	831.890.496	Sekretariat		

Rencana Strategis Perubahan Ke-II 2019-2024

TUJUAN	SASARAN	KODE					PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN/SASARAN/PROGRAM/KEGIATAN	SATUAN	2019				UNIT KERJA PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	LOKASI
										KINERJA		ANGGARAN			
										TARGET	REALISASI	TARGET	REALISASI		
		2	07	0100	07	002	Pembinaan Sumber Daya Aparatur Perangkat Daerah	Jumlah pegawai yang mengikuti pendidikan/pelatihan formal		25	915.966.000	25	831.890.496	Sekretariat	
		2	07	0100	08		Program Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Dokumen Penyelenggaraan Pemerintahan	persentase dokumen penyelenggaraan pemerintahan yang disusun tepat waktu		100	1.744.704.162	95	1.625.694.615	Sekretariat	
		2	07	0100	08	001	Penyusunan Dokumen Perencanaan	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah yang tersusun (dokumen)		5	655.625.000	5	610.173.444	Sekretariat	
		2	07	0100	08	002	Penyusunan Laporan Hasil Pelaksanaan Rencana Program dan Anggaran	Jumlah dokumen Pelaporan yang tersusun (dokumen)		6	594.889.162	6	543.446.771	Sekretariat	
		2	07	0100	08	003	Penyusunan, Pengembangan, Pemeliharaan dan Pelaksanaan Sistem Informasi Data	Jumlah update database perangkat daerah (paket)		3	313.500.000	3	299.018.600	Sekretariat	
		2	07	0100	08	004	Penyusunan Laporan Pengelolaan Keuangan	Jumlah dokumen laporan pengelolaan keuangan yang tersusun ; Jumlah dokumen laporan pengelolaan keuangan yang tersusun		1	180.690.000	1	173.055.800	Sekretariat	
Meningkatnya Nilai Tambah Produksi								Persentase Pertumbuhan PDRB Kategori Industri Pengolahan		8		7			
	Meningkatnya PDRB sektor industri pengolahan							Nilai PDRB industri pengolahan		650		711			
		2	07	0100	31	019	Revitalisasi Unit Pelaksana Teknis	Terlaksananya pembangunan fisik, peningkatan peralatan pelayanan dan profil UPT (paket)		10	2.421.350.000	10	2.377.482.170	Sekretariat	Jawa timur
		2	07	0100	31	020	Pelayanan Administrasi Perkantoran pada	Persentase pelaksanaan administrasi perkantoran UPT Aneka Industri dan Kerajinan (%)		82	2.581.624.400	82	2.375.569.774	UPT Aneka Kerajinan	Surabaya

Rencana Strategis Perubahan ke-II 2019-2024

TUJUAN	SASARAN	KODE					PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN/SASARAN/PROGRAM/KEGIATAN	SATUAN	2019				UNIT KERJA PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	LOKASI
										KINERJA		ANGGARAN			
										TARGET	REALISASI	TARGET	REALISASI		
						UPT Aneka Industri dan Kerajinan									
		2	07	0100	31	021	Pelayanan Teknis pada UPT Aneka Industri dan Kerajinan	Jumlah jasa pelayanan UPT Aneka Industri dan Kerajinan (jasa)		780	204.945.000	725	202.524.182	UPT Aneka Kerjainan	Surabaya, Sidoarjo, Malang, Lamongan
		2	07	0100	31	022	Pembinaan industri pada UPT Aneka Industri dan Kerajinan	Jumlah industri yang mendapatkan pembinaan (pelaku industri)		35	176.845.600	35	175.048.200	UPT Aneka Kerjainan	Surabaya, Sidoarjo, Malang, Lamongan
		2	07	0100	31	023	Pelayanan Administrasi Perkantoran pada UPTI Kayu dan Produk Kayu	Persentase pelaksanaan administrasi perkantoran UPTI Kayu Pasuruan (%)		82	1.877.942.500	82	1.832.028.439	UPT Industri Kayu	Kota Pasuruan
		2	07	0100	31	024	Pelayanan Teknis pada UPTI Kayu dan Produk Kayu	Jumlah jasa pelayanan UPTI Kayu Pasuruan (jasa)		780	381.550.000	2.026	374.705.082	UPT Industri Kayu	Kota Pasuruan
		2	07	0100	31	026	Pelayanan Administrasi Perkantoran pada UPTI Kulit dan Produk Kulit	Persentase pelaksanaan administrasi perkantoran UPTI Kulit Magetan (%)		92	2.392.457.000	95	2.311.397.783	UPT Industri Kulit	Kab. Magetan
		2	07	0100	31	027	Pelayanan Teknis pada UPTI Kulit dan Produk Kulit	Jumlah jasa pelayanan UPTI Kulit Magetan (jasa)		1.190	257.300.000	1.515	248.769.000	UPT Industri Kulit	Kab. Magetan
		2	07	0100	31	029	Pelayanan Administrasi Perkantoran pada UPTI Logam dan Perekayasaan	Persentase Pelaksanaan Administrasi Perkantoran UPTI Logam dan Perekayasaan Sidoarjo (%)		82	2.772.130.500	82	2.661.734.002	UPT Industri Logam	Kab. Sidoarjo
		2	07	0100	31	030	Pelayanan Teknis pada UPTI Logam dan Perekayasaan	Jumlah Jasa Pelayanan UPTI Logam dan Perekayasaan Sidoarjo (jasa)		416	474.850.000	1.074	466.432.194	UPT Industri Logam	Kab. Sidoarjo
		2	07	0100	31	032	Pelayanan Administrasi Perkantoran pada UPTI Makanan,	Persentase pelaksanaan administrasi perkantoran UPTI Mamin dan Kemasan (%)		82	2.406.688.750	82	2.287.904.144	UPT Mamin dan Kemasan	Kab. Sidoarjo

Rencana Strategis Perubahan Ke-II 2019-2024

TUJUAN	SASARAN	KODE					PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN/SASARAN/PROGRAM/KEGIATAN	SATUAN	2019				UNIT KERJA PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	LOKASI
										KINERJA		ANGGARAN			
										TARGET	REALISASI	TARGET	REALISASI		
						Minuman, dan Kemasan									
		2	07	0100	31	0303	Pelayanan Teknis pada UPTI Makanan, Minuman, dan Kemasan	Jumlah jasa pelayanan UPTI Mamin dan Kemasan (jasa)		870	246.160.000	726	230.898.122	UPT Mamin dan Kemasan	Kab. Sidoarjo
		2	07	0100	31	0304	Pembinaan industri pada UPTI Makanan, Minuman, dan Kemasan	Jumlah industri yang mendapatkan pembinaan (pelaku industri)		140	225.780.000	160	215.078.385	mamin	Kab. Sidoarjo
		2	07	0100	31	0305	Pembinaan dan Pelatihan Keterampilan Kerja Bagi IKM Pada UPTI Kayu dan Produk Kayu	Jumlah industri yang mendapatkan pembinaan (pelaku industri)		125	493.636.000	125	489.616.514	kayu	Kota Pasuruan
		2	07	0100	31	0306	Pembinaan dan Pelatihan Keterampilan Kerja Bagi IKM Pada UPTI Kulit dan Produk Kulit	Jumlah industri yang mendapatkan pembinaan (pelaku industri)		180	428.125.000	160	416.772.150	kulit	Kab. Magetan, Kab. Ponorogo
		2	07	0100	31	0307	Pembinaan dan Pelatihan Keterampilan Kerja Bagi IKM Pada UPTI Logam dan Perakayasaan	Jumlah industri yang mendapatkan pembinaan (pelaku industri)		240	544.038.000	319	515.036.508	logam	cab. Sidoarjo, Kab. Pasuruan, Kab. Lumajang
		2	07	0100	33		Program Peningkatan Standarisasi Industri	Persentase IKM yang telah menerapkan standarisasi dan HKI(%)		8	5.341.417.500	6	5.137.966.106		
		2	07	0100	33	021	Pelayanan Administrasi Perkantoran pada UPT Pengembangan Mutu Produk Industri dan Teknologi Kreatif Surabaya	Persentase pelaksanaan administrasi perkantoran PMPI dan TK Surabaya		82	898.947.500	82	866.773.222	UPT PMPI & TK Surabaya	Kota Surabaya

Rencana Strategis Perubahan ke-II 2019-2024

TUJUAN	SASARAN	KODE					PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN/SASARAN/PROGRAM/KEGIATAN	SATUAN	2019				UNIT KERJA PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	LOKASI
										KINERJA		ANGGARAN			
										TARGET	REALISASI	TARGET	REALISASI		
		2	07	0100	33	024	Pelayanan Administrasi Perkantoran pada UPT Pengembangan Mutu Produk Industri dan Teknologi Kreatif Malang	Persentase pelaksanaan administrasi perkantoran PMPI dan TK Malang		82	888.350.000	82	857.465.179	UPT PMPI & TK Malang	Kota Malang
		2	07	0100	33	027	Pembinaan dan Pelatihan Mutu Produk Industri & Fasilitas Hak Kekayaan Intelektual pada UPT Pengembangan Mutu Produk Industri dan Teknologi Kreatif Surabaya	Jumlah Industri yang mendapatkan fasilitas (pelaku industri)		600	1.312.050.000	684	1.305.812.447	UPT PMPI & TK Surabaya	Jawa timur
		2	07	0100	33	028	Pembinaan dan Pelatihan Desain Produk Industri dan Teknologi Kreatif pada UPT Pengembangan Mutu Produk Industri dan Teknologi Kreatif Surabaya	Jumlah industri yang mendapatkan fasilitas (pelaku industri)		295	907.950.000	801	854.120.808	UPT PMPI & TK Surabaya	Jawa timur
		2	07	0100	33	029	Pembinaan dan Pelatihan Mutu Produk Industri & Fasilitas Hak Kekayaan Intelektual pada UPT Pengembangan Mutu Produk Industri dan Teknologi Kreatif Malang	Jumlah Industri yang mendapatkan fasilitas		733	889.370.000	1.558	879.625.850	UPT PMPI & TK Malang	Jawa timur

Rencana Strategis Perubahan Ke-II 2019-2024

TUJUAN	SASARAN	KODE					PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN/SASARAN/PROGRAM/KEGIATAN	SATUAN	2019				UNIT KERJA PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	LOKASI
										KINERJA		ANGGARAN			
										TARGET	REALISASI	TARGET	REALISASI		
		2	07	0100	33	030	Pembinaan dan Pelatihan Desain Produk Industri dan Teknologi Kreatif pada UPT Pengembangan Mutu Produk Industri dan Teknologi Kreatif Malang	Jumlah industri yang mendapatkan fasilitas		270	444.750.000	510	374.168.600	UPT PMPI & TK Malang	Jawa timur
		2	07	0100	41		Program Pengembangan Industri Agro	PDRB industri agro (Rp. Trilyun)		326	4.549.800.000	493	4.256.733.307		
		2	07	0100	41	003	Pembinaan Pelaku Industri di Kawasan Agropolitan	Jumlah Pelaku Industri yang difasilitasi		140	245.362.000	140	235.310.336	Bidang Agro	Jawa timur
		2	07	0100	41	004	Pemetaan industri hasil tembakau	Jumlah Dokumen yang disusun (dokumen)		1	50.000.000	1	49.000.000	Bidang Agro	Jawa timur
		2	07	0100	41	005	Pendataan dan pengawasan kepemilikan atau penggunaan mesin pelinting rokok sigaret dan pemberian sertifikat/kode registrasi mesin pelinting rokok sigaret	Jumlah sertifikat/registrasi yang diterbitkan (sertifikat)		52	475.000.000	52	439.056.500	Bidang Agro	Jawa timur
		2	07	0100	41	006	Pembinaan dan pelatihan keterampilan kerja bagi masyarakat	Jumlah Orang yang difasilitasi		390	475.000.000	430	440.682.484	Bidang Agro	Jawa timur
		2	07	0100	41	007	Pembinaan Industri Makanan, Hasil Laut, dan Perikanan	Jumlah Pelaku Industri yang difasilitasi		280	705.016.500	253	660.188.767	Bidang Agro	Jawa timur
		2	07	0100	41	008	Anti-Poverty Program (APP) Bidang Industri Agro	Jumlah Kelompok yang difasilitasi (kelompok masyarakat)		4	139.120.000	4	120.906.440	Bidang Agro	Jawa timur

Rencana Strategis Perubahan ke-II 2019-2024

TUJUAN	SASARAN	KODE					PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN/SASARAN/PROGRAM/KEGIATAN	SATUAN	2019				UNIT KERJA PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	LOKASI
										KINERJA		ANGGARAN			
										TARGET	REALISASI	TARGET	REALISASI		
		2	07	0100	41	009	Pembinaan dan Pelatihan Keterampilan Kerja Bagi Industri Minuman, Hasil Tembakau, dan Bahan Penyeegar	Jumlah Pelaku Industri yang difasilitasi (pelaku industri)		363	1.675.166.500	380	1.562.727.661	Bidang Agro	Jawa timur
		2	07	0100	41	010	Pembinaan dan Pelatihan Keterampilan Kerja Bagi Industri Pertanian, Kehutanan, dan Perkebunan	Jumlah Pelaku Industri yang difasilitasi (pelaku industri)		295	785.135.000	282	748.861.119	Bidang Agro	Jawa timur
		2	07	0100	42		Program Pengembangan Industri Non-Agro	PDRB industri non agro (Rp. Trilyun)		210	2.724.442.000	219	2.623.041.353		
		2	07	0100	42	001	Pembinaan Industri Logam, Mesin dan Alat Transportasi	Jumlah Pelaku Industri yang difasilitasi ;		280	435.902.500	223	424.759.040	Bidang Non Agro	Jawa timur
		2	07	0100	42	003	Anti-Poverty Program (APP) Bidang Industri non-Agro	Jumlah Pelaku Industri yang difasilitasi (pelaku industri)		100	266.320.000	80	241.370.300	Bidang Non Agro	Jawa timur
		2	07	0100	42	006	Pembinaan dan Pelatihan Keterampilan Kerja Bagi Industri Kimia, Tekstil dan Aneka	Jumlah Pelaku Industri yang difasilitasi (pelaku industri)		244	1.285.392.500	257	1.257.067.615	Bidang Non Agro	Jawa timur
		2	07	0100	42	007	Pembinaan dan Pelatihan Keterampilan Kerja Bagi Industri Elektronika dan Telematika	Jumlah Pelaku Industri yang difasilitasi (pelaku industri)		255	736.827.000	125	699.844.398	Bidang Non Agro	Jawa timur
		2	07	0100	43		Program Penataan Struktur Industri dan Pengembangan Perdagangan	Jumlah Rancangan Kebijakan yang disusun (kebijakan)		16	2.725.781.500	16	2.600.243.796		

Rencana Strategis Perubahan Ke-II 2019-2024

TUJUAN	SASARAN	KODE					PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN/SASARAN/PROGRAM/KEGIATAN	SATUAN	2019				UNIT KERJA PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	LOKASI
										KINERJA		ANGGARAN			
										TARGET	REALISASI	TARGET	REALISASI		
		2	07	0100	43	001	Penataan Struktur Industri	Luas kawasan industri yang terpakai (Ha)		2.223	923.995.000	2.223	888.635.785	Bidang PIP	Surabaya
		2	07	0100	43	002	Penyusunan Rancangan Kebijakan Pengembangan Industri	Jumlah Rancangan Kebijakan yang disusun (kebijakan)		3	352.440.000	3	336.520.450	Bidang PIP	Surabaya
		2	07	0100	43	003	Penyelenggaraan Kerjasama Lintas Sektor dan Lintas Wilayah untuk Pengembangan Industri dan Perdagangan	Jumlah Kerjasama lintas sektor dan lintas wilayah yang difasilitasi (kerjasama)		10	222.340.000	7	209.431.497	Bidang PIP	Surabaya
		2	07	0100	43	005	Penyusunan Sistem Pendataan Industri dan Perdagangan	Jumlah Data yang disusun (dokumen)		2	860.356.500	2	816.580.699	Bidang PIP	Surabaya
		2	07	0100	43	006	Penyusunan Rancangan Kebijakan Pengembangan Perdagangan	Jumlah Rancangan Kebijakan yang disusun (kebijakan)		2	366.650.000	2	349.075.365	Bidang PIP	Surabaya
Meningkatnya Nilai Tambah Penyelenggaraan Perdagangan								Persentase Pertumbuhan PDRB Kategori Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi (%)		6,34		6,1			
	Meningkatnya perlindungan konsumen dan pengamanan perdagangan							Persentase peningkatan barang yang diawasi dan sertifikasi barang beredar		2		3,1			
		2	06	0100	15		Program Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan	Jumlah Barang yang diawasi (unit)		780	5.469.904.000	944.799	5.276.618.348		

Rencana Strategis Perubahan ke-II 2019-2024

TUJUAN	SASARAN	KODE					PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN/SASARAN/PROGRAM/KEGIATAN	SATUAN	2019				UNIT KERJA PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	LOKASI
										KINERJA		ANGGARAN			
										TARGET	REALISASI	TARGET	REALISASI		
		2	06	0100	15	052	Pelayanan Administrasi Perkantoran UPT Perlindungan Konsumen Surabaya	Persentase Pelaksanaan Administrasi Perkantoran UPT Perlindungan Konsumen Surabaya		82	802.951.500	82	766.521.754	UPT PK Surabaya	Kota Surabaya
		2	06	0100	15	053	Pengawasan Barang Beredar dan Jasa di Wilayah Kerja UPT Perlindungan Konsumen Surabaya	Jumlah barang yang diawasi (unit)		900	125.000.000	320.837	124.370.500	UPT PK Surabaya	Wilayah Kerja UPT PK Surabaya
		2	06	0100	15	054	Pemberdayaan Konsumen dan Pelaku Usaha di Wilayah Kerja UPT Perlindungan Konsumen Surabaya	Jumlah konsumen dan pelaku usaha yang mendapat pembinaan perlindungan konsumen (orang)		250	198.675.000	1.675	194.709.000	UPT PK Surabaya	Wilayah Kerja UPT PK Surabaya
		2	06	0100	15	055	Pelayanan Administrasi Perkantoran UPT Perlindungan Konsumen Malang	Persentase Pelaksanaan Administrasi Perkantoran UPT Perlindungan Konsumen Malang		82	565.700.500	82	556.667.074	UPT PK Malang	Kota Malang
		2	06	0100	15	056	Pengawasan Barang Beredar dan Jasa di Wilayah Kerja UPT Perlindungan Konsumen Malang	Jumlah barang yang diawasi (unit)		165	198.150.000	362.484	194.519.080	UPT PK Malang	Wilayah Kerja UPT PK Malang
		2	06	0100	15	057	Pemberdayaan Konsumen dan Pelaku Usaha di Wilayah Kerja UPT Perlindungan Konsumen Malang	Jumlah konsumen dan pelaku usaha yang mendapat pembinaan perlindungan konsumen (orang)		200	310.805.000	3.593	303.250.950	UPT PK Malang	Wilayah Kerja UPT PK Malang
		2	06	0100	15	058	Pelayanan Administrasi Perkantoran UPT Perlindungan Konsumen Jember	Persentase Pelaksanaan Administrasi Perkantoran UPT Perlindungan Konsumen Jember (%)		82	536.760.500	100	511.050.212	UPT PK Jember	Kota Jember
		2	06	0100	15	059	Pengawasan Barang Beredar dan Jasa di Wilayah Kerja UPT	Jumlah barang yang diawasi (unit)		160	161.200.000	23.442	153.906.448	UPT PK Jember	Wilayah Kerja UPT PK Jember

Rencana Strategis Perubahan Ke-II 2019-2024

TUJUAN	SASARAN	KODE					PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN/SASARAN/PROGRAM/KEGIATAN	SATUAN	2019				UNIT KERJA PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	LOKASI
										KINERJA		ANGGARAN			
										TARGET	REALISASI	TARGET	REALISASI		
							Perlindungan Konsumen Jember								
		2	06	0100	15	060	Pemberdayaan Konsumen dan Pelaku Usaha di Wilayah Kerja UPT Perlindungan Konsumen Jember	Jumlah konsumen dan pelaku usaha yang mendapat pembinaan perlindungan konsumen (orang)		450	343.600.000	450	327.133.900	UPT PK Jember	Wilayah Kerja UPT PK Jember
		2	06	0100	15	061	Pelayanan Administrasi Perkantoran UPT Perlindungan Konsumen Bojonegoro	Persentase pelaksanaan administrasi perkantoran UPT Perlindungan Konsumen Bojonegoro (%)		82	733.234.000	100	694.873.979	UPT PK Bojonegoro	Kota Bojonegoro
		2	06	0100	15	062	Pengawasan Barang Beredar dan Jasa di Wilayah Kerja UPT Perlindungan Konsumen Bojonegoro	Jumlah barang yang diawasi (unit)		450	136.450.000	41.020	126.834.000	UPT PK Bojonegoro	Wilayah Kerja UPT PK Bojonegoro
		2	06	0100	15	063	Pemberdayaan Konsumen dan Pelaku Usaha di Wilayah Kerja UPT Perlindungan Konsumen Bojonegoro	Jumlah konsumen dan pelaku usaha yang mendapat pembinaan perlindungan konsumen (orang)		200	219.300.000	200	218.097.500	UPT PK Bojonegoro	Wilayah Kerja UPT PK Bojonegoro
		2	06	0100	15	064	Pelayanan Administrasi Perkantoran UPT Perlindungan Konsumen Kediri	Persentase pelaksanaan administrasi perkantoran UPT Perlindungan Konsumen Kediri (%)		82	787.327.500	100	773.649.801	UPT PK Kediri	Kota Kediri
		2	06	0100	15	065	Pengawasan Barang Beredar dan Jasa di Wilayah Kerja UPT Perlindungan Konsumen Kediri	Jumlah barang yang diawasi (unit)		251	170.000.000	197.016	164.024.550	UPT PK Kediri	Wilayah Kerja UPT PK Kediri

Rencana Strategis Perubahan ke-II 2019-2024

TUJUAN	SASARAN	KODE					PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN/SASARAN/PROGRAM/KEGIATAN	SATUAN	2019				UNIT KERJA PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	LOKASI
										KINERJA		ANGGARAN			
										TARGET	REALISASI	TARGET	REALISASI		
		2	06	0100	15	066	Pemberdayaan Konsumen dan Pelaku Usaha di Wilayah Kerja UPT Perlindungan Konsumen Kediri	Jumlah konsumen dan pelaku usaha yang mendapat pembinaan perlindungan konsumen (orang)		270	180.750.000	1.168	167.009.600	UPT PK Kediri	Wilayah Kerja UPT PK Kediri
		2	06	0100	31		Program Pengujian dan Sertifikasi Mutu Barang	Jumlah Sertifikasi yang dikeluarkan (sertifikat)		7.933	10.383.453.750	7.143	9.719.001.442		
		2	06	0100	31	004	Penyediaan sarana laboratorium uji dan pengembangan metode pengujian di UPT PSMB-LT Surabaya	Jumlah ruang lingkup sertifikasi (komoditi/besaran)		2	3.297.406.000	2	2.937.000.000	UPT PSMB-LT Surabaya	Surabaya
		2	06	0100	31	011	Pelayanan Administrasi Perkantoran UPT PSMB-LT Surabaya	Persentase Pelaksanaan Administrasi Perkantoran (%)		82	1.968.577.000	82	1.876.487.535	UPT PSMB-LT Surabaya	Surabaya
		2	06	0100	31	012	Pelayanan Jaminan Mutu di UPT PSMB-LT Surabaya	Jumlah sertifikat jaminan mutu yang diterbitkan dan diawasi (sertifikat)		126	109.130.000	65	96.062.710	UPT PSMB-LT Surabaya	Surabaya
		2	06	0100	31	013	Pelayanan Pengujian dan Kalibrasi di UPT PSMB-LT Surabaya	Jumlah pengujian dan kalibrasi yang dilakukan (sertifikat)		4.088	256.457.000	3.541	245.673.907	UPT PSMB-LT Surabaya	Surabaya
		2	06	0100	31	014	Pelayanan Administrasi Perkantoran UPT PSMB-LT Jember	Persentase Pelaksanaan Administrasi Perkantoran (%)		82	1.774.846.250	82	1.731.818.073	UPT PSMB-LT Jember	Kab. Jember
		2	06	0100	31	015	Pelayanan Jaminan Mutu di UPT PSMB-LT Jember	Jumlah sertifikat jaminan mutu yang diterbitkan dan diawasi (sertifikat)		55	263.517.500	49	253.878.581	UPT PSMB-LT Jember	Kab. Jember
		2	06	0100	31	016	Pelayanan Pengujian dan Kalibrasi di UPT PSMB-LT Jember	Jumlah pengujian dan kalibrasi (sertifikat)		3.590	213.520.000	3.488	211.232.000	UPT PSMB-LT Jember	Kab. Jember
		2	06	0100	31	017	Penumbuhan dan penguatan	Jumlah peserta yang mendapatkan Standardisasi Kualitas Bahan Baku (peserta)		759	166.060.000	1.294	164.566.836	UPT PSMB-LT Jember	Kab. Jember

Rencana Strategis Perubahan Ke-II 2019-2024

TUJUAN	SASARAN	KODE					PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN/SASARAN/PROGRAM/KEGIATAN	SATUAN	2019				UNIT KERJA PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	LOKASI
										KINERJA		ANGGARAN			
										TARGET	REALISASI	TARGET	REALISASI		
							kelembagaan di UPT BPSMB LT Jember								
		2	06	0100	31	018	Penumbuhan dan penguatan kelembagaan di UPT BPSMB LT Surabaya	Jumlah Peserta yang mendapatkan Standardisasi Kualitas Bahan Baku (peserta)		50	187.200.000	50	163.644.402	UPT PSMB-LT Surabaya	Surabaya
		2	06	0100	31	019	Penerapan Inovasi Teknis di UPT PSMB-LT Surabaya	Jumlah Ruang Lingkup Sertifikasi (komoditi/besaran)		2	1.062.800.000	2	970.751.589	UPT PSMB-LT Surabaya	Surabaya
		2	06	0100	31	020	Penerapan Inovasi Teknis di UPT PSMB-LT Jember	Jumlah Ruang Lingkup Sertifikasi (komoditi/besaran)		2	1.083.940.000	1	1.067.885.809	UPT PSMB-LT Jember	Kab. Jember
Meningkatnya Nilai Tambah Penyelenggaraan Perdagangan								Persentase Pertumbuhan PDRB Kategori Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi (%)		6,34		6,1			
	Meningkatnya net-ekspor perdagangan dalam negeri							Persentase pertumbuhan net ekspor antar daerah		5		-4,47			
		2	06	0100	18		Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri	Net ekspor perdagangan dalam negeri (Rp. Triliyun)		130	9.798.607.938	140	9.342.125.539		
		2	06	0100	18	008	Stabilisasi harga dan distribusi kebutuhan pokok serta penyediaan informasi pasar	Jumlah pasar sasaran pengendalian harga dan distribusi (pasar)		116	2.201.200.000	116	2.090.341.478	Bidang PDN	Jawa Timur
		2	06	0100	18	039	Pelaksanaan Sistem Resi Gudang	Jumlah Produsen dan Konsumen yang mendapatkan fasilitasi tata niaga perdagangan (org)		2	95.800.000	2	90.170.859	Bidang PDN	Bondowoso / tulungagung
		2	06	0100	18	043	Penguatan Kantor Perwakilan Dagang (KPD)	Jumlah kerjasama dagang yang difasilitasi KPD & misi dagang (kerjasama)		231	4.992.758.638	231	4.838.514.627	Bidang PDN	26 Provinsi Mitra

Rencana Strategis Perubahan ke-II 2019-2024

TUJUAN	SASARAN	KODE					PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN/SASARAN/PROGRAM/KEGIATAN	SATUAN	2019				UNIT KERJA PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	LOKASI
										KINERJA		ANGGARAN			
										TARGET	REALISASI	TARGET	REALISASI		
		2	06	0100	18	045	Pembinaan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah sarana distribusi perdagangan yang difasilitasi (unit)		41	95.025.000	70	58.732.850	Bidang PDN	Kab. Sidoarjo
		2	06	0100	18	046	Pengumpulan Informasi Hasil Tembakau Yang Dilekati Pita Cukai Palsu di Peredaran atau Tempat Penjualan Eceran	Jumlah Barang yang diawasi (unit)		765	154.200.000	765	143.926.940	Bidang PDN	Jawa timur
		2	06	0100	18	047	Pembinaan Tertib Niaga bagi Konsumen dan Produsen	Jumlah produsen dan Konsumen yang mendapatkan fasilitasi tata niaga perdagangan (org)		100	63.132.300	100	42.785.200	Bidang PDN	Surabaya
		2	06	0100	18	048	Fasilitasi Promosi Bagi Usaha Mandiri Masyarakat Melalui Promosi Dalam Negeri	Jumlah pengusaha yang mendapatkan fasilitasi promosi (unit usaha)		60	2.196.492.000	60	2.077.653.585	Bidang PDN	Jawa Timur, Indonesia
Meningkatnya Nilai Tambah Penyelenggaraan Perdagangan								Persentase Pertumbuhan PDRB Kategori Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi (%)		6,34		6,1			
	Meningkatnya net-ekspor perdagangan luar negeri							Persentase pertumbuhan net ekspor non migas		2		127,11			
		2	06	0100	22		Program Peningkatan Ekspor dan Pengendalian Impor	Net-ekspor nonmigas (milyar US \$)		6	4.217.478.000	4	4.068.540.687		
		2	06	0100	22	001	Intensifikasi pelayanan ekspor	Jumlah SKA yang diterbitkan (SKA)		158.858	1.944.095.000	158.482	1.823.187.346	Bidang PI	Surabaya
		2	06	0100	22	002	Pengendalian dan pengawasan produk-produk impor	Jumlah importir yang diawasi (importir)		25	451.868.000	31	439.366.752	Bidang PI	Jawa Timur

Rencana Strategis Perubahan Ke-II 2019-2024

TUJUAN	SASARAN	KODE					PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN/SASARAN/PROGRAM/KEGIATAN	SATUAN	2019				UNIT KERJA PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	LOKASI
										KINERJA		ANGGARAN			
										TARGET	REALISASI	TARGET	REALISASI		
		2	06	0100	22	003	Penyelenggaraan Promosi dan Kerjasama Perdagangan Internasional	Jumlah IKM/pengusaha yang mendapatkan fasilitasi promosi internasional (unit usaha)		40	1.821.515.000	37	1.805.986.589	Bidang PI	Bandung, batam, Jawa Timur, Jakarta

Tabel 6.2 Program dan kegiatan tahun 2020

TUJUAN	SASARAN	KODE					PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN/SASARAN/PROGRAM/KEGIATAN	SATUAN	2020				UNIT KERJA PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	LOKASI
										KINERJA		ANGGARAN			
										TARGET	REALISASI	TARGET	REALISASI		
	Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah								86	90					
		2	7	100	1		Program Pelayanan Kesekretariat	- Persentase indikator program yang tercapai	88,50	88,50	10.979.052.362	10.614.105.436	Sekretariat		
								- Persentase realisasi anggaran	88,50	97,23					
								- Indeks profesionalitas ASN	88,50	51,78					
		2	7	100	1	1	Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Anggaran Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan dan anggaran Perangkat Daerah	8	8	900.000.000	823.880.504	Sekretariat		

Rencana Strategis Perubahan ke-II 2019-2024

TUJUAN	SASARAN	KODE					PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN/SASARAN/PROGRAM/KEGIATAN	SATUAN	2020				UNIT KERJA PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	LOKASI
										KINERJA		ANGGARAN			
										TARGET	REALISASI	TARGET	REALISASI		
		2	7	100	1	2	Pengelolaan Administrasi Keuangan	Jumlah laporan pertanggungjawaban keuangan		13	13	4.040.564.500	3.972.886.820	Sekretariat	
		2	7	100	1	3	Ketatausahaan dan Kependidikan	Jumlah dokumen ketatausahaan dan kepegawaian		13	13	6.038.487.862	5.817.338.112	Sekretariat	
Meningkatnya Nilai Tambah Produksi								Persentase Pertumbuhan PDRB Kategori Industri Pengolahan	%	-0,48	-2,06				
	Meningkatnya PDRB sektor industri pengolahan							Nilai PDRB industri pengolahan	(Triliun Rp)	497,83	705,79				
		2	7	100	1	5	Program Pengembangan Industri Agro	Nilai produksi industri agro (Trilyun Rupiah)		191,00	191,64	897.303.861	886.526.303	Bidang Industri Agro	
		2	7	100	1	1	Pengembangan Industri Minuman Hasil Tembakau dan Bahan Penyegar	Jumlah pelaku industri minuman hasil tembakau dan bahan penyegar yang difasilitasi (pelaku industri)		15	15	266.190.100	262.922.243	Bidang Industri Agro	
		2	7	100	1	2	Pengembangan Industri Hasil Pertanian, Kehutanan dan Perkebunan	Jumlah pelaku industri hasil pertanian, kehutanan dan perkebunan yang difasilitasi (pelaku industri)		10	10	39.730.000	39.653.450	Bidang Industri Agro	
		2	7	100	1	3	Pengembangan Industri Makanan, Hasil Laut dan Perikanan	Jumlah pelaku industri makanan, hasil laut dan perikanan yang difasilitasi (pelaku industri)		30	30	45.579.500	44.738.600	Bidang Industri Agro	
		2	7	100	1	4	Pembinaan dan pelatihan	Jumlah masyarakat yang difasilitasi (masyarakat)		65	65	152.018.550	149.611.960	Bidang Industri Agro	

Rencana Strategis Perubahan Ke-II 2019-2024

TUJUAN	SASARAN	KODE					PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN/SASARAN/PROGRAM/KEGIATAN	SATUAN	2020				UNIT KERJA PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	LOKASI
										KINERJA		ANGGARAN			
										TARGET	REALISASI	TARGET	REALISASI		
							keterampilan kerja bagi masyarakat								
		2	7	100	15	5	Pemetaan Industri Hasil Tembakau	Jumlah dokumen yang disusun		1	1	115.000.000	114.132.000	Bidang Industri Agro	
		2	7	100	15	6	Pendataan dan Pengawasan Kepemilikan atau Penggunaan Mesin Pelinting Rokok Sigaret dan Pemberian Sertifikat/Kode Registrasi Mesin Pelinting Rokok Sigaret	Jumlah sertifikat/registrasi yang diterbitkan (dokumen)		13	13	183.646.711	182.286.500	Bidang Industri Agro	
		2	7	100	15	7	Anti-Poverty Program (APP) Bidang Industri Agro	Jumlah kelompok masyarakat yang difasilitasi		1	1	6.000.000	5.927.250	Bidang Industri Agro	
		2	7	100	15	8	Pembinaan Pelaku Industri di Kawasan Agropolitan	Jumlah pelaku industri yang difasilitasi		60	60	89.139.000	87.254.300	Bidang Industri Agro	
		2	7	100	16		Program Pengembangan Industri Non Agro	Nilai produksi industri non agro (Trilyun Rupiah)		28,00	27,60	223.500.500	220.864.275	Bidang Industri Non Agro	
		2	7	100	16	1	Pengembangan Industri Logam, Mesin dan Alat Transportasi	Jumlah pelaku industri logam, mesin dan alat transportasi yang difasilitasi (pelaku industri)		85	4	34.840.000	33.761.150	Bidang Industri Non Agro	
		2	7	100	16	2	Pengembangan Industri Kimia, Tekstil dan Aneka	Jumlah pelaku industri kimia, tekstil dan aneka yang difasilitasi (pelaku industri)		102	22	157.854.700	156.506.075	Bidang Industri Non Agro	
		2	7	100	16	3	Pengembangan Industri Elektronik dan Telematika	Jumlah pelaku industri elektronika dan telematika yang difasilitasi (pelaku industri)		75	90	13.250.000	13.081.250	Bidang Industri Non Agro	

Rencana Strategis Perubahan ke-II 2019-2024

TUJUAN	SASARAN	KODE			PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN/SASARAN/PROGRAM/KEGIATAN	SATUAN	2020				UNIT KERJA PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	LOKASI
								KINERJA		ANGGARAN			
								TARGET	REALISASI	TARGET	REALISASI		
		2	7	10064	Anti-Poverty Program (APP) Bidang Industri non Agro	Jumlah kelompok masyarakat yang difasilitasi		1	0	17.555.800	17.515.800	Bidang Industri Non Agro	
		2	7	1007	Program Pengembangan Industri dan Perdagangan	Jumlah rumusan rancangan kebijakan (dokumen)		10	10	634.661.750	631.883.220	Bidang PIP	
		2	7	10071	Penyusunan Rancangan Kebijakan Pengembangan Industri	Jumlah bahan rumusan rancangan kebijakan pengembangan industri (dokumen)		4	4	106.920.000	106.619.200	Bidang PIP	
		2	7	10072	Penyusunan Rancangan Kebijakan Pengembangan Perdagangan	Jumlah bahan rumusan rancangan kebijakan pengembangan perdagangan (dokumen)		4	4	77.150.000	76.803.395	Bidang PIP	
		2	7	10073	Penyusunan Data dan Sistem Informasi Industri dan Perdagangan	Jumlah data industri dan perdagangan (dokumen)		4	4	450.591.750	448.460.625	Bidang PIP	
		2	7	1008	Program Peningkatan Pelayanan Teknis Industri Kayu dan Produk Kayu	Persentase peningkatan pelayanan teknis industri kayu dan produk kayu		2	4,54	1.345.675.750	1.339.715.567	UPTI Kayu Pasuruan	
		2	7	10081	Pelaksanaan Administrasi Perkantoran pada UPTI Kayu dan Produk Kayu	Persentase pelaksanaan administrasi perkantoran UPTI Kayu Pasuruan		80	80	1.265.402.375	1.259.705.672	UPTI Kayu Pasuruan	
		2	7	10082	Pelayanan Teknis Industri Kayu dan Produk Kayu	Jumlah jasa pelayanan UPTI Kayu Pasuruan		800	2118	70.790.000	70.526.520	UPTI Kayu Pasuruan	

Rencana Strategis Perubahan Ke-II 2019-2024

TUJUAN	SASARAN	KODE					PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN/SASARAN/PROGRAM/KEGIATAN	SATUAN	2020				UNIT KERJA PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	LOKASI
										KINERJA		ANGGARAN			
										TARGET	REALISASI	TARGET	REALISASI		
		2	7	100	183	Pengembangan Teknis Industri Kayu dan Produk Kayu	Jumlah industri yang mendapatkan Pengembangan Teknis Industri Kayu dan Produk Kayu		25	223	9.483.375	9.483.375	UPTI Kayu Pasuruan		
		2	7	100	19	Program Peningkatan Pelayanan Teknis pada UPTI Kulit dan Produk Kulit	Persentase peningkatan pelayanan jasa teknis industri kulit dan produk kulit		2	11,29	2.035.591.750	2.015.230.370	UPTI Kulit Magetan		
		2	7	100	191	Pelaksanaan Administrasi Perkantoran pada UPTI Kulit dan Produk Kulit	Persentase pelaksanaan administrasi perkantoran UPTI Kulit Magetan		80	80	1.768.516.750	1.751.539.320	UPTI Kulit Magetan		
		2	7	100	192	Pelayanan Teknis Industri Kulit dan Produk Kulit	Jumlah jasa pelayanan UPTI Kulit Magetan		780	1.406	104.230.000	103.181.000	UPTI Kulit Magetan		
		2	7	100	193	Pengembangan Teknis Industri Kulit dan Produk Kulit	Jumlah industri yang mendapatkan Pengembangan Teknis Industri Kulit dan Produk Kulit		120	200	162.845.000	160.510.050	UPTI Kulit Magetan		
		2	7	100	20	Program Peningkatan Pelayanan Teknis pada UPTI Logam dan Perekayasaan	Persentase peningkatan pelayanan jasa teknis industri logam dan perekayasaan		2	-34,28	2.438.523.000	2.393.284.467	UPTI Logam Sidoarjo		
		2	7	100	201	Pelaksanaan Administrasi Perkantoran pada UPTI Logam dan Perekayasaan	Persentase pelaksanaan administrasi perkantoran UPTI Logam dan Perekayasaan Sidoarjo		80	80	2.190.082.000	2.151.911.347	UPTI Logam Sidoarjo		
		2	7	100	202	Pelayanan Teknis Industri Logam dan Perekayasaan	Jumlah jasa pelayanan UPTI Logam dan Perekayasaan		650	591	159.145.000	155.490.620	UPTI Logam Sidoarjo		

Rencana Strategis Perubahan ke-II 2019-2024

TUJUAN	SASARAN	KODE					PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN/SASARAN/PROGRAM/KEGIATAN	SATUAN	2020				UNIT KERJA PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	LOKASI
										KINERJA		ANGGARAN			
										TARGET	REALISASI	TARGET	REALISASI		
		2	7	100	203	Pengembangan Teknis Industri Logam dan Perekayasaan	Jumlah industri yang mendapatkan Pengembangan Teknis Industri Logam dan Perekayasaan		100	220	89.296.000	85.882.500	UPTI Logam Sidoarjo		
		2	7	100	21	Program Peningkatan Pelayanan Teknis pada UPTI Makanan Minuman dan Kemasan	Persentase peningkatan pelayanan jasa teknis industri makanan minuman dan kemasan		2	82,79	2.026.950.750	1.989.507.345	UPTI Mamin Kemasan Sidoarjo		
		2	7	100	211	Pelaksanaan Administrasi Perkantoran pada UPTI Makanan Minuman dan Kemasan	Persentase pelaksanaan administrasi perkantoran UPTI Makanan Minuman dan Kemasan		80	80	1.913.154.030	1.877.391.255	UPTI Mamin Kemasan Sidoarjo		
		2	7	100	212	Pelayanan Teknis Industri Makanan Minuman dan Kemasan	Jumlah jasa pelayanan UPTI Makanan Minuman dan Kemasan		150	1.075	60.338.000	59.418.100	UPTI Mamin Kemasan Sidoarjo		
		2	7	100	213	Pengembangan Teknis Industri Makanan Minuman dan Kemasan	Jumlah industri yang mendapatkan Pengembangan Teknis Industri Makanan Minuman dan Kemasan		10	10	53.458.720	52.697.990	UPTI Mamin Kemasan Sidoarjo		
		2	7	100	22	Program Pembinaan Pelayanan Teknis pada UPTI Aneka Industri dan Kerajinan	Persentase peningkatan pelayanan jasa teknis industri di UPTI Aneka Industri dan Kerajinan		2	-12,50	2.492.929.624	2.473.443.433	UPTI Mamin Kemasan Sidoarjo		
		2	7	100	221	Pelaksanaan Administrasi Perkantoran pada UPTI Aneka Industri dan Kerajinan	Persentase pelaksanaan administrasi perkantoran UPT Aneka Industri dan Kerajinan		82	82	2.246.940.000	2.227.533.927	UPTI Aneka dan Kerajinan Kemasan		

Rencana Strategis Perubahan Ke-II 2019-2024

TUJUAN	SASARAN	KODE			PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN/SASARAN/PROGRAM/KEGIATAN	SATUAN	2020				UNIT KERJA PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	LOKASI
								KINERJA		ANGGARAN			
								TARGET	REALISASI	TARGET	REALISASI		
		2	7	10022	Pelayanan Teknis Aneka Industri dan Kerajinan	Jumlah jasa pelayanan UPT Aneka Industri dan Kerajinan		117	452	14.943.000	14.942.500	UPTI Aneka dan Kerajinan Kemas	
		2	7	10023	Pengembangan Teknis Aneka Industri dan Kerajinan	Jumlah industri yang mendapatkan Pengembangan Teknis Aneka Industri dan Kerajinan		2	0	231.046.624	230.967.006	UPTI Aneka dan Kerajinan Kemas	
		2	7	10023	Program Pembinaan Standarisasi dan Desain Produk Industri pada UPT PMPI dan TK Surabaya	Persentase peningkatan pelayanan jasa teknis industri di UPT PMPI dan TK Surabaya		2	-15,82	1.058.351.250	1.052.730.780	UPT PMPI dan TK Surabaya	
		2	7	10031	Pelaksanaan Administrasi Perkantoran pada UPT PMPI dan TK Surabaya	Persentase pelaksanaan administrasi perkantoran di UPT PMPI dan TK Surabaya		80	80,00	456.034.650	454.231.120	UPT PMPI dan TK Surabaya	
		2	7	10032	Pembinaan Mutu Produk Industri dan Kekayaan Intelektual di Wilayah kerja UPT PMPI dan TK Surabaya	Jumlah jasa pelayanan Mutu Produk Industri dan Kekayaan Intelektual		140	142	200.373.000	198.297.779	UPT PMPI dan TK Surabaya	
		2	7	10033	Pembinaan dan Pelatihan Desain Produk Industri dan Teknologi Kreatif di Wilayah kerja UPT PMPI dan TK Surabaya	Jumlah jasa pelayanan Desain Produk Industri dan Teknologi Kreatif		200	336	401.943.600	400.201.881	UPT PMPI dan TK Surabaya	
		2	7	10024	Program Pembinaan Standarisasi dan Desain Produk Industri pada UPT	Persentase peningkatan pelayanan jasa teknis industri di UPT PMPI dan TK Malang		2	-15,82	786.819.250	777.111.802	UPT PMPI dan TK Malang	

Rencana Strategis Perubahan ke-II 2019-2024

TUJUAN	SASARAN	KODE					PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN/SASARAN/PROGRAM/KEGIATAN	SATUAN	2020				UNIT KERJA PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	LOKASI
										KINERJA		ANGGARAN			
										TARGET	REALISASI	TARGET	REALISASI		
							PMPI dan TK Malang								
		2	7	100	24	1	Pelaksanaan Administrasi Perkantoran pada UPT PMPI dan TK Malang	Persentase pelaksanaan administrasi perkantoran di UPT PMPI dan TK Malang		80	80	339.972.250	335.655.063	UPT PMPI dan TK Malang	
		2	7	100	24	2	Pembinaan Mutu Produk Industri dan Kekayaan Intelektual di Wilayah kerja UPT PMPI dan TK Malang	Jumlah jasa pelayanan Mutu Produk Industri dan Kekayaan Intelektual		76	76	54.877.100	53.707.100	UPT PMPI dan TK Malang	
		2	7	100	24	3	Pembinaan dan Pelatihan Desain Produk Industri dan Teknologi Kreatif di Wilayah kerja UPT PMPI dan TK Malang	Jumlah jasa pelayanan Desain Produk Industri dan Teknologi Kreatif		374	489	391.969.900	387.749.639	UPT PMPI dan TK Malang	
Meningkatnya Nilai Tambah Penyelenggaraan Perdagangan								Persentase Pertumbuhan PDRB Kategori Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi	%	-5,72	-5,74				
	Meningkatnya net-ekspor perdagangan luar negeri							Persentase pertumbuhan net ekspor non migas	%	2	-26				
		2	6	100	15		Program Peningkatan Ekspor dan Pengendalian Impor	Net Ekspor Non Migas (Milyar US\$)		2,92	1,46	1.843.532.750	1.835.269.411	Bidang PI	
		2	6	100	15	1	Intensifikasi pelayanan ekspor	Jumlah SKA yang diterbitkan		100.000	105.812	1.453.353.000	1.445.441.068	Bidang PI	

Rencana Strategis Perubahan Ke-II 2019-2024

TUJUAN	SASARAN	KODE				PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN/SASARAN/PROGRAM/KEGIATAN	SATUAN	2020				UNIT KERJA PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	LOKASI	
									KINERJA		ANGGARAN				
									TARGET	REALISASI	TARGET	REALISASI			
		2	6	100	15	2	Pengendalian dan pengawasan produk-produk impor	Jumlah importir yang diawasi		6	18	269.764.750	269.484.613	Bidang PI	
		2	6	100	15	3	Penyelenggaraan Promosi dan Kerjasama Perdagangan Internasional	Jumlah IKM/pengusaha yang mendapatkan fasilitasi promosi internasional (pelaku usaha)		2	2	120.415.000	120.343.730	Bidang PI	
	Meningkatkan net-ekspor perdagangan dalam negeri							Persentase pertumbuhan net ekspor antar daerah		6	-235,95				
		2	6	100	16		Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri	Net ekspor perdagangan dalam negeri (Trilyun Rupiah)		130	120,03	12.096.630.000	11.460.924.072	Bidang PDN	
		2	6	100	16	1	Stabilisasi barang pokok dan distribusi kebutuhan pokok serta penyediaan informasi pasar	Jumlah pasar sasaran pengendalian harga dan distribusi (pasar)		116	116	1.935.985.000	1.887.687.880	Bidang PDN	
		2	6	100	16	2	Fasilitasi Promosi bagi usaha mandiri masyarakat melalui penggunaan dan pemasaran produk dalam negeri	Jumlah pengusaha yang mendapatkan fasilitasi promosi dalam negeri (pelaku usaha)		88	218	9.495.960.000	8.959.235.026	Bidang PDN	
		2	6	100	16	3	Pembinaan unit usaha perdagangan, distribusi dan logistik	Jumlah Produsen dan Konsumen yang mendapatkan fasilitasi tata niaga perdagangan (orang)		130	388	619.450.000	575.067.542	Bidang PDN	

Rencana Strategis Perubahan ke-II 2019-2024

TUJUAN	SASARAN	KODE				PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN/SASARAN/PROGRAM/KEGIATAN	SATUAN	2020				UNIT KERJA PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	LOKASI	
									KINERJA		ANGGARAN				
									TARGET	REALISASI	TARGET	REALISASI			
		2	6	100	16	4	Pengumpulan Informasi Hasil Tembakau Yang Dilekati Pita Cukai Palsu di Peredaran atau Tempat Penjualan Eceran	Jumlah dokumen informasi hasil tembakau yang dilekati pita cukai palsu di peredaran atau tempat penjualan eceran yang disusun		1	1	45.235.000	38.933.624	Bidang PDN	
	Meningkatnya perlindungan konsumen dan pengamanan perdagangan							Persentase peningkatan barang yang diawasi dan sertifikasi barang beredar		1	-54				
		2	6	100	17		Program Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan (wilayah kerja UPT Perlindungan Konsumen Surabaya)	Persentase jumlah temuan dalam pengawasan barang beredar, jasa dan tertib niaga		10	2,95	983.245.000	979.336.702	UPT PK Surabaya	
		2	6	100	17	1	Pelayanan Administrasi Perkantoran UPT Perlindungan Konsumen Surabaya	Persentase pelaksanaan administrasi perkantoran UPT PK Surabaya		80	80	895.332.500	891.710.702	UPT PK Surabaya	
		2	6	100	17	2	Pengawasan Barang Beredar, Jasa dan Tertib Niaga (Wilayah Kerja UPT Perlindungan Konsumen Surabaya)	Jumlah barang beredar, jasa dan tertib niaga yang diawasi (unit)		35.000	230.213	48.850.000	48.563.500	UPT PK Surabaya	

Rencana Strategis Perubahan Ke-II 2019-2024

TUJUAN	SASARAN	KODE			PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN/SASARAN/PROGRAM/KEGIATAN	SATUAN	2020				UNIT KERJA PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	LOKASI
								KINERJA		ANGGARAN			
								TARGET	REALISASI	TARGET	REALISASI		
		2	6	100173	Pemberdayaan Konsumen dan Pelaku Usaha (Wilayah Kerja UPT Perlindungan Konsumen Surabaya)	Jumlah konsumen dan pelaku usaha yang mendapat pembinaan perlindungan konsumen (orang)		340	735	39.062.500	39.062.500	UPT PK Surabaya	
		2	6	10018	Program Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan (wilayah kerja UPT Perlindungan Konsumen Malang)	Persentase Jumlah temuan dalam pengawasan barang beredar, jasa dan tertib niaga		10	21,27	795.033.945	789.208.996	UPT PK Malang	
		2	6	100181	Pelayanan Administrasi Perkantoran UPT Perlindungan Konsumen Malang	Persentase pelaksanaan administrasi perkantoran UPT PK Malang		80	80	624.793.945	618.990.496	UPT PK Malang	
		2	6	100182	Pengawasan Barang Beredar, Jasa dan Tertib Niaga (Wilayah Kerja UPT Perlindungan Konsumen Malang)	Jumlah barang beredar, jasa dan tertib niaga yang diawasi (unit)		1.000	22.426	19.660.000	19.657.000	UPT PK Malang	
		2	6	100183	Pemberdayaan Konsumen dan Pelaku Usaha (Wilayah Kerja UPT Perlindungan Konsumen Malang)	Jumlah konsumen dan pelaku usaha yang mendapat pembinaan perlindungan konsumen (orang)		50	915	150.580.000	150.561.500	UPT PK Malang	
		2	6	10019	Program Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan (wilayah kerja UPT Perlindungan	Persentase Jumlah temuan dalam pengawasan barang beredar, jasa dan tertib niaga		10	22,88	451.628.500	440.173.621	UPT PK Jember	

Rencana Strategis Perubahan ke-II 2019-2024

TUJUAN	SASARAN	KODE					PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN/SASARAN/PROGRAM/KEGIATAN	SATUAN	2020				UNIT KERJA PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	LOKASI
										KINERJA		ANGGARAN			
										TARGET	REALISASI	TARGET	REALISASI		
							Konsumen Jember)								
		2	6	100	19	1	Pelayanan Administrasi Perkantoran UPT Perlindungan Konsumen Jember	Persentase pelaksanaan administrasi perkantoran UPT PK Jember		80	80	373.098.500	362.555.521	UPT PK Jember	
		2	6	100	19	2	Pengawasan Barang Beredar, Jasa dan Tertib Niaga (Wilayah Kerja UPT Perlindungan Konsumen Jember)	Jumlah barang beredar, jasa dan tertib niaga yang diawasi (unit)		8.000	8.526	19.200.000	19.186.100	UPT PK Jember	
		2	6	100	19	3	Pemberdayaan Konsumen dan Pelaku Usaha (Wilayah Kerja UPT Perlindungan Konsumen Jember)	Jumlah konsumen dan pelaku usaha yang mendapat pembinaan perlindungan konsumen (orang)		60	89	59.330.000	58.432.000	UPT PK Jember	
		2	6	100	20		Program Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan (wilayah kerja UPT Perlindungan Konsumen Bojonegoro)	Persentase Jumlah temuan dalam pengawasan barang beredar, jasa dan tertib niaga		10	6,63	763.272.000	759.820.688	UPT PK Bojonegoro	
		2	6	100	20	1	Pelayanan Administrasi Perkantoran UPT Perlindungan Konsumen Bojonegoro	Persentase pelaksanaan administrasi perkantoran UPT PK Bojonegoro		80	80	704.732.000	701.280.688	UPT PK Bojonegoro	

Rencana Strategis Perubahan Ke-II 2019-2024

TUJUAN	SASARAN	KODE			PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN/SASARAN/PROGRAM/KEGIATAN	SATUAN	2020				UNIT KERJA PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	LOKASI
								KINERJA		ANGGARAN			
								TARGET	REALISASI	TARGET	REALISASI		
		2	6	100202	Pengawasan Barang Beredar, Jasa dan Tertib Niaga (Wilayah Kerja UPT Perlindungan Konsumen Bojonegoro)	Jumlah barang beredar, jasa dan tertib niaga yang diawasi (unit)		20.700	49.483	24.790.000	24.790.000	UPT PK Bojonegoro	
		2	6	100203	Pemberdayaan Konsumen dan Pelaku Usaha (Wilayah Kerja UPT Perlindungan Konsumen Bojonegoro)	Jumlah konsumen dan pelaku usaha yang mendapat pembinaan perlindungan konsumen (orang)		50	63	33.750.000	33.750.000	UPT PK Bojonegoro	
		2	6	10021	Program Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan (wilayah kerja UPT Perlindungan Konsumen Kediri)	Persentase Jumlah temuan dalam pengawasan barang beredar, jasa dan tertib niaga		10	2,35	749.272.000	729.692.117	UPT PK Kediri	
		2	6	100211	Pelayanan Administrasi Perkantoran UPT Perlindungan Konsumen Kediri	Persentase pelaksanaan administrasi perkantoran UPT PK Kediri		80	80	648.342.900	629.593.517	UPT PK Kediri	
		2	6	100212	Pengawasan Barang Beredar, Jasa dan Tertib Niaga (Wilayah Kerja UPT Perlindungan Konsumen Kediri)	Jumlah barang beredar, jasa dan tertib niaga yang diawasi (unit)		35.000	104.250	23.604.400	23.592.400	UPT PK Kediri	
		2	6	100213	Pemberdayaan Konsumen dan Pelaku Usaha (Wilayah Kerja UPT Perlindungan Konsumen Kediri)	Jumlah konsumen dan pelaku usaha yang mendapat pembinaan perlindungan konsumen (orang)		210	412	77.324.700	76.506.200	UPT PK Kediri	

Rencana Strategis Perubahan ke-II 2019-2024

TUJUAN	SASARAN	KODE					PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN/SASARAN/PROGRAM/KEGIATAN	SATUAN	2020				UNIT KERJA PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	LOKASI
										KINERJA		ANGGARAN			
										TARGET	REALISASI	TARGET	REALISASI		
		2	6	100	22	Program Pengujian dan Sertifikasi Mutu Barang UPT PSMB-LT Surabaya	Pertumbuhan sertifikasi mutu produk di UPT PSMB-LT Surabaya		1,00	-9,01	1.595.446.750	1.569.283.842	UPT PSMB-LT Surabaya		
		2	6	100	221	Pelayanan Administrasi Perkantoran UPT PSMB-LT Surabaya	Persentase pelaksanaan administrasi perkantoran UPT PSMB-LT Surabaya		80	80	1.429.640.708	1.406.496.946	UPT PSMB-LT Surabaya		
		2	6	100	222	Pelayanan Teknis Jasa Penilaian Kesesuaian dan Kalibrasi	Jumlah sertifikat penilaian kesesuaian (mutu barang dan jasa) dan kalibrasi (dokumen)		2000	4.107	34.950.000	34.718.685	UPT PSMB-LT Surabaya		
		2	6	100	223	Pengembangan Jasa Penilaian Kesesuaian dan Kalibrasi	Jumlah akreditasi (surveillance, re-akreditasi dan penambahan ruang lingkup) (dokumen)		1	1	29.150.792	28.882.392	UPT PSMB-LT Surabaya		
		2	6	100	224	Penumbuhan dan Penguatan Kelembagaan di UPT PSMB-LT Surabaya	Jumlah peserta yang mendapatkan standardisasi kualitas bahan baku (orang)		10	20	22.007.250	20.373.579	UPT PSMB-LT Surabaya		
		2	6	100	225	Penerapan Inovasi Teknis di UPT PSMB-LT Surabaya	Jumlah penambahan ruang lingkup akreditasi penilaian kesesuaian (mutu barang dan jasa) dan kalibrasi (komoditi/parameter)		1	1	79.698.000	78.812.240	UPT PSMB-LT Surabaya		
		2	6	100	23	Program Pengujian dan Sertifikasi Mutu Barang UPT PSMB-LT Jember	Pertumbuhan sertifikasi mutu produk pada UPT PSMB-LT Jember		1,00	-9,49	1.619.378.750	1.589.667.944	UPT PSMB-LT Jember		
		2	6	100	231	Pelayanan Administrasi Perkantoran UPT PSMB-LT Jember	Persentase pelayanan administrasi perkantoran UPT PSMB-LT Jember		80	80	1.189.061.350	1.166.969.484	UPT PSMB-LT Jember		

Rencana Strategis Perubahan Ke-II 2019-2024

TUJUAN	SASARAN	KODE			PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN/SASARAN/PROGRAM/KEGIATAN	SATUAN	2020				UNIT KERJA PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	LOKASI
								KINERJA		ANGGARAN			
								TARGET	REALISASI	TARGET	REALISASI		
		2	6	10032	Pelayanan Teknis Jasa Penilaian Kesesuaian dan Kalibrasi	Jumlah sertifikat penilaian kesesuaian (mutu barang dan jasa) dan kalibrasi (dokumen)		4000	3.981	209.885.000	204.985.300	UPT PSMB-LT Jember	
		2	6	10033	Pengembangan Jasa Penilaian Kesesuaian dan Kalibrasi	Jumlah akreditasi (surveillance, re-akreditasi dan penambahan ruang lingkup) (dokumen)		4	4	67.600.500	67.377.900	UPT PSMB-LT Jember	
		2	6	10034	Penumbuhan dan Penguatan Kelembagaan di UPT PSMB-LT Jember	Jumlah peserta yang mendapatkan standarisasi kualitas bahan baku (orang)		0	0	30.250.000	29.729.488	UPT PSMB-LT Jember	
		2	6	10035	Penerapan Inovasi Teknis di UPT PSMB-LT Jember	Jumlah penambahan ruang lingkup akreditasi penilaian kesesuaian (mutu barang dan jasa) dan kalibrasi (komoditi/parameter)		4	13	122.581.900	120.605.772	UPT PSMB-LT Jember	
		2	6	10036	Penyediaan sarana laboratorium uji dan pengembangan metode pengujian di UPT PSMB-LT Jember	Jumlah penyediaan sarana dan prasarana laboratorium (paket)		0	0	0	0	UPT PSMB-LT Jember	

Rencana Strategis Perubahan ke-II 2019-2024

Tabel 6.3 Program dan kegiatan tahun 2021 sampai dengan tahun 2024

(Sesuai dengan PMD 90 tahun 2019 dan KEMENDAGRI 050 tahun 2020)

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	KODE	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	SATUAN	DATA CAPAIAN PADA TAHUN AWAL PERENCANAAN (2020)	2021		2022		2023		2024		KONDISI AKHIR		UNIT KERJA PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
								TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp		
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
Meningkatnya Nilai Tambah Penyelenggaraan Perdagangan					Persentase Pertumbuhan PDRB Perdagangan Besar dan Ekstran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	%	-5,74	0,14		3,08		4,69		7,18		7,18			
	Meningkatnya PDRB sektor Perdagangan	Nilai PDRB PDRB Kategori Perdagangan Besar dan Ekstran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor				Rp. Triliun	412,11	425		450		475		500		7,46			
			3 30 2		PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN	Jumlah Ijin yang diterbitkan	Dokumen	130.062	493.181.000	135.062	320.000.000	140.062	380.000.000	140.062	430.000.000				
			3 30 2 1 1		Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol Toko Bebas Bea dan Rekomendasi Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol (SIUP-MB) bagi Distributor	Jumlah Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol Toko Bebas Bea dan Rekomendasi Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol (SIUP-MB) bagi Distributor	Dokumen	1	34.760.000	1	10.000.000	1	15.000.000	1	15.000.000				
			3 30 2 1 1 1		Fasilitasi Pemenuhan Komitmen SIUP-MB Toko Bebas Bea dan Rekomendasi SIUP-MB Bagi Distributor melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Jumlah Fasilitasi Pemenuhan Komitmen SIUP-MB Toko Bebas Bea dan Rekomendasi SIUP-MB	unit usaha	1	34.760.000	1	10.000.000	1	15.000.000	1	15.000.000				
			3 30 2 1 2		Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan Bahan Berbahaya Pengecer Terdaftar, Pemeriksaan Sarana Distribusi Bahan Berbahaya, dan Pengawasan Distribusi, Pengemasan dan Pelabelan Bahan Berbahaya di Tingkat Daerah Provinsi	Jumlah Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan Bahan Berbahaya Pengecer Terdaftar, Pemeriksaan Sarana Distribusi Bahan Berbahaya, dan Pengawasan Distribusi, Pengemasan dan Pelabelan Bahan Berbahaya di Tingkat Daerah Provinsi	Dokumen	1	208.421.000	1	10.000.000	1	15.000.000	1	15.000.000				
			3 30 2 1 2 3		Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Pemeriksaan Sarana Distribusi Bahan Berbahaya melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Pemeriksaan Sarana Distribusi Bahan Berbahaya	unit usaha	1	208.421.000	1	10.000.000	1	15.000.000	1	15.000.000				
			3 30 2 1 4		Penerbitan Surat Keterangan Asal (SKA) Bagi Daerah Provinsi yang Telah Ditetapkan Sebagai Instansi Penerbit SKA dan Angka Pengenal Importir (API)	Jumlah SKA dan API yang diterbitkan	Dokumen	130.060	250.000.000	135.060	300.000.000	140.060	350.000.000	140.060	400.000.000				
			3 30 2 1 4 1		Koordinasi dan Sinkronisasi Layanan Penerbitan SKA	Jumlah SKA yang diterbitkan	SKA	130.000	150.000.000	135.000	200.000.000	140.000	225.000.000	140.000	250.000.000				
			3 30 2 1 4 2		Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Penerbitan API melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah Importir yang difasilitasi	Pelaku Usaha	60	100.000.000	60	100.000.000	60	125.000.000	60	150.000.000				
			3 30 3		PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	Pertumbuhan Sarana Distribusi Perdagangan	%		1	338.108.000	1	450.000.000	1	400.000.000	1	450.000.000			
			3 30 3 1 1		Pembangunan dan Pengelolaan Pusat Distribusi Responal dan Pusat Distribusi Provinsi serta Pasar Lelang Komoditas	Jumlah Pengelolaan Pusat Distribusi Responal dan Pusat Distribusi Provinsi serta Pasar Lelang Komoditas	sarana perdagangan	4	338.108.000	4	450.000.000	4	400.000.000	4	450.000.000				

Rencana Strategis Perubahan Ke-II 2019-2024

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	KODE					PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	SATUAN	DATA CAPAIAN PADA AHUN AWAL PERENCANAAN (2020)	2021		2022		2023		2024		KONDISI AKHIR		UNIT KERJA PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
			TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET					Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp				
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18				
			3	30	3	1	1	2	Pembinaan dan Pengendalian Pusat Distribusi Regional dan Pusat Distribusi Provinsi	Jumlah Pusat Distribusi Regional dan Pusat Distribusi Provinsi yang mendapat pembinaan	sarana perdagangan	2	207.716.000	2	250.000.000	2	200.000.000	2	225.000.000			
			3	30	3	1	1	3	Penataan, Pembinaan, dan Pengembangan Pasar Leleng Komoditas	Jumlah Pengembangan Pasar Leleng Komoditas yang mendapatkan pembinaan	sarana perdagangan	2	130.392.000	2	200.000.000	2	200.000.000	2	225.000.000			
			3	30	4				PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING	Tingkat Inflasi Bahan Makanan	%	2	1.878.019.500	2	2.390.000.000	2	2.500.000.000	2	2.580.000.000			
			3	30	4	1	1		Menjamin Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Daerah Provinsi	Prosentase Ketersediaan Bahan Pokok	%	90	16.997.000	90	25.000.000	90	25.000.000	90	30.000.000			
			3	30	4	1	1	1	Koordinasi dan Sinkronisasi Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok di Tingkat Distributor dan Sub Distributor	Jumlah Peserta yang mengikuti koordinasi dan sinkronisasi	orang	195	16.997.000	200	25.000.000	250	25.000.000	300	30.000.000			
			3	30	4	1	2		Pengendalian Harga, Informasi Ketersediaan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang Lintas Kabupaten/Kota yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan	Jumlah Informasi Ketersediaan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang Lintas Kabupaten/Kota yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan	informasi	1	1.723.906.000	1	2.100.000.000	1	2.200.000.000	1	2.250.000.000			
			3	30	4	1	2	1	Penataan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting ARBDA Pelaku Usaha Distribusi Barang Lintas Kabupaten/Kota	Jumlah pasar sasaran pengendalian harga dan distribusi (pasar)	pasar	116	1.661.608.000	116	2.000.000.000	116	2.000.000.000	116	2.000.000.000			
			3	30	4	1	2	2	Operasi Pasar dalam rangka Stabilitas Harga Pangan Pokok yang Dampaknya Beberapa Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah Operasi Pasar	kali	2	62.298.000	2	100.000.000	3	200.000.000	4	250.000.000			
			3	30	4	1	3		Pengawasan Pupuk dan Pestisida Tingkat Daerah Provinsi dalam Melakukan Pelaksanaan Pengadaan, Penyaluran dan Penggunaan Pupuk Bersubsidi di Wilayah Kerjanya	Jumlah Pengawasan Pupuk dan Pestisida Tingkat Daerah Provinsi dalam Melakukan Pelaksanaan Pengadaan, Penyaluran dan Penggunaan Pupuk Bersubsidi di Wilayah Kerjanya	kali	37	137.116.500	37	265.000.000	37	275.000.000	37	300.000.000			
			3	30	4	1	3	1	Pemeriksaan Dokumen Perizinan Kegiatan Distribusi	Jumlah pemeriksaan Perizinan Kegiatan Distribusi	kali	12	20.162.500	12	15.000.000	12	25.000.000	12	50.000.000			
			3	30	4	1	3	2	Pengawasan Pengadaan Pupuk dan Pestisida Tingkat Daerah Provinsi	Jumlah Pengawasan Pengadaan Pupuk dan Pestisida Tingkat Daerah Provinsi	kali	12	17.276.000	12	100.000.000	12	100.000.000	12	100.000.000			
			3	30	4	1	3	3	Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk Bersubsidi	Jumlah Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk Bersubsidi	kali	12	46.078.000	12	100.000.000	12	100.000.000	12	100.000.000			
			3	30	4	1	3	4	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pupuk Bersubsidi dan Pestisida	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pupuk Bersubsidi dan Pestisida	kali	1	53.600.000	1	50.000.000	1	50.000.000	1	50.000.000			
			3	30	5				PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR	Net Ekspor Non Migas	Milyar US\$	1	300.000.000	1	450.000.000	1	525.000.000	1	600.000.000			
			3	30	5	1	1		Penyelenggaraan Promosi Dagang melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang terdapat pada lebih dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota dalam Provinsi	Jumlah Pelaku Usaha yang di fasilitasi Pembinaan, Promosi dan Misi Dagang Produk Ekspor	Pelaku Usaha	98	300.000.000	113	450.000.000	113	525.000.000	113	600.000.000			
			3	30	5	1	1	1	Pameran Dagang Internasional/Nasional	Jumlah Pelaku usaha yang difasilitasi pameran dagang Internasional/Nasional	Pelaku Usaha	4	211.475.000	25	300.000.000	25	350.000.000	30	400.000.000			
			3	30	5	1	1	3	Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan	Jumlah Pelaku Usaha yang difasilitasi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan	Pelaku Usaha	60	34.285.000	65	25.000.000	65	50.000.000	65	50.000.000			

Rencana Strategis Perubahan ke-II 2019-2024

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	KODE				PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	SATUAN	DATA CAPAIAN PADA AHUN AWAL PERENCANAAN (2020)	2021		2022		2023		2024		KONDISI AKHIR		UNIT KERJA PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
											TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp		
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18				
			3	30	5	1	1	4	Peningkatan Citra Produk Ekspor	Jumlah Pelaku Usaha yang difasilitasi Peningkatan Citra Produk Ekspor	Pelaku Usaha		4	24.240.000	4	25.000.000	4	25.000.000	4	50.000.000		
			3	30	5	1	1	5	Pembinaan Pelaku Usaha Ekspor	Jumlah Pelaku usaha yang difasilitasi pembinaan	Pelaku Usaha		30	30.000.000	100	100.000.000	100	100.000.000	125	100.000.000		
	Meningkatnya perlindungan konsumen dan pengamanan perdagangan	Peningkatan barang yang diawasi dan sertifikasi barang beredar									%		-53,86	1		1		1				
			3	30	6				PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN	Presentase Barang Beredar yang diawasi yang sesuai dengan perundang-undangan	%		80	2.217.302.000	80	2.450.000.000	80	2.775.000.000	80	2.900.000.000		
			3	30	6	1			Pelaksanaan Perlindungan Konsumen di Seluruh Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pelaksanaan Perlindungan Konsumen	kali		77	910.540.000	80	800.000.000	80	950.000.000	80	1.000.000.000		
			3	30	6	1	1	1	Pemberdayaan Konsumen dan Kelembagaan Perlindungan Konsumen	Jumlah Konsumen Dan Kelembagaan Perlindungan Konsumen yang dibudayakan (wilker UPT, PK Surabaya)	orang		315		320		350		400			
									Jumlah Konsumen Dan Kelembagaan Perlindungan Konsumen yang dibudayakan (wilker UPT, PK Malang)	orang		200		200		250		300				
									Jumlah Konsumen Dan Kelembagaan Perlindungan Konsumen yang dibudayakan (wilker UPT, PK Jember)	orang		75		100		150		200				
									Jumlah Konsumen Dan Kelembagaan Perlindungan Konsumen yang dibudayakan (wilker UPT, PK Bojonegara)	orang		70		100		150		200				
									Jumlah Konsumen Dan Kelembagaan Perlindungan Konsumen yang dibudayakan (wilker UPT, PK Kediri)	orang		100		100		150		200				
			3	30	6	1	1	2	Peningkatan Hubungan Kerja dengan Lembaga Perlindungan Konsumen	Presentase Penanganan pengaduan konsumen (wilker UPT, PK Surabaya)	%		100		100		100		100			
									Presentase Penanganan pengaduan konsumen (wilker UPT, PK Malang)	%		88		88		88		88				
									Presentase Penanganan pengaduan konsumen (wilker UPT, PK Jember)	%		100		100		100		100				
									Presentase Penanganan pengaduan konsumen (wilker UPT, PK Bojonegara)	%		40		80		80		80				
									Presentase Penanganan pengaduan konsumen (wilker UPT, PK Kediri)	%		80		80		80		80				
			3	30	6	1	1	3	Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan dan Penyelesaian Sengketa Konsumen	Jumlah Koordinasi Dan Sinkronisasi Penanganan Dan Penyelesaian Sengketa Konsumen (wilker UPT, PK Surabaya)	kali		359.832.000		600.000.000		750.000.000		800.000.000			
											kali		7		10		12		12			

Rencana Strategis Perubahan Ke-II 2019-2024

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	KODE	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	SATUAN	DATA CAPAIAN PADA AHUN AWAL PERENCANAAN (2020)	2021		2022		2023		2024		KONDISI AKHIR		UNIT KERJA PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
								TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
					Jumlah Koordinasi Dan Sinkronisasi Perencanaan Dan Penyelesaian Sengketa Konsumen (wilker UPT, PK Malang)	kali		24		25		27		27				
					Jumlah Koordinasi Dan Sinkronisasi Perencanaan Dan Penyelesaian Sengketa Konsumen (wilker UPT, PK Jember)	kali		6		10		12		12				
					Jumlah Koordinasi Dan Sinkronisasi Perencanaan Dan Penyelesaian Sengketa Konsumen (wilker UPT, PK Blompong)	kali		30		30		32		32				
					Jumlah Koordinasi Dan Sinkronisasi Perencanaan Dan Penyelesaian Sengketa Konsumen (wilker UPT, PK Kediri)	kali		27		30		32		32				
			3 30 6 1 2	Pelaksanaan Penjualan dan Sertifikasi Mutu Produk di Seluruh Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah sertifikat Penjualan dan Sertifikasi Mutu Produk	Sertifikat		6200	957.668.000	7000	1.050.000.000	8000	1.100.000.000	9000	1.150.000.000			
			3 30 6 1 2 1	Jumlah Sertifikat yang diterbitkan				498.789.000		600.000.000		650.000.000		700.000.000				
					Jumlah Sertifikat yang diterbitkan di UPT PSMB LT Jember	Sertifikat		3700		4000		4500		5000				
					Jumlah Sertifikat yang diterbitkan di UPT PSMB LT Surabaya	Sertifikat		2500		3000		3500		4000				
			3 30 6 1 2 2	Jumlah Akreditasi Layanan Pengujian				193.300.000		200.000.000		200.000.000		200.000.000				
					Jumlah Akreditasi Layanan Pengujian di UPT PSMB LT Jember	Akreditasi		1		1		1		1				
					Jumlah Akreditasi Layanan Pengujian di UPT PSMB LT Surabaya	Akreditasi		1		1		1		1				
			3 30 6 1 2 3	Jumlah Akreditasi Layanan Sertifikasi				265.579.000		250.000.000		250.000.000		250.000.000				
					Jumlah Akreditasi Layanan Sertifikasi di UPT PSMB LT Jember	Akreditasi		3		3		3		3				
					Jumlah Akreditasi Layanan Sertifikasi di UPT PSMB LT Surabaya	Akreditasi		3		3		3		3				
			3 30 6 1 2 4	Pengembangan Layanan Kalibrasi														
					Jumlah Pengembangan layanan di UPT PSMB LT Jember	layanan		0										
					Jumlah Pengembangan layanan di UPT PSMB LT Surabaya	layanan		0										
			3 30 6 1	Pelaksanaan Pengawasan Barang Beredar dan/atau Jasa di Seluruh Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah barang/jasa yang diawasi	barang/jasa		500.000	349.094.000	500.000	600.000.000	500.000	725.000.000	500.000	750.000.000			
			3 30 6 1 3 1	Peningkatan Kapasitas dan Pelaksanaan Pengawasan Barang Beredar dan/atau Jasa sesuai Parameter Ketertarikan Perlindungan Konsumen				195.470.000		500.000.000		600.000.000		600.000.000				

Rencana Strategis Perubahan ke-II 2019-2024

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	KODE	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	SATUAN	DATA CAPAIAN PADA AHUN AWAL PERENCANAAN (2020)	2021		2022		2023		2024		KONDISI AKHIR		UNIT KERJA PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
								TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
					Jumlah Barang Beredar dan/atau Jasa Sesuai Parameter Ketentuan Perlindungan Konsumen (wilker UPT. PK Surabaya)	barang/jasa		100.000		150.000		200.000		250.000				
					Jumlah Barang Beredar dan/atau Jasa Sesuai Parameter Ketentuan Perlindungan Konsumen (wilker UPT. PK Malang)	barang/jasa		100.000		150.000		200.000		250.000				
					Jumlah Barang Beredar dan/atau Jasa Sesuai Parameter Ketentuan Perlindungan Konsumen (wilker UPT. PK Jember)	barang/jasa		100.000		150.000		200.000		250.000				
					Jumlah Barang Beredar dan/atau Jasa Sesuai Parameter Ketentuan Perlindungan Konsumen (wilker UPT. PK Bojonegara)	barang/jasa		100.000		150.000		200.000		250.000				
					Jumlah Barang Beredar dan/atau Jasa Sesuai Parameter Ketentuan Perlindungan Konsumen (wilker UPT. PK Kediri)	barang/jasa		100.000		150.000		200.000		250.000				
			3	30	6	1	3	2	Facilitasi Penanganan terhadap Pelanggaran Atas Ketentuan Perlindungan Konsumen	penanganan		153.624.000		100.000.000		125.000.000		150.000.000
					Jumlah Penanganan terhadap Pelanggaran Atas Ketentuan Perlindungan Konsumen (wilker UPT. PK Surabaya)	penanganan		25		30		35		40				
					Jumlah Penanganan terhadap Pelanggaran Atas Ketentuan Perlindungan Konsumen (wilker UPT. PK Malang)	penanganan		20		25		30		35				
					Jumlah Penanganan terhadap Pelanggaran Atas Ketentuan Perlindungan Konsumen (wilker UPT. PK Jember)	penanganan		25		30		35		40				
					Jumlah Penanganan terhadap Pelanggaran Atas Ketentuan Perlindungan Konsumen (wilker UPT. PK Bojonegara)	penanganan		14		15		20		25				
					Jumlah Penanganan terhadap Pelanggaran Atas Ketentuan Perlindungan Konsumen (wilker UPT. PK Kediri)	penanganan		14		15		20		25				
	Meningkatnya PORB sektor Perdagangan	Nilai PORB PORB Kategori Perdagangan Besar dan Eceran, Reparat Mobil dan Sepeda Motor					Rp. Triliun	412,11	425	450	475	500						
			3	30	7	1	1	PROGRAM PENGLINAAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI	Jumlah Pelaku usaha yang difasilitasi penggunaan dan Pemasaran Produk Dalam Negeri	Pelaku Usaha	90	5.290.691.500	90	6.290.000.000	90	7.385.652.000	90	7.547.651.000
			3	30	7	1	1	Pelaksanaan Promosi Produk Dalam Negeri	Jumlah Pelaksanaan Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri	Kali	6	5.066.715.500	6	5.840.000.000	7	6.935.652.000	7	7.097.651.000
			3	30	7	1	1	Facilitasi Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Provinsi	Jumlah pelaku usaha yang mendapatkan fasilitas Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri	Pelaku Usaha	40	5.066.715.500	40	5.840.000.000	50	6.935.652.000	50	7.097.651.000
			3	30	7	1	2	Pelaksanaan Pemasaran Penggunaan Produk Dalam Negeri	Jumlah pelaku usaha yang mendapatkan fasilitas Pemasaran Penggunaan Produk Dalam Negeri	Pelaku Usaha			40	-				
			3	30	7	1	2	Facilitasi Pemasaran Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Provinsi	Jumlah pelaku usaha yang mendapatkan fasilitas Pemasaran Penggunaan Produk Dalam Negeri	Pelaku Usaha			40					
			3	30	7	1	3	Pelaksanaan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri	Jumlah Pelaksanaan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri	kali	2	223.976.000		450.000.000		450.000.000		450.000.000

Rencana Strategis Perubahan Ke-II 2019-2024

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	KODE						PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	SATUAN	DATA CAPAIAN PADA AHUN AWAL PERENCANAAN (2020)	2021		2022		2023		2024		KONDISI AKHIR		UNIT KERJA PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
			TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp					TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp					
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18					
			3	30	7	1	3	2	Sosialisasi Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri	Jumlah peserta Sosialisasi Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri	orang	50	111.976.000	50	150.000.000	50	150.000.000	50	150.000.000				
			3	30	7	1	3	3	Peningkatan Sistem dan Jaringan Informasi Perdagangan	Jumlah Sistem dan Jaringan Informasi Perdagangan	sistem	5	112.000.000	5	300.000.000	5	300.000.000	5	300.000.000				
Meningkatnya Nilai Tambah Produksi	Meningkatnya PORB sektor industri pengolahan	Nilai PORB industri pengolahan							Pertumbuhan PORB Sektor Industri Pengolahan	%	-2,06	3,18		5,02		5,93		7,46		7,46			
									Rp. Triliun	Rp.	705,79	700		725		750		775					
			3	31	2				PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	Prosentase peningkatan unit usaha industri	%	1	16.011.835.000	1,1	11.315.000.000	5	11.510.000.000	5	11.560.000.000				
			3	31	2	1	1		Penyusunan, Penerapan, dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Provinsi	Jumlah Dokumen Pembangunan Industri	dukumen	2	16.011.835.000	2	11.315.000.000		11.510.000.000		11.560.000.000				
			3	31	2	1	1	2	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Kebijakan Peningkatan Pengembangan, Penyebaran dan Perwilayahan Industri	Jumlah Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Kebijakan Peningkatan Pengembangan, Penyebaran dan Perwilayahan Industri dan perdagangan	kali	5	360.000.000	6	400.000.000	6	450.000.000	7	500.000.000				
			3	31	2	1	1	3	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	Jumlah Pelaku Industri Agro yang difasilitasi	Pelaku Industri		15.301.835.000		10.865.000.000		11.000.000.000		11.000.000.000				
									Jumlah Pelaku Industri Non Agro yang difasilitasi	Pelaku Industri		225		250		300		325					
									Jumlah jasa pelayanan UPT Aneka Industri dan Kerajinan	Jasa		470		470		470		470					
									Jumlah industri yang mendapatkan Pengembangan Teknis Aneka Industri dan kerajinan	Pelaku Industri		25		50		75		100					
									Jumlah jasa pelayanan UPT Industri makanan minuman dan kemasan	Jasa		450		450		450		450					
									Jumlah industri yang mendapatkan Pengembangan Teknis Industri makanan minuman dan kemasan	Pelaku Industri		100		125		150		175					
									Jumlah jasa pelayanan UPT Industri Logam dan Perekayasaan	Jasa		265		265		265		265					
									Jumlah industri yang mendapatkan Pengembangan Teknis Industri Logam dan Perekayasaan	Pelaku Industri		248		275		300		325					
									Jumlah jasa pelayanan UPT Industri Kayu dan Produk Kayu	Jasa		700		700		700		700					
									Jumlah industri yang mendapatkan Pengembangan Teknis Industri Kayu dan Produk Kayu	Pelaku Industri		100		125		150		175					
									Jumlah jasa pelayanan UPT Industri Kulit dan Produk Kulit	Jasa		1.500		1.500		1.500		1.500					

Rencana Strategis Perubahan ke-II 2019-2024

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	KODE	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	SATUAN	DATA CAPAIAN PADA AHUN AWAL PERENCANAAN (2020)	2021		2022		2023		2024		KONDISI AKHIR		UNIT KERJA PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
								TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
					Jumlah Industri yang mendapatkan Pengembangan Teknis Industri Kulit dan Produk Kulit	Pelaku Industri		100		125		150		175				
					Jumlah Pelaku Industri yang mendapatkan pelayanan Mutu Produk Industri dan dan Pelatihan Desain Produk Industri di wilayah kerja UPT PMPD-TK Surabaya	Pelaku Industri		526		550		600		650				
					Jumlah Pelaku Industri yang mendapatkan pelayanan Mutu Produk Industri dan dan Pelatihan Desain Produk Industri di wilayah kerja UPT PMPD-TK Malang	Pelaku Industri		1.002		600		650		700				
			3 31 2 1 1 5	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	Jumlah Dokumen Terkait KHT	Dokumen		2	300.000.000									
			3 31 2 1 1 6	Evaluasi terhadap Pelaksanaan Rencana Pembangunan Industri	Jumlah dokumen Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Industri yang disusun	dokumen		1	50.000.000	1	50.000.000	1	60.000.000	1	60.000.000			
			3 31 3	PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI	Prosentase peningkatan pengendalian izin usaha industri	%		10	50.000.000	10	40.000.000		40.000.000		40.000.000			
			3 31 3 1 1	Heneraian Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI), dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Provinsi	Jumlah Heneraian Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI), dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Provinsi	unit usaha		24	50.000.000	24	40.000.000	24	40.000.000	24	40.000.000			
			3 31 3 1 1	Facilitasi Pemenuhan Komitmen perolehan IUI, IPUI, IUKI, dan IPKI Kewenangan Provinsi dalam Sistem Informasi Industri Nasional (SIIINAS) yang Terintegrasi dengan Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah Industri yang difasilitasi Pemenuhan Komitmen perolehan IUI, IPUI, IUKI, dan IPKI	unit usaha		12	25.000.000	12	20.000.000	12	20.000.000	12	20.000.000			
			3 31 3 1 2	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Perizinan di Bidang Industri dalam Lingkup IUI, IPUI, IUKI, dan IPKI Kewenangan Provinsi	Jumlah industri yang diawasi	unit usaha		12	25.000.000	12	20.000.000	12	20.000.000	12	20.000.000			
			3 31 4	PROGRAM PENGELOAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL	Persentase Industri yang telah terdaftar dalam SIIINAS	%		20	100.000.000	20	110.000.000	20	150.000.000	20	150.000.000			
			3 31 4 1 1	Penyediaan Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI, dan IPKI Kewenangan Provinsi Berbasis Sistem Informasi Industri Nasional (SIIINAS)	Jumlah Penyediaan Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI, dan IPKI Kewenangan Provinsi Berbasis Sistem Informasi Industri Nasional (SIIINAS)	Informasi		2	100.000.000	2	110.000.000	2	150.000.000	2	150.000.000			
			3 31 4 1 1	Facilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Provinsi melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIIINAS)	Jumlah data industri yang dianalisa	dokumen		4	25.000.000	4	40.000.000	4	50.000.000	4	50.000.000			
			3 31 4 1 2	Diseminasi dan Publikasi Data Informasi dan Analisis Industri Provinsi melalui SIIINAS	Jumlah Diseminasi dan Publikasi Data Informasi industri	kegiatan		2	50.000.000	2	50.000.000	2	50.000.000	2	50.000.000			
			3 31 4 1 3	Pemantauan dan Evaluasi Kepuasan Perusahaan Industri dan Perusahaan Kawasan Industri Lingkup Provinsi dalam Penyampalan Data ke SIIINAS	Jumlah Industri yang dipantau	unit usaha		12	25.000.000	12	20.000.000	12	50.000.000	12	50.000.000			
	Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah	Nisi sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah					90,24	85,4		86,6		86,8		87				

Rencana Strategis Perubahan Ke-II 2019-2024

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	KODE	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	SATUAN	DATA CAPAIAN PADA AHUN AWAL PERENCANAAN (2020)	2021		2022		2023		2024		KONDISI AKHIR		UNIT KERJA PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
								TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
				PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase indikator program yang tercapai	%		88,5	106.299.846.000	88,5	111.884.205.000	88,5	112.257.979.000	88,5	113.258.010.000			
					Persentase realisasi anggaran	%		93		93		93		93				
					Indeks profesionalitas ASN	%		90		90		90		90				
		X	XX 01 1 1 1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	dokumen		15	697.096.000	20	911.574.000	20	911.574.000	20	911.574.000			
		X	XX 01 1 1 1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen perencanaan dan anggaran perangkat daerah	dokumen		11	379.292.000	7	486.574.000	7	486.574.000	7	486.574.000			
		X	XX 01 1 1 2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen perencanaan perangkat daerah	dokumen				1	5.000.000	1	5.000.000	1	5.000.000			
		X	XX 01 1 1 3	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah dokumen RKA	dokumen				1	5.000.000	1	5.000.000	1	5.000.000			
		X	XX 01 1 1 4	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah dokumen RKA Perubahan	dokumen				1	5.000.000	1	5.000.000	1	5.000.000			
		X	XX 01 1 1 5	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah dokumen DPA	dokumen				1	5.000.000	1	5.000.000	1	5.000.000			
		X	XX 01 1 1 6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah dokumen DPA Perubahan	dokumen				5	5.000.000	5	5.000.000	5	5.000.000			
		X	XX 01 1 1 7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen capaian kinerja	dokumen		4	317.804.000	4	400.000.000	4	400.000.000	4	400.000.000			
		X	XX 01 1 2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah laporan pertanggungjawaban keuangan	laporan		12	71.779.741.200	12	74.957.631.000	12	75.941.405.000	12	77.091.436.000			
		X	XX 01 1 2 01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah laporan pembayaran gaji dan tunjangan	laporan		12	69.538.383.000	12	72.251.631.000	12	73.335.405.000	12	74.435.436.000			
		X	XX 01 1 2 02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah laporan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	laporan		12	1.717.536.000	12	1.850.000.000	12	1.750.000.000	12	1.800.000.000			
		X	XX 01 1 2 03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah laporan verifikasi penatausahaan	laporan		12	413.672.200	12	750.000.000	12	750.000.000	12	750.000.000			
		X	XX 01 1 2 04	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Laporan akuntansi perangkat daerah	laporan		12	83.850.000	12	85.000.000	12	85.000.000	12	85.000.000			
		X	XX 01 1 2 05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah dokumen angan SKPD	dokumen		2	7.000.000	2	7.000.000	2	7.000.000	2	7.000.000			
		X	XX 01 1 2 06	Pengelolaan dan Penyajian Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah dokumen tanggapan atas LHP	dokumen				1	2.000.000	1	2.000.000	1	2.000.000			
		X	XX 01 1 2 07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	Jumlah laporan keuangan	laporan		12	16.700.000	12	10.000.000	12	10.000.000	12	10.000.000			
		X	XX 01 1 2 08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah laporan prognosis	laporan		1	2.600.000	1	2.000.000	1	2.000.000	1	2.000.000			

Rencana Strategis Perubahan ke-II 2019-2024

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	KODE				PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	SATUAN	DATA CAPAIAN PADA AHUN AWAL PERENCANAAN (2020)	2021		2022		2023		2024		KONDISI AKHIR		UNIT KERJA PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
											TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	
1	2		3				4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
			X	XX	01	1	3	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah dokumen ketatausahaan dan kepegawain	dokumen	18	133.245.000	22	145.000.000	22	145.000.000	22	145.000.000			
			X	XX	01	1	3	1	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah laporan perencana kebutuhan BMD SKPD	laporan		20.000.000	4	20.000.000	4	20.000.000				
			X	XX	01	1	3	2	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen	dokumen	1	40.000.000	1	20.000.000	1	20.000.000	1	20.000.000		
			X	XX	01	1	3	3	Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah laporan	laporan	1	53.625.000	1	50.000.000	1	50.000.000	1	50.000.000		
			X	XX	01	1	3	4	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Kegiatan	kegiatan	1	10.000.000	1	15.000.000	1	15.000.000	1	15.000.000		
			X	XX	01	1	3	5	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Kegiatan dan Laporan	laporan	12	9.620.000	12	20.000.000	12	20.000.000	12	20.000.000		
			X	XX	01	1	3	6	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan	Laporan	2	10.000.000	2	10.000.000	2	10.000.000	2	10.000.000		
			X	XX	01	1	3	7	Pemeliharaan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen	dokumen	1	10.000.000	1	10.000.000	1	10.000.000	1	10.000.000		
			X	XX	01	1	5	Administrasi Kepegawain Perangkat Daerah	Jumlah dokumen ketatausahaan dan kepegawain	Laporan	12	386.210.000	12	345.000.000	12	345.000.000	12	345.000.000			
			X	XX	01	1	5	1	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Jumlah sarana dan prasana yg terpenuhi	paket	1	103.400.000	1	100.000.000	1	100.000.000	1	100.000.000		
			X	XX	01	1	5	3	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawain	Jumlah laporan pengolahan administrasi kepegawain	laporan	12	67.500.000	12	50.000.000	12	50.000.000	12	50.000.000		
			X	XX	01	1	5	4	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawain	Jumlah laporan data pegawai	laporan	12	20.000.000	12	25.000.000	12	25.000.000	12	25.000.000		
			X	XX	01	1	5	5	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah laporan SKP yang tepat waktu	laporan	12	79.850.000	12	50.000.000	12	50.000.000	12	50.000.000		
			X	XX	01	1	5	9	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah laporan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi Jumlah pegawai yang mendapatkan pendidikan dan pelatihan	laporan	12	40.610.000	1	50.000.000	12	50.000.000	12	50.000.000		
			X	XX	01	1	5	10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah sosialisasi yang dilaksanakan	kali	1	26.425.000	1	20.000.000	1	20.000.000	1	20.000.000		
			X	XX	01	1	5	11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah bintek yang dilaksanakan	kali	2	48.425.000	2	50.000.000	2	50.000.000	2	50.000.000		
			X	XX	01	1	6	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Barang dan Jasa	laporan	11	3.080.151.956	11	3.245.000.000	11	3.295.000.000	11	3.295.000.000			
			X	XX	01	1	6	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah paket pengadaan	paket	1	266.369.800	1	250.000.000	1	300.000.000	1	300.000.000		
			X	XX	01	1	6	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah paket pengadaan	paket	1	195.119.856	1	200.000.000	1	200.000.000	1	200.000.000		
			X	XX	01	1	6	3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah paket pengadaan	paket	1	145.365.300	1	150.000.000	1	150.000.000	1	150.000.000		

Rencana Strategis Perubahan Ke-II 2019-2024

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	KODE				PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	SATUAN	DATA CAPAIAN PADA AHUN AWAL PERENCANAAN (2020)	2021		2022		2023		2024		KONDISI AKHIR		UNIT KERJA PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
											TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	
1	2		3				4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
			X	XX	01	1	6	4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah paket pengadaan	paket	1	739.345.100	1	750.000.000	1	750.000.000	1	750.000.000		
			X	XX	01	1	6	5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah paket pengadaan	paket	1	156.884.400	1	150.000.000	1	150.000.000	1	150.000.000		
			X	XX	01	1	6	6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah paket pengadaan	paket	1	20.305.000	1	20.000.000	1	20.000.000	1	20.000.000		
			X	XX	01	1	6	7	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah paket pengadaan	paket	1	50.000.000	1	50.000.000	1	50.000.000	1	50.000.000		
			X	XX	01	1	6	8	Facilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah paket pengadaan	kali	10	85.277.000	10	80.000.000	10	80.000.000	10	80.000.000		
			X	XX	01	1	6	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan	laporan	15	1.326.485.500	1	1.500.000.000	15	1.500.000.000	15	1.500.000.000		
			X	XX	01	1	6	10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah daftar arsip aktif, arsip inaktif, arsip vital	dokumen	1	10.000.000	1	10.000.000	1	10.000.000	1	10.000.000		
			X	XX	01	1	6	11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Sistem Informasi yang didukung	paket	2	85.000.000	2	85.000.000	2	85.000.000	2	85.000.000		
			X	XX	01	1	7		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	laporan	1	234.550.000	1	1.570.000.000	1	1.160.000.000	1	960.000.000		
			X	XX	01	1	7	1	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan	unit			1	550.000.000						
			X	XX	01	1	7	2	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan	unit			3	60.000.000						
			X	XX	01	1	7	4	Pengadaan Alat Angkutan Darat Tak Bermotor	Jumlah Kendaraan	unit										
			X	XX	01	1	7	5	Pengadaan Mebel	Jumlah Mebel	set	1	52.500.000	1	60.000.000	1	60.000.000	1	60.000.000		
			X	XX	01	1	7	6	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya	paket	5	182.050.000	3	450.000.000	5	550.000.000	5	450.000.000		
			X	XX	01	1	7	10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya	unit			3	450.000.000	3	550.000.000	2	450.000.000		
			X	XX	01	1	8		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	laporan	1	27.338.182.244	1	27.950.000.000	1	28.050.000.000	1	28.050.000.000		
			X	XX	01	1	8	1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah pengiriman dokumen	paket	15	25.469.000	15	25.000.000	15	25.000.000	15	25.000.000		
			X	XX	01	1	8	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	bulan	12	3.711.376.184	12	3.800.000.000	12	3.900.000.000	12	3.900.000.000		
			X	XX	01	1	8	2	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah paket pelaksanaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	paket			5	125.000.000	5	125.000.000	5	125.000.000		
			X	XX	01	1	8	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah paket pelayanan umum kantor	paket	15	23.601.337.060	15	24.000.000.000	15	24.000.000.000	15	24.000.000.000		

Rencana Strategis Perubahan ke-II 2019-2024

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	KODE						PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	SATUAN	DATA CAPAIAN PADA AWAL PERENCANAAN (2020)	2021		2022		2023		2024		KONDISI AKHIR		UNIT KERJA PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
													TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	
1	2		3						4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
			X	XX	01	1	9	1	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah laporan aset tetap yang terpelihara	laporan		1	2.650.669.600	1	2.760.000.000	1	2.410.000.000	1	2.460.000.000			
			X	XX	01	1	9	1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Jasa	paket		14	58.802.000	14	60.000.000	14	60.000.000	14	60.000.000			
			X	XX	01	1	9	2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perorangan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Jasa	paket		14	749.402.200	14	800.000.000	14	750.000.000	14	750.000.000			
			X	XX	01	1	9	5	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang dipelihara	paket		1	40.000.000	1	50.000.000	1	50.000.000	1	50.000.000			
			X	XX	01	1	9	6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang dipelihara	paket		10	308.022.400	10	400.000.000	10	400.000.000	10	400.000.000			
			X	XX	01	1	9	8	Pemeliharaan Aset Tak Berwujud	Jumlah Aset Tak Berwujud yang dipelihara	paket		1	25.000.000	2	50.000.000	2	50.000.000	2	50.000.000			
			X	XX	01	1	9	9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung yang dipelihara	paket		5	778.000.000	5	800.000.000	4	600.000.000	4	750.000.000			
			X	XX	01	1	9	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana yang dipelihara	paket		10	691.443.000	10	600.000.000	4	500.000.000	4	400.000.000			
													132.978.983.000		135.699.205.000		137.923.631.000		139.515.661.000				

Rencana Strategis Perubahan Ke-II 2019-2024

Tabel 6.3 Program dan kegiatan tahun 2021 sampai dengan tahun 2024 (Penyesuaian Kepmendagri 050/5889/2021)

PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	SATUAN	DATA CAPAIAN PADA AHUN AWAL PERENCANAAN (2020)	2021		2022		2023		2024		KONDISI AKHIR		UNIT KERJA PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	
4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	Persentase Pertumbuhan PDRB Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	%	-5,74	0,14		3,08		4,69		7,18		7,18		
		Rp. Triliun	412,11	425		450		475		500		7,46		
PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN	Jumlah Ijin yang diterbitkan	Dokumen		130.062	493.181.000	135.062	320.000.000	135.005	457.116.000	135.005	457.116.000			
Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol Toko Bebas Bea dan Rekomendasi Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol (SIUP-MB) bagi Distributor	Jumlah Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol Toko Bebas Bea dan Rekomendasi Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol (SIUP-MB) bagi Distributor	Dokumen		1	34.760.000	1	10.000.000	1	18.150.000	1	18.150.000			
Fasilitasi Pemenuhan Komitmen SIUP-MB Toko Bebas Bea dan Rekomendasi SIUP-MB Bagi Distributor melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Jumlah Fasilitasi Pemenuhan Komitmen SIUP-MB Toko Bebas Bea dan Rekomendasi SIUP-MB	unit usaha		1	34.760.000	1	10.000.000							
	Jumlah SIUP-MB Toko Bebas Bea dan Surat Rekomendasi SIUP-MB bagi Distributor yang Diterbitkan melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Dokumen						2	18.150.000	2	18.150.000			
Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan Bahan Berbahaya Pengecer Terdaftar, Pemeriksaan Sarana Distribusi Bahan Berbahaya, dan Pengawasan Distribusi, Pengemasan dan Pelabelan Bahan Berbahaya di Tingkat Daerah Provinsi	Jumlah Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan Bahan Berbahaya Pengecer Terdaftar, Pemeriksaan Sarana Distribusi Bahan Berbahaya, dan Pengawasan Distribusi, Pengemasan dan Pelabelan Bahan Berbahaya di Tingkat Daerah Provinsi	Dokumen		1	208.421.000	1	10.000.000	1	38.966.000	1	38.966.000			
Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Pemeriksaan Sarana Distribusi Bahan Berbahaya melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Pemeriksaan Sarana Distribusi Bahan Berbahaya	unit usaha		1	208.421.000	1	10.000.000							
	Jumlah Pemenuhan Komitmen Pemeriksaan Sarana Distribusi Bahan Berbahaya Pedagang Besar/Distributor Bahan Berbahaya sebagai Lampiran Surat Rekomendasi Perdagangan Besar/Distributor Bahan Berbahaya melalui Online Single Submission	Dokumen						5	38.966.000	5	38.966.000			
Penerbitan Surat Keterangan Asal (SKA) Bagi Daerah Provinsi yang Telah Ditetapkan Sebagai Instansi Penerbit SKA dan Angka Pengenal Importir (API)	Jumlah SKA dan API yang diterbitkan	Dokumen		130.060	250.000.000	135.060	300.000.000	135.003	400.000.000	135.003	400.000.000			
Koordinasi dan Sinkronisasi Layanan Penerbitan SKA	Jumlah SKA yang diterbitkan	SKA		130.000	150.000.000	135.000	200.000.000							
	Jumlah Dokumen Penerbitan Surat Keterangan Asal	Dokumen						135.000	200.000.000	135.000	200.000.000			
Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Penerbitan API melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah Importir yang difasilitasi	Pelaku Usaha		60	100.000.000	60	100.000.000							
	Jumlah Dokumen Angka Pengenal Importir yang Diterbitkan melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Dokumen						3	200.000.000	3	200.000.000			
PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	Pertumbuhan Sarana Distribusi Perdagangan	%		1	338.108.000	1	450.000.000	1	263.218.000	1	263.218.000			

Rencana Strategis Perubahan ke-II 2019-2024

PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	SATUAN	DATA CAPAIAN PADA AHUN AWAL PERENCANAAN (2020)	2021		2022		2023		2024		KONDISI AKHIR		UNIT KERJA PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	
4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Pembangunan dan Pengelolaan Pusat Distribusi Regional dan Pusat Distribusi Provinsi serta Pasar Lelang Komoditas	Jumlah Pengelolaan Pusat Distribusi Regional dan Pusat Distribusi Provinsi serta Pasar Lelang Komoditas	sarana perdagangan		4	338.108.000	4	450.000.000	4	263.218.000	4	263.218.000			
Pembinaan dan Pengendalian Pusat Distribusi Regional dan Pusat Distribusi Provinsi	Jumlah Pusat Distribusi Regional dan Pusat Distribusi Provinsi yang mendapat pembinaan	sarana perdagangan		2	207.716.000	2	250.000.000							
	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Pusat Distribusi Regional dan Pusat Distribusi Provinsi	Laporan						4	75.410.000	4	75.410.000			
Penataan, Pembinaan, dan Pengembangan Pasar Lelang Komoditas	Jumlah Pengembangan Pasar Lelang Komoditas yang mendapatkan pembinaan	sarana perdagangan		2	130.392.000	2	200.000.000							
	Jumlah Pengguna Pasar Lelang Komoditas yang Berpartisipasi	Orang						2	187.808.000	2	187.808.000			
PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING	Tingkat Inflasi Bahan Makanan	%		2	1.878.019.500	2	2.390.000.000	2	1.587.621.600	2	1.587.621.600			
Menjamin Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Daerah Provinsi	Prosentase Ketersediaan Bahan Pokok	%		90	16.997.000	90	25.000.000	90	9.060.000	90	9.060.000			
Koordinasi dan Sinkronisasi Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok di Tingkat Distributor dan Sub Distributor	Jumlah Peserta yang mengikuti koordinasi dan sinkronisasi	orang		195	16.997.000	200	25.000.000							
	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok di Tingkat Distributor dan Sub Distributor	Laporan						1	9.060.000	1	9.060.000			
Pengendalian Harga, Informasi Ketersediaan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang Lintas Kabupaten/Kota yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan	Jumlah Informasi Ketersediaan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang Lintas Kabupaten/Kota yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan	informasi		1	1.723.906.000	1	2.100.000.000	1	1.543.191.600	1	1.543.191.600			
Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting APBDe Pelaku Usaha Distribusi Barang Lintas Kabupaten/Kota	Jumlah pasar sasaran pengendalian harga dan distribusi (pasar)	pasar		116	1.661.608.000	116	2.000.000.000							
	Jumlah Laporan Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang Lintas Kabupaten/Kota	Laporan						12	1.062.860.000	12	1.062.860.000			
Operasi Pasar dalam rangka Stabilitas Harga Pangan Pokok yang Dampaknya Beberapa Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah Operasi Pasar	kali		2	62.298.000	2	100.000.000							
	Jumlah Laporan Pelaksanaan Operasi Pasar dalam Rangka Stabilitas Harga Pangan Pokok yang Dampaknya Beberapa Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Laporan						11	480.331.600	11	480.331.600			
Pengawasan Pupuk dan Pestisida Tingkat Daerah Provinsi dalam Melakukan Pelaksanaan Pengadaan, Penyaluran dan Penggunaan Pupuk Bersubsidi di Wilayah Kerjanya	Jumlah Pengawasan Pupuk dan Pestisida Tingkat Daerah Provinsi dalam Melakukan Pelaksanaan Pengadaan, Penyaluran dan Penggunaan Pupuk Bersubsidi di Wilayah Kerjanya	kali		37	137.116.500	37	265.000.000	37	35.370.000	37	35.370.000			
Pemeriksaan Dokumen Perizinan Kegiatan Distribusi	Jumlah pemeriksaan Perizinan Kegiatan Distribusi	kali		12	20.162.500	12	15.000.000							
	Jumlah Laporan Pemeriksaan Kegiatan Distribusi	Laporan						1	9.240.000	1	9.240.000			
Pengawasan Pengadaan Pupuk dan Pestisida Tingkat Daerah Provinsi	Jumlah Pengawasan Pengadaan Pupuk dan Pestisida Tingkat Daerah Provinsi	kali		12	17.276.000	12	100.000.000							
	Jumlah Laporan Pengawasan Pengadaan Pupuk dan Pestisida Tingkat Daerah Provinsi	Laporan						1	9.240.000	1	9.240.000			

Rencana Strategis Perubahan Ke-II 2019-2024

PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	SATUAN	DATA CAPAIAN PADA AHUN AWAL PERENCANAAN (2020)	2021		2022		2023		2024		KONDISI AKHIR		UNIT KERJA PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	
4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk Bersubsidi	Jumlah Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk Bersubsidi	kali		12	46.078.000	12	100.000.000							
	Jumlah Laporan Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk Bersubsidi dengan Realisasi Minimal 90%	Laporan						1	9.240.000	1	9.240.000			
Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pupuk Bersubsidi dan Pestisida	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pupuk Bersubsidi dan Pestisida	kali		1	53.600.000	1	50.000.000							
	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pupuk Bersubsidi dan Pestisida	Laporan						1	7.650.000	1	7.650.000			
PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR	Net Ekspor Non Migas	Milyar US\$		1	300.000.000	1	450.000.000	1	200.000.000	1	200.000.000			
Penyelenggaraan Promosi Dagang melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang terdapat pada lebih dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota dalam Provinsi	Jumlah Pelaku Usaha yang di fasilitasi Pembinaan, Promosi dan Misi Dagang Produk Ekspor	Pelaku Usaha		98	300.000.000	113	450.000.000	113	200.000.000	113	200.000.000			
	Pameran Dagang Internasional/Nasional	Pelaku Usaha		4	211.475.000	25	300.000.000							
	Jumlah Pelaku Usaha yang Difasilitasi dalam Pameran Dagang	Pelaku Usaha						2	106.801.000	2	106.801.000			
Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan	Jumlah Pelaku Usaha yang difasilitasi Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan	Pelaku Usaha		60	34.285.000	65	25.000.000							
	Jumlah Pelaku Usaha yang Difasilitasi dalam Misi Dagang Produk Ekspor Unggulan	Pelaku Usaha						80	28.705.000	80	28.705.000			
Peningkatan Citra Produk Ekspor	Jumlah Pelaku Usaha yang difasilitasi Peningkatan Citra Produk Ekspor	Pelaku Usaha		4	24.240.000	4	25.000.000							
	Jumlah Produk Unggulan Ekspor Daerah yang Disusun menjadi Materi Promosi	Produk						120	32.205.000	120	32.205.000			
Pembinaan Pelaku Usaha Ekspor	Jumlah Pelaku usaha yang difasilitasi pembinaan	Pelaku Usaha		30	30.000.000	100	100.000.000							
	Jumlah Pelaku Usaha Ekspor yang Dibina	Pelaku Usaha						120	32.289.000	120	32.289.000			
	%		-53,86	1		1		1		1				
PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN	Prosentase Barang Beredar yang diawasi yang sesuai dengan perundang-undangan	%		80	2.217.302.000	80	2.450.000.000	80	2.451.258.974	80	2.451.258.974			
Pelaksanaan Perlindungan Konsumen di Seluruh Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pelaksanaan Perlindungan Konsumen	kali		77	910.540.000	80	800.000.000	80	1.033.155.477	80	1.033.155.477			
	Pemberdayaan Konsumen dan Kelembagaan Perlindungan Konsumen	BPSK			152.073.000	100.000.000	5	537.272.539	5	537.272.539				
	Jumlah Konsumen Dan Kelembagaan Perlindungan Konsumen yang diberdayakan (wilker UPT. PK Surabaya)	orang		315		320								
	Jumlah Konsumen Dan Kelembagaan Perlindungan Konsumen yang diberdayakan (wilker UPT. PK Malang)	orang		200		200								

Rencana Strategis Perubahan ke-II 2019-2024

PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	SATUAN	DATA CAPAIAN PADA AHUN AWAL PERENCANAAN (2020)	2021		2022		2023		2024		KONDISI AKHIR		UNIT KERJA PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	
4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	Jumlah Konsumen Dan Kelembagaan Perlindungan Konsumen yang diberdayakan (wilker UPT. PK Jember)	orang		75		100								
	Jumlah Konsumen Dan Kelembagaan Perlindungan Konsumen yang diberdayakan (wilker UPT. PK Bojonegoro)	orang		70		100								
	Jumlah Konsumen Dan Kelembagaan Perlindungan Konsumen yang diberdayakan (wilker UPT. PK Kediri)	orang		100		100								
Peningkatan Hubungan Kerja dengan Lembaga Perlindungan Konsumen	Jumlah Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat (LPKSM) yang Aktif	LPKSM			398.635.000		100.000.000	30	175.562.938	30	175.562.938			
	Prosentase Penanganan pengaduan konsumen (wilker UPT. PK Surabaya)	%		100		100								
	Prosentase Penanganan pengaduan konsumen (wilker UPT. PK Malang)	%		88		88								
	Prosentase Penanganan pengaduan konsumen (wilker UPT. PK Jember)	%		100		100								
	Prosentase Penanganan pengaduan konsumen (wilker UPT. PK Bojonegoro)	%		40		80								
	Prosentase Penanganan pengaduan konsumen (wilker UPT. PK Kediri)	%		80		80								
Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan dan Penyelesaian Sengketa Konsumen	Jumlah Pengaduan Konsumen yang Ditangani	Pengaduan			359.832.000		600.000.000	181	320.320.000	181	320.320.000			
	Jumlah Koordinasi Dan Sinkronisasi Penanganan Dan Penyelesaian Sengketa Konsumen (wilker UPT. PK Surabaya)	kali		7		10								
	Jumlah Koordinasi Dan Sinkronisasi Penanganan Dan Penyelesaian Sengketa Konsumen (wilker UPT. PK Malang)	kali		24		25								
	Jumlah Koordinasi Dan Sinkronisasi Penanganan Dan Penyelesaian Sengketa Konsumen (wilker UPT. PK Jember)	kali		6		10								
	Jumlah Koordinasi Dan Sinkronisasi Penanganan Dan Penyelesaian Sengketa Konsumen (wilker UPT. PK Bojonegoro)	kali		30		30								
	Jumlah Koordinasi Dan Sinkronisasi Penanganan Dan Penyelesaian Sengketa Konsumen (wilker UPT. PK Kediri)	kali		27		30								
Pelaksanaan Pengujian dan Sertifikasi Mutu Produk di Seluruh Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah sertifikat Pengujian dan Sertifikasi Mutu Produk	Sertifikat		6200	957.668.000	7000	1.050.000.000	4.500	1.101.379.899	4.500	1.101.379.899			
Verifikasi Mutu Produk	Jumlah Komoditi Potensial yang Dipantau	Komoditi			498.789.000		600.000.000	17	715.185.469	17	715.185.469			
	Jumlah Sertifikat yang diterbitkan di UPT PSMB LT Jember	Sertifikat		3700		4000								
	Jumlah Sertifikat yang diterbitkan di UPT PSMB LT Surabaya	Sertifikat		2500		3000								
Pengembangan Layanan Pengujian	Jumlah Dokumen Hasil Pengujian Mutu Barang	Dokumen			193.300.000		200.000.000	4.500	231.777.430	4.500	231.777.430			
	Jumlah Akreditasi Layanan Pengujian di UPT PSMB LT Jember	Akreditasi		1		1								

Rencana Strategis Perubahan Ke-II 2019-2024

PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	SATUAN	DATA CAPAIAN PADA AHUN AWAL PERENCANAAN (2020)	2021		2022		2023		2024		KONDISI AKHIR		UNIT KERJA PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	
4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	Jumlah Akreditasi Layanan Pengujian di UPT PSMB LT Surabaya	Akreditasi		1		1								
Pengembangan Layanan Sertifikasi	Jumlah Sertifikat Produk yang Diterbitkan	Sertifikat			265.579.000		250.000.000	12	154.417.000	12	154.417.000			
	Jumlah Akreditasi Layanan Sertifikasi di UPT PSMB LT Jember	Akreditasi		3		3								
	Jumlah Akreditasi Layanan Sertifikasi di UPT PSMB LT Surabaya	Akreditasi		3		3								
Pengembangan Layanan Kalibrasi					-									
	Jumlah Pengembangan layanan di UPT PSMB LT Jember	layanan		0										
	Jumlah Pengembangan layanan di UPT PSMB LT Surabaya	layanan		0										
Pelaksanaan Pengawasan Barang Beredar dan/atau Jasa di Seluruh Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah barang/jasa yang diawasi	barang/jasa		500.000	349.094.000	500.000	600.000.000	500.000	316.723.598	500.000	316.723.598			
Peningkatan Kapasitas dan Pelaksanaan Pengawasan Barang Beredar dan/atau Jasa sesuai Parameter Ketentuan Perlindungan Konsumen	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Barang Beredar dan Jasa serta Kegiatan Perdagangan yang Diawasi	Laporan			195.470.000		500.000.000	96	235.573.598	96	235.573.598			
	Jumlah Barang Beredar dan/atau Jasa Sesuai Parameter Ketentuan Perlindungan Konsumen (wilker UPT. PK Surabaya)	barang/jasa		100.000		150.000								
	Jumlah Barang Beredar dan/atau Jasa Sesuai Parameter Ketentuan Perlindungan Konsumen (wilker UPT. PK Malang)	barang/jasa		100.000		150.000								
	Jumlah Barang Beredar dan/atau Jasa Sesuai Parameter Ketentuan Perlindungan Konsumen (wilker UPT. PK Jember)	barang/jasa		100.000		150.000								
	Jumlah Barang Beredar dan/atau Jasa Sesuai Parameter Ketentuan Perlindungan Konsumen (wilker UPT. PK Bojonegoro)	barang/jasa		100.000		150.000								
	Jumlah Barang Beredar dan/atau Jasa Sesuai Parameter Ketentuan Perlindungan Konsumen (wilker UPT. PK Kediri)	barang/jasa		100.000		150.000								
Fasilitasi Penanganan terhadap Pelanggaran Atas Ketentuan Perlindungan Konsumen	Jumlah Kasus yang Ditangani	Kasus			153.624.000		100.000.000	141	81.150.000	141	81.150.000			
	Jumlah Penanganan terhadap Pelanggaran Atas Ketentuan Perlindungan Konsumen (wilker UPT. PK Surabaya)	penanganan		25		30								
	Jumlah Penanganan terhadap Pelanggaran Atas Ketentuan Perlindungan Konsumen (wilker UPT. PK Malang)	penanganan		20		25								
	Jumlah Penanganan terhadap Pelanggaran Atas Ketentuan Perlindungan Konsumen (wilker UPT. PK Jember)	penanganan		25		30								
	Jumlah Penanganan terhadap Pelanggaran Atas Ketentuan Perlindungan Konsumen (wilker UPT. PK Bojonegoro)	penanganan		14		15								
	Jumlah Penanganan terhadap Pelanggaran Atas Ketentuan Perlindungan Konsumen (wilker UPT. PK Kediri)	penanganan		14		15								

Rencana Strategis Perubahan ke-II 2019-2024

PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	SATUAN	DATA CAPAIAN PADA AHUN AWAL PERENCANAAN (2020)	2021		2022		2023		2024		KONDISI AKHIR		UNIT KERJA PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	
4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		Rp. Triliun	412,11	425		450		475		500				
PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI	Jumlah Pelaku usaha yang difasilitasi penggunaan dan Pemasaran Produk Dalam Negeri	Pelaku Usaha		90	5.290.691.500	90	6.290.000.000	90	12.057.844.400	90	12.057.844.400			
Pelaksanaan Promosi Produk Dalam Negeri	Jumlah Pelaksanaan Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri	Kali		6	5.066.715.500	6	5.840.000.000	15	12.053.184.400	15	12.053.184.400			
Facilitasi Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Provinsi	Jumlah pelaku usaha yang mendapatkan fasilitas Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri	Pelaku Usaha		40	5.066.715.500	40	5.840.000.000							
	Jumlah UMKM yang Melakukan Pemasaran Produk Dalam Negeri Terutama Produk yang Dihasilkan oleh UMKM melalui Kebersertaan dan Partisipasi pada Pameran Produk Dalam Negeri	UMKM						257	12.053.184.400	257	12.053.184.400			
Pelaksanaan Pemasaran Penggunaan Produk Dalam Negeri	Jumlah pelaku usaha yang mendapatkan fasilitas Pemasaran Penggunaan Produk Dalam Negeri	Pelaku Usaha				40	-							
Facilitasi Pemasaran Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Provinsi	Jumlah pelaku usaha yang mendapatkan fasilitas Pemasaran Penggunaan Produk Dalam Negeri	Pelaku Usaha				40								
Pelaksanaan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri	Jumlah Pelaksanaan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri	kali		2	223.976.000		450.000.000	2	4.660.000	2	4.660.000			
Sosialisasi Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri	Jumlah peserta Sosialisasi Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri	orang		50	111.976.000	50	150.000.000							
	Jumlah Laporan Sosialisasi Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri	Laporan						1	4.660.000	1	4.660.000			
Peningkatan Sistem dan Jaringan Informasi Perdagangan	Jumlah Sistem dan Jaringan Informasi Perdagangan	sistem		5	112.000.000	5	300.000.000							
	Jumlah Data dan Informasi Sistem dan Jaringan Informasi Perdagangan	Dokumen						1	34.200.000	1	34.200.000			
	Pertumbuhan PDRB Sektor Industri Pengolahan	%	-2,06	3,18		5,02		5,93		7,46		7,46		
		Rp. Triliun	705,79	700		725		750		775				
PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	Prosentase peningkatan unit usaha industri	%		1	16.011.835.000	1,1	11.315.000.000	1,2	11.166.561.222	1,2	11.166.561.222			
Penyusunan, Penerapan, dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Provinsi	Jumlah Dokumen Pembangunan Industri	dukumen		2	16.011.835.000	2	11.315.000.000	1	11.166.561.222	1	11.166.561.222			
Penyusunan Rencana Pembangunan Industri Provinsi	Jumlah Dokumen Rencana Pembangunan Industri	Dokumen						1	225.000.000	1	225.000.000			
Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Kebijakan Percepatan Pengembangan, Penyebaran dan Perwilayahan Industri	Jumlah Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Kebijakan Percepatan Pengembangan, Penyebaran dan Perwilayahan Industri dan perdagangan	kali		5	360.000.000	6	400.000.000							
	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Kebijakan Percepatan, Pengembangan, Penyebaran dan Perwilayahan Industri	Dokumen						2	50.000.000	2	50.000.000			
Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	Dokumen			15.301.835.000		10.865.000.000	138	9.691.561.222	138	9.691.561.222			

Rencana Strategis Perubahan Ke-II 2019-2024

PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	SATUAN	DATA CAPAIAN PADA AHUN AWAL PERENCANAAN (2020)	2021		2022		2023		2024		KONDISI AKHIR		UNIT KERJA PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	
4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	Jumlah Pelaku Industri Agro yang difasilitasi	Pelaku Industri		225		250								
	Jumlah Pelaku Industri Non Agro yang difasilitasi	Pelaku Industri		136		140								
	Jumlah jasa pelayanan UPT Aneka Industri dan Kerajinan	Jasa		470		470								
	Jumlah industri yang mendapatkan Pengembangan Teknis Aneka Industri dan kerajinan	Pelaku Industri		25		50								
	Jumlah jasa pelayanan UPT Industri makanan minuman dan kemasan	Jasa		450		450								
	Jumlah industri yang mendapatkan Pengembangan Teknis Industri makanan minuman dan kemasan	Pelaku Industri		100		125								
	Jumlah jasa pelayanan UPT Industri Logam dan Perekayasaan	Jasa		265		265								
	Jumlah industri yang mendapatkan Pengembangan Teknis Industri Logam dan Perekayasaan	Pelaku Industri		248		275								
	Jumlah jasa pelayanan UPT Industri Kayu dan Produk Kayu	Jasa		700		700								
	Jumlah industri yang mendapatkan Pengembangan Teknis Industri Kayu dan Produk Kayu	Pelaku Industri		100		125								
	Jumlah jasa pelayanan UPT Industri Kulit dan Produk Kulit	Jasa		1.500		1.500								
	Jumlah industri yang mendapatkan Pengembangan Teknis Industri Kulit dan Produk Kulit	Pelaku Industri		100		125								
	Jumlah Pelaku Industri yang mendapatkan pelayanan Mutu Produk Industri dan dan Pelatihan Desain Produk Industri di wilayah kerja UPT PMPI-TK Surabaya	Pelaku Industri		526		550								
	Jumlah Pelaku Industri yang mendapatkan pelayanan Mutu Produk Industri dan dan Pelatihan Desain Produk Industri di wilayah kerja UPT PMPI-TK Malang	Pelaku Industri		1.002		600								
Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri	Dokumen						2	100.000.000	2	100.000.000			
Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	Jumlah Dokumen Terkait KHHT	Dokumen		2	300.000.000									
	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	Dokumen						20	1.000.000.000	20	1.000.000.000			
Evaluasi terhadap Pelaksanaan Rencana Pembangunan Industri	Jumlah dokumen Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Industri yang disusun	dokumen		1	50.000.000	1	50.000.000							
	Jumlah Dokumen Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Industri	Dokumen						4	100.000.000	4	100.000.000			
PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI	Prosentase peningkatan pengendalian izin usaha industri	%		10	50.000.000	10	40.000.000	10	40.000.000	10	40.000.000			
Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI), dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Provinsi	Jumlah Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI), dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Provinsi	unit usaha		24	50.000.000	24	40.000.000	24	40.000.000	24	40.000.000			

Rencana Strategis Perubahan ke-II 2019-2024

PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	SATUAN	DATA CAPAIAN PADA AHUN AWAL PERENCANAAN (2020)	2021		2022		2023		2024		KONDISI AKHIR		UNIT KERJA PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	
4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Kawasan Industri (IUKI), dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Provinsi														
Facilitasi Pemenuhan Komitmen perolehan IUI, IPUJ, IUKI, dan IPKI Kewenangan Provinsi dalam Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas) yang Terintegrasi dengan Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah industri yang difasilitasi Pemenuhan Komitmen perolehan IUI, IPUJ, IUKI, dan IPKI	unit usaha		12	25.000.000	12	20.000.000							
	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Verifikasi Teknis Pemenuhan Kesesuaian Persyaratan Teknis Perizinan Berusaha Sektor Industri dan/atau dalam Rangka Perluasan Usaha untuk Bidang Usaha dengan Risiko Usaha Menengah-Tinggi dan Tinggi, melalui SIINas yang Terintegrasi dengan Sistem OSS, bagi: 1) Industri Besar, dan 2) Industri Kecil dan Industri Menengah yang Lokasinya Lintas Kabupaten/Kota, 3) Kawasan Industri, dan Perizinan Perluasan Kawasan Industri yang Merupakan POND yang Berlokasi Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Provinsi	Dokumen						2	20.000.000	2	20.000.000			
Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Perizinan di Bidang Industri dalam Lingkup IUI, IPUJ, IUKI, dan IPKI Kewenangan Provinsi	Jumlah industri yang diawasi	unit usaha		12	25.000.000	12	20.000.000							
	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Perizinan Di Bidang Industri dalam Lingkup perizinan Usaha Industri, Perizinan Perluasan Usaha Industri, Perizinan Kawasan Industri dan Perizinan Perluasan Kawasan Industri Kewenangan Provinsi	Dokumen						2	20.000.000	2	20.000.000			
PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL	Persentase Industri yang telah terdaftar dalam SIINas	%		20	100.000.000	20	110.000.000	20	85.000.000	20	85.000.000			
Penyediaan Informasi Industri untuk IUI, IPUJ, IUKI, dan IPKI Kewenangan Provinsi Berbasis Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)	Jumlah Penyediaan Informasi Industri untuk IUI, IPUJ, IUKI, dan IPKI Kewenangan Provinsi Berbasis Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)	Informasi		2	100.000.000	2	110.000.000	2	85.000.000	2	85.000.000			
Facilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Provinsi melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)	Jumlah data industri yang dianalisa	dokumen		4	25.000.000	4	40.000.000							
	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Provinsi Melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)	Dokumen						1	20.000.000	1	20.000.000			
Diseminasi dan Publikasi Data Informasi dan Analisis Industri Provinsi melalui SIINas	Jumlah Diseminasi dan Publikasi Data Informasi industri	kegiatan		2	50.000.000	2	50.000.000							
	Jumlah Dokumen Hasil Diseminasi dan Publikasi Data Informasi dan Analisis Industri Provinsi melalui SIINas	Dokumen						1	50.000.000	1	50.000.000			
Pemantauan dan Evaluasi Kepatuhan Perusahaan Industri dan Perusahaan Kawasan Industri Lingkup Provinsi dalam Penyampaian Data ke SIINas	Jumlah industri yang dipantau	unit usaha		12	25.000.000	12	20.000.000							
	Jumlah Dokumen Hasil Pemantauan dan Evaluasi Kepatuhan Perusahaan Industri dan Perusahaan Kawasan Industri Lingkup Provinsi dalam Penyampaian Data ke SIINas	Dokumen						1	15.000.000	1	15.000.000			
			90,24	86,4		86,6		86,8		87				
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase indikator program yang tercapai	%		88,5	106.299.846.000	88,5	111.884.205.000	90	109.615.010.804	90	111.207.040.804			
	Persentase realisasi anggaran	%		93		93		88,5		88,5				

Rencana Strategis Perubahan Ke-II 2019-2024

PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	SATUAN	DATA CAPAIAN PADA AHUN AWAL PERENCANAAN (2020)	2021		2022		2023		2024		KONDISI AKHIR		UNIT KERJA PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	
4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	Indeks profesionalitas ASN	%		90		90		93		93				
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	dokumen		15	697.096.000	20	911.574.000	14	650.000.000	14	350.000.014			
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen perencanaan dan anggaran perangkat daerah	dokumen		11	379.292.000	7	486.574.000							
	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen						5	300.000.000	5	300.000.000			
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen perencanaan perangkat daerah	dokumen				1	5.000.000							
	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Dokumen						1	2.500.000	1	2.500.000			
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah dokumen RKA	dokumen				1	5.000.000							
	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Dokumen						1	2.500.000	1	2.500.000			
Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah dokumen RKA Perubahan	dokumen				1	5.000.000							
	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Dokumen						1	2.500.000	1	2.500.000			
Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah dokumen DPA	dokumen				1	5.000.000							
	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Laporan						1	2.500.000	1	2.500.000			
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah dokumen DPA Perubahan	dokumen				5	5.000.000							
	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan						1	40.000.000	1	40.000.000			
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen capaian kinerja	dokumen		4	317.804.000	4	400.000.000							
	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan						4	300.000.000	4	14			
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah laporan pertanggungjawaban keuangan	laporan		12	71.779.741.200	12	74.957.631.000	12	108.965.010.804	12	110.857.040.790			
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah laporan pembayaran gaji dan tunjangan	laporan		12	69.538.383.000	12	72.251.631.000							
	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/Bulan						250	65.418.646.000	271	74.435.436.000			
Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah laporan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	laporan		12	1.717.536.000	12	1.850.000.000							
	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Dokumen						12	1.567.116.000		1.400.000.000			

Rencana Strategis Perubahan ke-II 2019-2024

PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	SATUAN	DATA CAPAIAN PADA AHUN AWAL PERENCANAAN (2020)	2021		2022		2023		2024		KONDISI AKHIR		UNIT KERJA PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	
4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah lapoan verifikasi penatausahaan	laporan		12	413.672.200	12	750.000.000							
	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Dokumen						12	25.000.000		250.000.000			
Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Laporan akuntansi perangkat daerah	laporan		12	83.850.000	12	85.000.000							
	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Dokumen						12	19.591.600		30.000.000			
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah dokumen angan SKPD	dokumen		2	7.000.000	2	7.000.000							
	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Laporan						12	9.000.000		9.000.000			
Pengelolaan dan Penyajian Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah dokumen tanggapan atas LHP	Dokumen				1	2.000.000							
	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	Dokumen						12	1.039.400		5.000.000			
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah laporan keuangan	laporan		12	16.700.000	12	10.000.000							
	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Laporan						12	4.200.000		5.000.000			
Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah laporan prognosis	Laporan		1	2.600.000	1	2.000.000							
	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Dokumen						1	1.370.000		1.500.000			
Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah dokumen ketatausahaan dan kepegawaian	dokumen		18	133.245.000	22	145.000.000	22	81.000.000	22	81.000.000			
Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah laporan perencann kebutuhan BMD SKPD	laporan				4	20.000.000							
	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Dokumen						1	1.000.000		1.000.000			
Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen	Dokumen		1	40.000.000	1	20.000.000							
	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Dokumen						1	20.000.000		20.000.000			
Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah laporan	Laporan		1	53.625.000	1	50.000.000							
	Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	Laporan						1	10.000.000		20.000.000			
Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Kegiatan	Kegiatan		1	10.000.000	1	15.000.000							
	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Laporan						1	10.000.000		10.000.000			

Rencana Strategis Perubahan Ke-II 2019-2024

PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	SATUAN	DATA CAPAIAN PADA AHUN AWAL PERENCANAAN (2020)	2021		2022		2023		2024		KONDISI AKHIR		UNIT KERJA PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	
4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Kegiatan dan Laporan	Laporan		12	9.620.000	12	20.000.000							
	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Laporan						2	10.000.000		10.000.000			
Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan	Laporan		2	10.000.000	2	10.000.000							
	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Laporan						1	10.000.000		10.000.000			
Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen	Dokumen		1	10.000.000	1	10.000.000							
	Jumlah Dokumen Hasil Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD	Dokumen						1	10.000.000		10.000.000			
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah dokumen ketatausahaan dan kepegawaian	Laporan		12	386.210.000	12	345.000.000	12	254.000.000	12	500.000.000			
Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Jumlah sarana dan prasana yg terpenuhi	paket		1	103.400.000	1	100.000.000							
	Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Unit						1	74.000.000		100.000.000			
Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah laporan pengolahan administrasi kepegawaian	laporan		12	67.500.000	12	50.000.000							
	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Paket						1	20.000.000		20.000.000			
Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah laporan data pegawai	laporan		12	20.000.000	12	25.000.000							
	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Dokumen						1	20.000.000		100.000.000			
Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah laporan SKP yang tepat waktu	Laporan		12	79.850.000	12	50.000.000							
	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Dokumen						1	50.000.000		40.000.000			
Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah laporan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Laporan		12	40.610.000	1	50.000.000							
	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Orang						4	50.000.000		200.000.000			
Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah sosialisasi yang dilaksanakan	Kali		1	26.425.000	1	20.000.000							
	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Orang						10	20.000.000		20.000.000			
Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah bintek yang dilaksanakan	Kali		2	48.425.000	2	50.000.000							
	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Orang						10	20.000.000		20.000.000			

Rencana Strategis Perubahan ke-II 2019-2024

PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	SATUAN	DATA CAPAIAN PADA AHUN AWAL PERENCANAAN (2020)	2021		2022		2023		2024		KONDISI AKHIR		UNIT KERJA PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	
4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Barang dan Jasa	laporan		11	3.080.151.956	11	3.245.000.000	11	2.250.918.440	11	3.224.591.620			
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah paket pengadaan	paket		1	266.369.800	1	250.000.000							
	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket						17	58.071.242	13	99.713.811			
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah paket pengadaan	Paket		1	195.119.856	1	200.000.000							
	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket						37	299.788.640	39	482.241.080			
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah paket pengadaan	Paket		1	145.365.300	1	150.000.000							
	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket						20	135.673.825	31	157.280.600			
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah paket pengadaan	Paket		1	739.345.100	1	750.000.000							
	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket						46	482.822.465	48	485.003.190			
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah paket pengadaan	Paket		1	156.884.400	1	150.000.000							
	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Paket						23	164.125.569	24	145.811.800			
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah paket pengadaan	Paket		1	20.305.000	1	20.000.000							
	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Dokumen						581	51.560.000	65	56.020.000			
Penyediaan Bahan/Material	Jumlah paket pengadaan	Paket		1	50.000.000	1	50.000.000							
	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	Paket						3	56.650.000	7	334.000.000			
Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah paket pengadaan	Kali		10	85.277.000	10	80.000.000							
	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Laporan						237	87.806.000	45	97.900.000			
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan	Laporan		15	1.326.485.500	1	1.500.000.000							
	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan						181	879.420.700	101	1.346.621.139			
Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah daftar arsip aktif, arsip inaktif, arsip vital	dokumen		1	10.000.000	1	10.000.000							
	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Dokumen						1	10.000.000	1	10.000.000			

Rencana Strategis Perubahan Ke-II 2019-2024

PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	SATUAN	DATA CAPAIAN PADA AHUN AWAL PERENCANAAN (2020)	2021		2022		2023		2024		KONDISI AKHIR		UNIT KERJA PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	
4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Sistem Informasi yang didukung	Paket		2	85.000.000	2	85.000.000							
	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	dokumen						1	25.000.000	1	10.000.000			
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	laporan		1	234.550.000	1	1.570.000.000	1	135.760.000	1	932.965.000			
Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan	unit				1	550.000.000							
	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	Unit						-	-	1	440.000.000			
Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan	Unit				3	60.000.000							
	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	Unit						-	-	-	-			
Pengadaan Alat Angkutan Darat Tak Bermotor	Jumlah Kendaraan	Unit												
	Jumlah Unit Alat Angkutan Darat Tak Bermotor yang Disediakan	Unit						-						
Pengadaan Mebel	Jumlah Mebel	Set		1	52.500.000	1	60.000.000							
	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Paket						2	28.000.000	1	20.000.000			
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya	Paket		5	182.050.000	3	450.000.000							
	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit						13	92.760.000	21	222.965.000			
Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya.	Unit				3	450.000.000							
	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	unit						-		1	100.000.000			
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	laporan		1	27.338.182.244	1	27.950.000.000	1	23.758.490.135	1	28.246.822.289			
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah pengiriman dokumen	paket		15	25.469.000	15	25.000.000							
	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	laporan						58	25.317.000	99	34.736.000			
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Bulan		12	3.711.376.184	12	3.800.000.000							
	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan						169	3.734.788.115	140	4.096.356.075			
Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah paket pelaksanaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Paket				5	125.000.000							

Rencana Strategis Perubahan ke-II 2019-2024

PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	SATUAN	DATA CAPAIAN PADA AHUN AWAL PERENCANAAN (2020)	2021		2022		2023		2024		KONDISI AKHIR		UNIT KERJA PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	
4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Laporan						2	5.000.000	2	8.000.000			
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah paket pelayanan umum kantor	Paket		15	23.601.337.060	15	24.000.000.000							
	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan						141	19.993.385.020	147	24.107.730.214			
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah laporan aset tetap yang terpelihara	Laporan		1	2.650.669.600	1	2.760.000.000	1	1.474.063.978	1	3.824.959.941			
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Jasa	paket		14	58.802.000	14	60.000.000							
	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	Unit						25	145.693.187	13	202.391.680			
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Jasa	paket		14	749.402.200	14	800.000.000							
	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit						61	535.053.256	64	973.406.861			
Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang dipelihara	paket		1	40.000.000	1	50.000.000							
	Jumlah Mebel yang Dipelihara	Unit						1	10.000.000	1	12.500.000			
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang dipelihara	paket		10	308.022.400	10	400.000.000							
	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit						170	225.494.785	176	411.661.400			
Pemeliharaan Aset Tak Berwujud	Jumlah Aset Tak Berwujud yang dipelihara	paket		1	25.000.000	2	50.000.000							
	Jumlah Aset Tak Berwujud yang Dipelihara	Unit						1	25.000.000	1	65.000.000			
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung yang dipelihara	paket		5	778.000.000	5	800.000.000							
	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit						7	304.982.750	7	1.100.000.000			
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana yang dipelihara	paket		10	691.443.000	10	600.000.000							
	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit						2	200.000.000	-	-			
					132.978.983.000		135.699.205.000		137.923.631.000		139.515.661.000			

BAB VII
KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Berdasarkan rencana program kegiatan yang akan dilaksanakan selama periode 2019-2024, maka indikator kinerja yang akan dicapai Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Timur adalah sebagaimana Tabel 7.1 berikut :

Tabel 7.1
Indikator Kinerja Perangkat Daerah yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD

NO	INDIKATOR	KONDISI AWAL		TARGET CAPAIAN				KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPJMD
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	
1	2	3		4				5
1	Nilai PDRB industri pengolahan (Triliun Rp)	711,3	-	523,52	551,35	581,53	614,33	
2	Nilai PDRB PDRB Kategori Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi (Rp. Triliun)	434,24	-	311,48	331,26	352,72	376,02	
3	Persentase peningkatan barang yang diawasi dan sertifikasi barang beredar (%)	3,1	-	1	1	1	1	
4	Nilai sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah	90	90,24	86,4	86,6	86,8	87	

TABEL 7.2
PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN PERANGKAT DAERAH
YANG Mendukung NAWABHAKTI

NAWABHAKTI	PROGRAM ICON	URAIAN KEGIATAN PRIORITAS	PROGRAM NOMENKLATUR	KEGIATAN NOMENKLATUR	SUB KEGIATAN NOMEN KLATUR	PAGU ANGGARAN			
						2021	2022	2023	2024
Bhakti – 7 Jatim Berdaya. "Ekonomi Kerakyatan dengan basis UMKM, Koperasi, MUMDesa dan Mendorong Pemberdayaan Pemerintahan Desa."	Perdagangan Antar Pulau	Fasilitasi Promosi, Penguatan KPD dan Misi Dagang	Penggunaan dan Pemasaran Produk Dalam Negeri	Pelaksanaan Promosi Produk Dalam Negeri	Fasilitasi Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Provinsi	5.800.000.000	6.500.000.000	7.150.000.000	7.865.000.000

VIII PENUTUP

Rencana Strategis (Renstra) Perubahan Ke-II Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Tahun 2019-2024 merupakan dokumen perencanaan jangka menengah yang memiliki kedudukan sangat penting dalam pengembangan perencanaan, koordinasi dan pengendalian pembangunan selama 5 (lima) tahun ke depan, memberikan arah, tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan penyelenggaraan pemerintahan sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Timur. Renstra tersebut menjabarkan pokok-pokok pikiran dan perencanaan yang termaktub pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Perubahan Ke-II Provinsi Jawa Timur Tahun 2019-2024.

KEPALA DINAS
PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
PROVINSI JAWA TIMUR

Iwan, S.Hut.,M.M.
Pembina Tingkat I
NIP. 19770216 199603 1 002

